Katalog: 1202059

Laporan Kinerja BPS | 2023

Volume 14, 2024

BADAN PUSAT STATISTIK

Katalog: 1202059

Laporan Kinerja BPS | 2023

Volume 14, 2024

BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2023

Volume 14, 2024

Katalog: 1202059
No. Publikasi: 02100.24003

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman: xv + 152 Halaman

Penyusun Naskah:
Biro Perencanaan

Penyunting:
Biro Perencanaan

Pembuat Kover:
Direktorat Diseminasi Statistik

Penerbit:
©Badan Pusat Statistik

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas kinerja BPS sebagai salah satu penyelenggara negara. Penyusunan LKIP BPS Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini mencakup evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama periode tahun 2023.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, perkembangan capaian kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta realisasi anggaran. Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk evaluasi agar BPS dapat mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya.

Pimpinan BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 21 Februari 2024
Plt. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

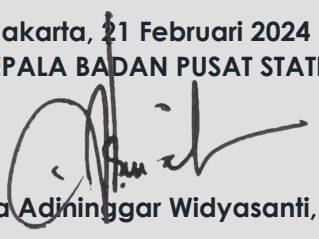

Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Daftar isi v
Daftar Tabel vii
Daftar Gambar ix
Daftar Lampiran xi
Ringkasan Eksekutif xiii

01

1.1 Latar Belakang …**1**
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS …**2**
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran …**3**
1.4 Potensi dan Permasalahan …**5**
1.5 Sistematika Penyajian Laporan …**7**

02

2.1 Visi dan Misi BPS …**9**
2.2 Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2020 – 2024 …11
2.3 Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2023 …**13**
2.4 Konsep dan Definisi IKU BPS Tahun 2023 …**14**

03

3.1 Capaian Kinerja BPS…**21**
3.2 Realisasi Kinerja BPS Tahun 2020 – 2023…**34**
3.3 Capaian Kinerja BPS Terhadap Renstra…**36**
3.4 Kegiatan Prioritas BPS…**40**
3.5 Prestasi BPS…**50**
3.6 Inovasi BPS…**51**
3.7 Realisasi dan Efisiensi Anggaran …**52**

04

4.1 Kesimpulan …**59**
4.2 Rencana Tindak Lanjut …**60**

Lampiran …63

DAFTAR TABEL

1	Tujuan, Pagu Anggaran BPS Menurut Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2023 (Milyar rupiah)	5
2	Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja BPS Tahun 2023	12
3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas"	21
4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN"	27
5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis "Penguatan statistik sektoral K/L/D/I"	30
6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis "SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan"	32
7	Perbandingan Realisasi Kinerja BPS Tahun 2020-2023	35
8	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja BPS Terhadap Renstra	37
9	Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program TA 2023 (Milyar)	52
10	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BPS Tahun 2023	53

11	Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BPS Tahun 2023 Menurut Kegiatan	**54**
12	Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran TA 2023	**55**

DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik	3
2	Komposisi SDM BPS Tahun 2023 Menurut Tingkat Pendidikan	4
3	Komposisi SDM BPS Tahun 2023 Menurut Jabatan Fungsional	4
4	Komposisi Pagu Anggaran BPS Tahun 2023 Menurut Program	5
5	Nilai Efisiensi Anggaran BPS Tahun 2020 - 2023	55

DAFTAR LAMPIRAN

Pernyataan Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik Tahun 2023	**63**
Jumlah Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023	**66**
Jumlah Pegawai BPS Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2023	**68**
Jumlah Pejabat Fungsional BPS Tahun 2023	**70**
Tampilan Dashboard SKD, indikator "Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)"	**72**
Tampilan Dashboard SKD, indikator "Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS"	**73**
Daftar Publikasi yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Nasional Tahun 2023	**74**
Daftar K/L/D/I yang Mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2023	**83**
Daftar K/L/D/I yang Menyampaikan Metadata Sektoral Sesuai Standar Tahun 2023	**84**
Daftar K/L/D/I yang Mampu Menyelenggarakan Statistik Sektoral Secara Mandiri	**86**

Daftar Prestasi BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2023 **87**

Daftar Inovasi BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2023 **136**

Dokumentasi Prestasi BPS Tahun 2023 **143**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan empat tujuan yang harus dicapai BPS pada Tahun 2023.

Secara umum kinerja BPS periode tahun 2023 masih dalam kategori baik dengan kinerja sebesar 103,31 persen. Capaian kinerja tersebut menurun dari tahun 2022 akan tetapi masih di atas 100 persen. Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian realisasi dari 5 (lima) IKU di atas 100 persen, dan 2 (dua) IKU di bawah 100 persen.

Perbandingan realisasi kinerja IKU BPS dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun tapi masih berada pada capaian di atas 100 persen. Jika dibandingkan dengan target di tahun akhir periode Renstra 2020-2024, sebanyak lima IKU telah mencapai kinerja lebih dari 100 persen dan dua IKU lainnya telah mencapai kinerja lebih dari 97 persen.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada tahun 2023 BPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.737,05 milyar dengan realisasi sampai dengan akhir periode TA 2023 sebesar Rp 7.504,61 milyar atau 97,00 persen. Realisasi anggaran Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 4.391,03 milyar atau 96,58 persen dari total pagu PPIS. Untuk realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar Rp 3.113,57 milyar dengan kontribusi 97,59 persen dari total pagu Dukman.

BADAN PUSAT STATISTIK
Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@bps.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Badan Pusat Statistik untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pusat Statistik.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2024

Plt. Inspektur Utama,

Akhmad Jaelani

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN
* Pindai kode QR di samping untuk menampilkan file asli

1 Pendahuluan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sebelumnya, BPS merupakan Biro Pusat Statistik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Berdasarkan undang-undang yang telah disebutkan di atas, BPS diamanatkan untuk melaksanakan peranan di bidang statistik yaitu:

Sebagai Lembaga Pemerintah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), BPS wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada para pemangku kepentingan. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu kepada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maksud penyusunan Laporan Kinerja adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 2023 adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS selama periode tahun 2023.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS

BPS merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik adalah menyelenggarakan statistik dasar. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
2. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
3. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
4. Penetapan sistem statistik nasional;
5. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
6. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, kewenangan yang dimiliki BPS adalah:

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya;
2. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya;
4. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional;
5. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
    a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik; dan
    b. Penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral.

Susunan organisasi BPS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS serta Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 87 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Statistika STIS terdiri dari sebagai berikut:

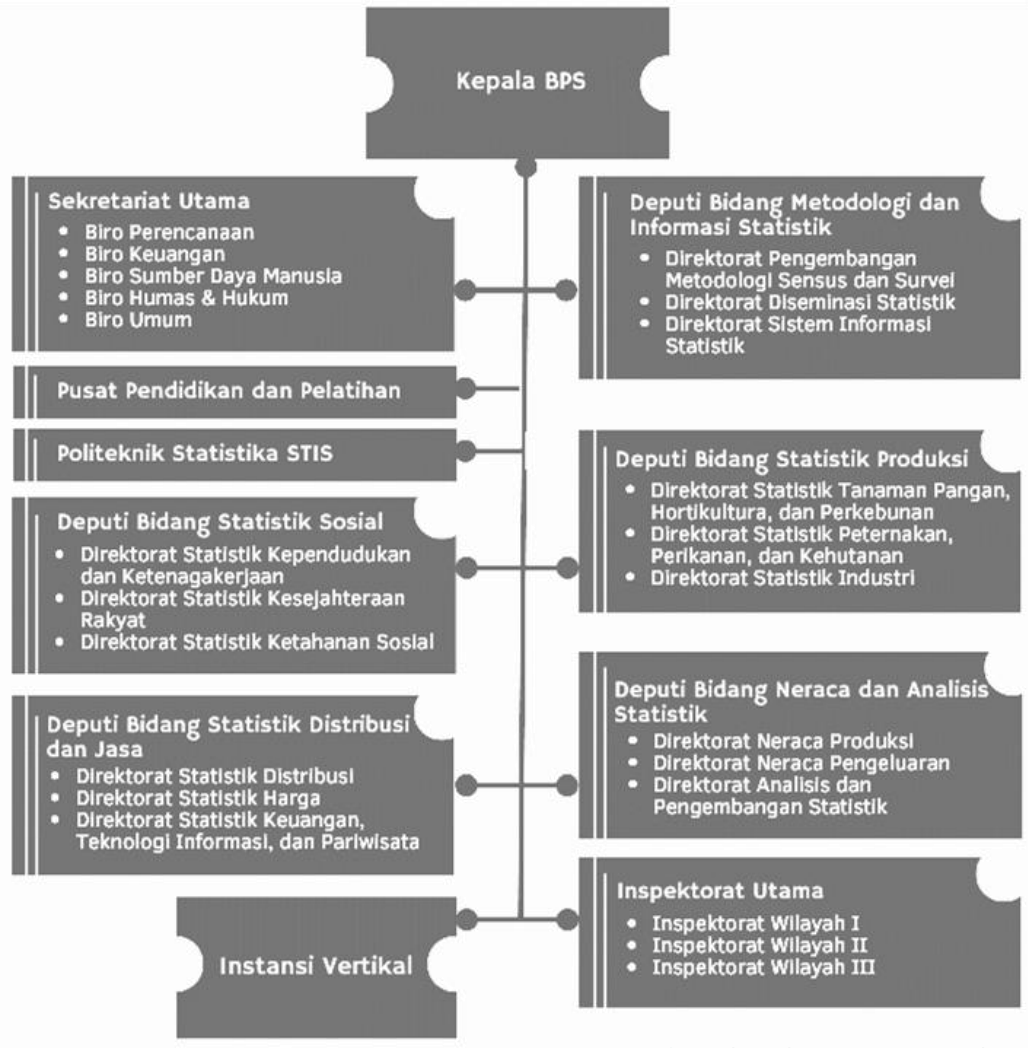

Gambar 1 | Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, BPS ditunjang oleh sumber daya manusia yang tersebar di 517 satuan kerja BPS se-Indonesia dengan total pegawai sebanyak 17.528 orang. Secara statistik, jumlah pegawai BPS tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022 yang berjumlah 16.826 orang.

Dapat dilihat pada Gambar 2, persentase pegawai yang berpendidikan DIII ke bawah sebesar 23,39 persen, DIV/S1 sebesar 57,98 persen, S2 sebesar 18,17 persen, dan S3 sebesar 0,47 persen. Proporsi pegawai yang berpendidikan DIII ke bawah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang semula 25,76 persen menjadi 23,39 persen. Penurunan tersebut diikuti dengan kenaikan komposisi pegawai yang berpendidikan DIV/S1 yang berada

pada angka 56,15 persen di tahun 2022 menjadi 57,98 persen. Kenaikan juga terdapat pada pegawai dengan penidikan S2 menjadi 18,17 persen dari 17,66 persen di tahun 2022. Hal ini dapat diartikan sebagai hasil dari peningkatan kapasitas SDM BPS dari segi pendidikan.

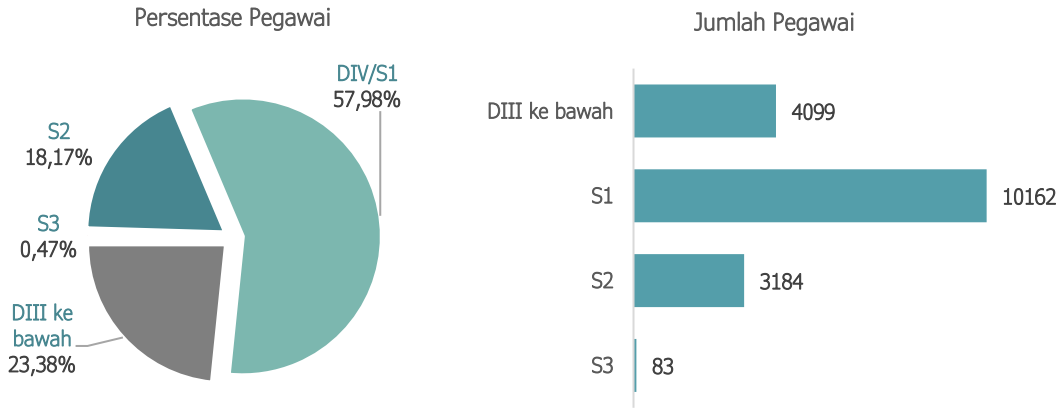

Gambar 2 | Komposisi SDM BPS Tahun 2023 Menurut Tingkat Pendidikan

Politeknik Statistika STIS yang merupakan sekolah kedinasan milik BPS menjadi Unit utama yang menghasilkan SDM dengan Pendidikan DIV/S1. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM juga dilakukan melalui aktivitas Rintisan Pendidikan Gelar dengan cara memberi kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat S2 dan S3 melalui jalur Tugas Belajar ataupun dengan memberikan ijin belajar bagi pegawai yang melanjutkan pedidikan dengan biaya mandiri.

Selain dari sisi pendidikan, peran jabatan fungsional juga terus menerus ditingkatkan. Tercatat sebanyak 11.986 pegawai atau sebesar 68,38 persen menduduki jabatan fungsional tertentu, meningkat dibandingkan tahun 2022 sebanyak 9.479 pegawai atau mengalami kenaikan sebesar 12,05 persen. Peningkatan tersebut sangat dipengaruhi adanya kebijakan perampingan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional tertentu serta penghapusan jabatan fungsional umum. Jumlah pejabat fungsional diperkirakan akan terus bertambah di tahun berikutnya hingga total seluruh pegawai menjadi fungsional tertentu. Dari seluruh pejabat fungsional tertentu yang dimiliki BPS, proporsi terbesar merupakan pejabat fungsional statistisi (83,53 persen), kemudian 8,27 persen merupakan fungsional pranata komputer, dan 8,20 persen sisanya merupakan pejabat fungsional lainnya.

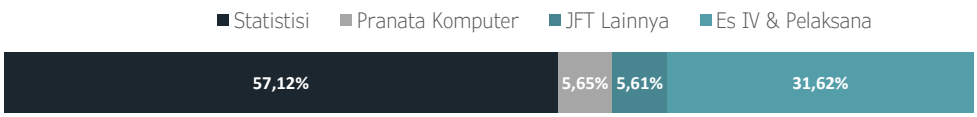

Gambar 3 | Komposisi SDM BPS Tahun 2023 Menurut Jabatan Fungsional

Dari sisi anggaran, pada tahun 2023 BPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 7.737,05 milyar. Pagu tersebut dibagi ke dalam dua program teknis yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp 4.546,51 milyar dan Program non teknis/generik yaitu Program Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar Rp 3.190,54 milyar. Sementara itu jika dilihat berdasarkan jenis belanja dan sumber dananya, pagu anggaran BPS tahun 2023 didominasi pada belanja pegawai dan belanja barang yang bersumber dari rupiah murni. Rincian Pagu anggaran BPS tahun 2023 menurut jenis belanja dan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 | Tujuan, Pagu Anggaran BPS Menurut Jenis Belanja dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2023 (Milyar rupiah)

Jenis Belanja	Rupiah Murni	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah Langsung Luar Negeri	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pegawai	2.360,43	-	-	2.360,43
Barang	4.734,31	322,85	2,60	5.059,76
Modal	314,22	2,64	-	316,86
Total	7.408,96	325,49	2,60	7.737,05

Gambar 4 | Komposisi Pagu Anggaran BPS Tahun 2023 Menurut Program

1.4. Potensi dan Permasalahan

BPS merupakan *National Statistics Office* (NSO) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Hal ini menjadi kekuatan bagi BPS untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya.

Peran BPS sebagai lembaga statistik pemerintah telah ditopang oleh Politeknik Statistika STIS yang telah menghasilkan mahasiswa ahli statistik untuk memenuhi kebutuhan pegawai BPS serta K/L lain. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik di K/L lain, sehingga memudahkan BPS dalam mewujudkan misinya menjadi pembina data dan juga pusat rujukan statistik dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Dalam melaksanakan tugasnya BPS memiliki *core value* BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang telah tertanam pada diri ASN BPS. *Core value* ini yang telah menjadikan semangat insan BPS untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengguna data dasar.

Peran BPS semakin meningkat dan diakui oleh berbagai pihak baik pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pihak luar negeri. Sebanyak 92,86 persen pengguna menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional (Hasil SKD 2023). Selain itu, semakin banyak Instansi/Kementerian yang bekerja sama dengan BPS untuk menghasilkan data yang dibutuhkan, antara lain Bappenas, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Pertanian, SDG's Indonesia, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian BUMN, Otoritas Jasa Keuangan, *Australian Bureau of Statistics* (ABS) dan *International Monetary Fund* (IMF), G20, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa data BPS semakin dipercaya dan adanya kepercayaan pengguna terhadap data BPS.

Namun di sisi lain, BPS harus lebih meningkatkan peran sebagai pembina statistik sektoral bagi kementerian/lembaga maupun Pemerintah Daerah karena kebutuhan data statistik semakin kompleks dan beragam bagi kinerja pemerintah dan pembangunan nasional. Terlebih bahwa Pemerintah Daerah sudah memiliki satuan perangkat pemerintah daerah urusan Komunikasi, Informasi dan Statistik. BPS harus berkoordinasi, bekerja sama dengan berbagai pihak melalui forum satu data.

Selain peningkatan peran BPS sebagai pembina urusan statistik, permasalahan yang dihadapi BPS adalah terkait cara meningkatkan serta mempertahankan kualitas data yang dihasilkan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pengguna data. Walaupun berdasarkan hasil Survei Kebutuhan Data BPS sudah menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi namun BPS harus senantiasa memunculkan inovasi-inovasi yang sesuai dengan perkembangan mutakhir seiring dengan terjadinya perubahan masyarakat dan kemajuan teknologi.

Prosedur penjaminan kualitas harus dapat diterapkan di semua kegiatan BPS secara bertahap, penerapan teknologi informasi sehingga data semakin cepat tersaji dan meminimalkan *error*/kesalahan data. Era *big data* tidak mungkin dihindari, oleh sebab itu BPS harus dapat mengikuti dan menggunakan data perkembangan global yang sangat cepat dengan menerapkan perangkat teknologi yang efisien, efektif serta ekonomis. Selain *big data*, perkembangan sumber data alternatif juga termasuk pemanfaatan data administratif dengan kualitas yang semakin baik.

Di sisi lain, meningkatnya jumlah survei yang dilakukan BPS berdampak pada sedikit responden yang berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS. Kunjungan yang berulang pada satu responden untuk berbagai survei dapat membuat

responden bosan dan bahkan menolak untuk didata sehingga berdampak pada penurunan *response rate* atau tingkat pemasukan dokumen survei. Untuk itu diperlukan upaya untuk menjadikan BPS yang lebih efektif, efisien dan ekonomis dengan hasil akhir yang semakin kredibel, andal dan memberi manfaat bagi semua pengguna data.

Tantangan lainnya yang juga perlu mendapat perhatian adalah penguatan kolaborasi dan sinkronisasi penyelenggaraan statistik dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang efektif, efisien, dan andal. Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi BPS sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata dan memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data. Selain itu, dari sisi internal organisasi BPS juga menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan kapabilitas organisasi, diantaranya: Perubahan budaya kerja yang *agile*, fleksibel, dan kolaboratif; Penyesuaian manajemen kinerja dan pembangunan manajemen talenta; Sistem kerja yang terintegrasi dan berbasis digital; serta Penguatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja BPS Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. **Pendahuluan**
Bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; SDM dan dukungan anggaran; potensi permasalahan; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. **Perencanaan Kinerja**
Bab ini berisi visi dan misi BPS; tujuan, sasaran dan target kinerja tahun 2023; serta konsep defisini IKU BPS tahun 2023.

Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**
Bab ini berisi capaian kinerja BPS, capaian Renstra BPS, realisasi dan efisiensi anggaran, prestasi, inovasi serta kegiatan besar BPS di tahun 2023.

Bab IV. **Penutup**
Bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

Perencanaan Kinerja

2

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi BPS

Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu "**Mewujudkan bangsa yang berdaya saing**". Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, memperhatikan aspirasi masyarakat, potensi dan permasalahan, serta mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden maka visi Badan Pusat Statistik untuk tahun 2020-2024 adalah:

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju"

("*Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia*")

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam penyediaan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju. Dengan visi baru ini, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai pembina data statistik. Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut:

1 Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Perpres No. 86 tahun 2007). Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi. Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretability* (interpretabilitas).

Setiap penyelenggaraan kegiatan statistik, BPS akan selalu berpedoman kepada konsep, standar, dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *The United Nations Fundamental Principles of Official Statistics (UNFOS)*.

2 Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan

BPS memiliki mandat untuk melakukan pembinaan terhadap instansi lain terkait dengan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Hal ini dalam rangka mendukung Sistem Statistik Nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerjasama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP No.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik). Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3 Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4 Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah

Pembangunan insan statistik dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Pembangunan insan

statistik dilakukan untuk mewujudkan pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas, dan amanah. Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.

Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur). Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran didalam melaksanakan kegiatan statistik.

Nilai-nilai organisasi tersebut kemudian dilebur ke dalam *core value* ASN BerAKHLAK yang terdiri dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif sesuai dengan SE Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021. Insan BPS diharapkan dapat mencermati dan mengamalkan perilaku BerAKHLAK dalam melaksanakan amanah pekerjaannya serta mencerminkan *employer branding* Bangga Melayani Bangsa.

2.2. Rencana Strategis (Renstra) BPS Tahun 2020 – 2024

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPS berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, dan Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – 2024. Muatan Renstra BPS yang disusun meliputi visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program, dan kegiatan yang disesuaikan engan tugas dan fungsi BPS dalam penyeiaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2019, target kinerja harus menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Kegiatan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS untuk tahun 2020 – 2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020 – 2024, BPS menetapkan 4 (empat) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (outcome) dari program BPS. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2 | Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja BPS Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/Indikator	Target Tahunan				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan					
1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas					
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	25*	30*	95	100	100
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	70	74	78	82	86
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN					
2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN					
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	25*	30*	35	40	45
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar 9%)	60*	64*	68	72	76
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN					
3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I					
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	30*	34*	38	42	46
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi					
4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan					
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	97	97	98	99	99

** Data masih menggunakan IKU lama sebelum Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022*

2.3. Perjanjian Kinerja BPS Tahun 2023

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi BPS, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan target yang dapat dilihat pada Tabel 2. Tujuan, sasaran dan target kinerja BPS yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Kepala BPS tahun 2023, didasarkan pada Perka BPS Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perka BPS Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut dimonitor setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan triwulanan dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab Kepala BPS kepada Presiden atas penggunaan anggaran BPS. Perjanjian Kinerja Kepala BPS Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 | Tujuan, Sasaran, dan Target Kinerja BPS Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)
1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan		
1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas		
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	100,00
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	98,00
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN		
2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN		
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	40,00
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)	Persen	76,00

Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target Tahunan
(1)	(2)	(3)
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN		
3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I		
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	Persen	50,00
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi		
4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan		
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	Opini	WTP
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98,00

2.4. Konsep dan Definisi Indikator Kinerja Utama BPS Tahun 2023

Sasaran 1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Terdapat dua IKU yang digunakan untuk menangkap ketercapaian tujuan dari sasaran 1.1. "Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas", yaitu:

1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

Indikator ini menangkap kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator ini berfungsi untuk mengukur tingkat kepercayaan pengguna (lembaga/Instansi pemerintah) terhadap data dan informasi yang dihasilkan BPS. Angka pada indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) BPS yang dilaksanakan setiap tahun dan yang menjadi penanggungjawab atas indikator ini adalah Kedeputian Metodologi dan Informasi Statistik, Kedeputian Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, serta Neraca dan Analisis Statistik.

Cara penghitungannya adalah:

$$P\ PMEP = \frac{JPMEP}{JP} \times 100\%$$

Keterangan

P PMEP : Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

JPMEP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

JP : Jumlah pengguna data yang berasal dari K/L/D/I yang menggunakan data BPS.

1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

Indikator ini berusaha menangkap kemampuan Badan Pusat Statistik untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan nasional. IKU ini bertujuan untuk mengukur publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat yang dihasilkan Badan Pusat Statistik dan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan. Angka pada indikator ini bersumber dari data Survei Kebutuhan Data (SKD) BPS dan data internal Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei BPS. Yang menjadi penanggungjawab atas indikator ini adalah Kedeputian Metodologi dan Informasi Statistik, Kedeputian Bidang Sosial, Produksi, Distribusi dan Jasa, serta Neraca dan Analisis Statistik.

Cara penghitungannya adalah:

$$P\ PbAS = \frac{JPbAS}{JPb} \times 100\%$$

Keterangan

P PbAS : Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan nasional.

JPbAS : Jumlah publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan K/L/D/I sebagai dasar perencanaan, *monitoring* dan evaluasi pembangunan nasional.

JPb : Jumlah publikasi yang bersumber dari aktivitas statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan K/L/D/I.

Terdapat dua IKU yang digunakan untuk menangkap ketercapaian tujuan dari sasaran 2.1. yaitu "Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)" dan "Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)" yang keduanya merupakan tanggungjawab Kedeputian Metodologi dan Informasi Statistik.

2.1. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.

Indikator ini berusaha menangkap kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam merekomendasikan kegiatan statistik di K/L/D/I. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui rekomendasi kegiatan statistik yang dilakukan oleh K/L/D/I. Angka pada indikator ini bersumber dari Laporan dari Sistem Rekomendasi Statistik Direktorat Diseminasi Statistik BPS.

Cara penghitungannya adalah:

$$P\ LmRS = \frac{JLmRS}{JLR} \times 100\%$$

Keterangan
P LmRS : Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.
JLmRS : Jumlah K/L/D/I produsen data yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik.
JLR : Jumlah K/L/D/I produsen data yang menjadi target pembinaan.

2.2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar.

Indikator ini berusaha menangkap kemampuan BPS sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penerapan standar kegiatan statistik yang akan dilaksakanan K/L/D/I. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian BPS dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui pembinaan penerapan standar kegiatan statistik yang dilakukan K/L/D/I. Angka pada indikator ini bersumber dari Laporan *Monitoring* Metadata Statistik Sektoral BPS.

Cara penghitungannya adalah:

$$P\ LmM = \frac{JLmM}{JLs} \times 100\%$$

Keterangan
P LmM : Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar.
JLmM : Jumlah K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar.
JLs : Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik.

Sasaran 3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Hanya ada satu IKU yang digunakan untuk menangkap ketercapaian tujuan dari sasaran 3.1. yaitu "Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)". Seluruh kedeputian bertanggung jawab terhadap indikator ini.

3.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.

Indikator ini menangkap kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai pembina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I secara mandiri. K/L/D/I dikatakan mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri jika K/L/D/I mampu menyelenggarakan minimal 1 kegiatan statistik sektoral mulai dari perencanaan, pendataan lapangan/ pencataan data administrasi, pengolahan data, hingga penyusunan laporan/publikasi/rilis data. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I secara mandiri. Angka pada indikator ini bersumber dari laporan kegiatan Kedeputian teknis BPS.

Cara penghitungannya adalah:

$$P\ LmSS = \frac{JLmSS}{JLs} \times 100\%$$

Keterangan
P LmSS : Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri(%).
JLmSS : Jumlah K/L/D/I yang menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.
JLs : Jumlah K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik.

Terdapat dua IKU yang digunakan untuk menangkap ketercapaian tujuan dari sasaran 4.1 yaitu "Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS" dan "Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)".

4.1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS.

Indikator ini merupakan hasil penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahunan yang disusun oleh Badan Pusat Statistik dan bertujuan mengukur tingkat akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pusat Statistik. Opini Laporan Keuangan adalah pernyataan secara profesional sebagai kesimpulan pemeriksa sehubungan dengan tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang menjadi penanggungjawab atas indikator ini adalah Inspektorat Utama dan Sekretariat Utama.

Dalam penilaian kinerja indikator, kategori opini BPK terhadap laporan keuangan diberikan skor sebagai berikut:

- Tidak Menyatakan Pendapat *(Disclaimer)* bobot 25
- Tidak Wajar *(Adverse)* bobot 50
- Wajar Dengan Pengecualian *(Qualified Opinion)* bobot 75
- Wajar Tanpa Pengecualian *(Unqualified Opinion)* bobot 100

Target BPS adalah Wajar Tanpa Pengecualian (Skor=100).

4.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Indikator ini menangkap kemampuan Badan Pusat Statistik sebagai penyedia data statistik dalam memberikan pelayanan prima kepada pengguna data. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana dalam pelayanan statistik di BPS. Angka pada indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) dan Survei Kepuasan Konsumen BPS yang dilaksanakan setiap tahun dan yang menjadi penanggungjawab atas indikator ini adalah Sekretariat Utama karena berhubungan dengan penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BPS.

Cara penghitungannya adalah:

$$\%KPSP = \frac{\sum Ppuas}{\sum PBPS} \times 100\%$$

Keterangan

%KPSP : Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%).

∑*Ppuas* : Jumlah pengguna data yang puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

∑*PBPS* : Jumlah pengguna data BPS.

Akuntabilitas Kinerja

3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja BPS

Keberhasilan kinerja suatu instansi dapat dilihat dari keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program yang sudah direncanakan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, perlu dibuat analisis capaian kinerja instansi sebagai tolok ukur penilaian kinerja dan sebagai bahan evaluasi agar suatu instansi menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis. Capaian kinerja BPS tahun 2023 dihitung dari rata-rata pencapaian dari seluruh indikator kinerja sasaran strategis selama periode tahun anggaran 2023. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen **Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023** yang selaras dengan dokumen **Reviu Rencana Strategis periode 2020-2024**.

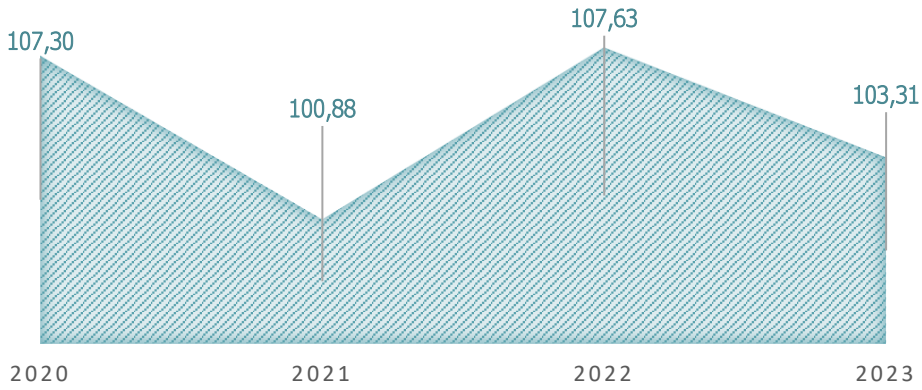

Gambar 4 | Capaian Kinerja BPS Tahun 2020-2023

Jika dilihat perkembangannya selama empat tahun terakhir, capaian kinerja BPS periode tahun 2020 hingga 2023 bergerak secara fluktuatif. Meski demikian, setiap tahun BPS berhasil mencapai kinerja 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi yang dicapai berhasil melebihi target kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dapat dikatakan bahwa selama tahun 2020 hingga tahun 2023, BPS tetap mampu mempertahankan

kinerjanya meski menghadapi berbagai macam kendala. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan sebagai berikut:

1 Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Di dalam Perpres No. 86 tahun 2007 disebutkan bahwa Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari juga semakin meningkat. Pengguna data menginginkan data bisa tersedia lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*).

Upaya pengembangan yang dilakukan BPS sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator sosial-ekonomi. Sebagai lembaga pemerintah yang ditugaskan untuk mengumpulkan data makro dan data mikro, BPS mempunyai konsumen utama berupa Kementerian/Lembaga dan dunia usaha serta masyarakat. Data tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan serta rencana pembangunan. Hal ini menuntut BPS untuk terus meningkatkan kualitas data statistik terutama dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan oleh pemerintah.

Sebagai wujud nyata peningkatan kualitas data statistik tersebut, BPS menuangkan ke dalam Tujuan Strategis pertama yaitu **menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.** Pada tujuan ini terdapat satu sasaran strategis yaitu **meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.** Tujuan pertama ini merupakan penjabaran misi BPS yaitu **menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional.**

Sasaran 1.1 Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Terdapat dua IKU yang berkaitan dengan pemanfaatan data statistik dan mengukur SS1.1. Dari dua IKU tersebut, rata-rata capaian kinerja SS1.1 TA. 2023 adalah 98,6 persen karena seluruh indikator pada sasaran ini belum mencapai target yang didtetapkan. Secara rinci target dan capaian kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3 | Capaian Kinerja Sasaran Strategis
"Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas"

IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(5)
Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	100,00	97,48	97,48
Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	98,00	97,73	99,72
Rata rata Capaian Kinerja			98,60

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)

Indikator **"Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional"** ditujukan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS yang digunakan sebagai dasar rujukan dalam perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional dari sudut pandang pengguna data. Pengukuran indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2023 dengan sampel konsumen data yang berasal dari K/L/D/I yang menerima pelayanan dari unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS baik secara luring maupun daring.

Pada tahun 2023, target untuk indikator ini di dalam dokumen reviu Renstra BPS Tahun 2020-2024 sebesar 100 persen. Dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2022 sebesar 97,39 persen, maka diputuskan bahwa target kinerja indikator tahun 2023 sejalan engan target Renstra yaitu 100 persen. Dengan target maksimal tersebut, berdasarkan hasil SKD Tahun 2023, diperoleh hasil persentase pengguna data dari K/L/D/I yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional sebesar 97,48 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator sebesar 97,48 persen. Walaupun capaian indikator ini tidak 100 persen, namun dapat dikatakan bahwa lembaga/instansi pemerintah telah optimal menggunakan data BPS terutama sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi Pembangunan nasional.

Meskipun capaian indikator ini sudah cukup baik, tetapi masih terdapat kendala yang dihadapi, antara lain: terbatasnya data yang tersedia untuk penghitungan indikator di level BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga batas waktu rilis indikator; tantangan keragaman data khususnya dari sisi kelengkapan dan kemutakhiran data; adanya ketidaksesuaian data yang tersedia dengan harapan pengguna data; serta adanya *automatic adjustment* sehingga beberapa kegiatan strategis BPS tidak dapat dilaksanakan antara lain kegiatan prioritas nasional Metropolitan Statistical Area, Survei Ekonomi Pertanian dan survei rutinan lainnya seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2023, Pendataan Potensi Desa, dst yang berakibat tidak tersedianya data yang dibutuhkan oleh pengguna.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS telah melakukan beberapa upaya berupa: memperkuat koordinasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah terkait penyediaan data yang digunakan untuk penghitungan indikator agar indikator dapat rilis tepat waktu; Melakukan modernisasi pengumpulan data statistik dengan cara pemanfaatan sumber data lain seperti data administrasi dan *big data* untuk menjawab tantangan keragaman data; Melanjutkan ujicoba *Economy Wide Survey* sebagai bentuk integrasi survei untuk perbaikan proses bisnis statistik dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dihasilkan BPS; Melakukan peningkatan kualitas penyediaan data BPS melalui perwajahan baru *website*; dan menyempurnakan pemberian pelayanan statistik baik secara offline maupun online melalui SILASTIK.

Rencana tindak lanjut di tahun 2024 untuk mengoptimalkan pencapaian target IKU ini adalah penyediaan ruang publik (*public space)* untuk pelayanan statistik, penyediaan ruang *National Statistics Command Center* (NSCC) yang salah satunya bertujuan untuk menyajikan informasi dari berbagai sistem, serta menyajikan *analytic dashboard*. Hal ini sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan BPS dalam pengumpulan informasi secara cepat dan *real time* terkait pengumpulan data di lapangan, administrasi, kajian dan analisis data dari berbagai indikator yang dimiliki.

Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)

Akurasi menjadi salah satu dimensi penting dalam menghasilkan data yang berkualitas. Data dengan akurasi tinggi berarti data tersebut dapat dipercaya dan mendekati kebenaran, atau dengan kata lain dapat mencerminkan fenomena yang sebenarnya terjadi. Indikator **"Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional"** merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan BPS menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi dan khususnya yang digunakan oleh pemerintah untuk perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Pengukuran indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2023 dengan menghitung jumlah publikasi BPS yang menerapkan standar akurasi dan sekaligus dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional

dibagi dengan total seluruh publikasi BPS yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan oleh pengguna data.

Pada tahun 2023 ditetapkan target untuk indikator ini sebesar 98 persen. Target yang ditetapkan diatas target yang tertera dalam dokumen reviu Renstra BPS Tahun 2020-2024 yang hanya sebesar 82 persen. Peningkatan target didorong oleh realisasi tahun 2022 yang sudah 98,13 persen, sehingga BPS memandang perlu untuk penetapan target yang lebih menantang. Berdasarkan hasil SKD Tahun 2023, diperoleh jumlah publikasi yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional sebanyak 215 publikasi (terlampir). Sementara itu, dengan jumlah total seluruh publikasi BPS yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan oleh pengguna data sebanyak 220 publikasi, diperoleh realisasi indikator Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional sebesar 97,72 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator sebesar 99,71. Dengan menghasilkan publikasi yang menyajikan data dan informasi akurat, dapat dikatakan bahwa BPS mampu menyajikan publikasi dengan kualitas data yang baik untuk disajikan kepada pengguna data khususnya pemerintah dalam melakukan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional.

Meskipun sudah dihasilkan capaian kinerja yang sangat baik, pencapaian indikator ini tidak telepas dari kendala yang dihadapi. Penyusunan publikasi di BPS masih terhambat oleh jumlah SDM di daerah yang kurang memadai dan diiringi dengan jadwal pelaksanaan survei/sensus yang padat. Selain itu, koordinasi dalam penyusunan publikasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah masih belum optimal sehingga memengaruhi kualitas publikasi yang dihasilkan. Beberapa publikasi di level BPS Daerah juga mengalami tunda rilis dikarenakan data yang digunakan untuk penyusunan publikasi belum tersedia sampai tanggal rilis ditetapkan.

Untuk mengatasinya BPS telah berupaya mengarah pada integrasi survei yang bertujuan untuk menjadikan BPS yang lebih efektif, efisien dan ekonomis. Dilakukan pula penguatan koordinasi antara BPS Pusat dan BPS Daerah khususnya dalam penyusunan publikasi yang menerapkan standar akurasi serta melaksanakan penundaan rilis publikasi untuk publikasi yang datanya belum tersedia. Sebagai rencana aksi tindak lanjut kedepannya BPS juga perlu terus meningkatkan koordinasi antara BPS Pusat dan BPS daerah dalam penyusunan publikasi serta memperbaiki kualitas publikasi dengan mempertajam analisis melalui metode *data story telling* sehingga publikasi tersebut diharapkan dapat memberi *insight* sebagai komitmen BPS dalam penyediaan *decision support*.

2 Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

BPS memiliki peran sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN serta sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS adalah sebagai penyedia data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak. Untuk mendukung peran dan fungsi tersebut BPS memiliki tujuan kedua **Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN**. Di dalam tujuan kedua ini pula, peran BPS sebagai pembina data dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia semakin terlihat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bertujuan memberikan acuan tentang pedoman pelaksanaan penyelenggaraan tata kelola untuk mewujudkan satu data bagi instansi pusat dan daerah serta mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dan sebagai bentuk dukungan peraturan perundang-undangan yang menunjang Sistem Statistik Nasional. Di dalam Perpres ini, BPS bertindak sebagai pembina data statistik. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyatakan bahwa BPS dibentuk untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, BPS bertugas sebagai pembina statistik untuk mengembangkan Sistem Statistik Nasional, yang dilakukan kepada seluruh penyelenggara kegiatan statistik di Indonesia. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut, terlihat bahwa BPS memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia.

Sasaran 2.1 Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN

Tujuan kedua dicapai melalui satu sasaran strategis yaitu "**Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN**". Terdapat dua IKU yang membangun sasaran tersebut, yakni "**Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik**" dan "**Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar**". Berdasarkan target kinerja yang ditetapkan, capaian kinerja SS2.1 TA. 2023 tercapai sangat baik dengan rata-rata sebesar 113,34 persen. Secara rinci target dan capaian kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4 | Capaian Kinerja Sasaran Strategis
"Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN"

IKU (1)	Target 2023 (2)	Realisasi 2023 (3)	Capaian Kinerja (%) (5)
Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	40,00	54,05	120,00
Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	76,00	78,38	103,13
Rata rata Capaian Kinerja			111,57

Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, kemudian PP No 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik maka setiap K/L/D/I pemerintah yang akan melakukan kegiatan survei harus mengikuti rekomendasi yang diberikan oleh BPS sebagai pembina data. BPS akan melakukan telaah rencana teknis kegiatan survei yang akan dilakukan termasuk memberikan saran/masukan sesuai dengan kaidah statistik pemerintahan. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian BPS dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I melalui rekomendasi kegiatan statistik yang dilaksanakan K/L/D/I.

Hasilnya, selama periode Januari hingga Desember 2023, dari 37 K/L/D/I yang menjadi target pembinaan terdapat 20 K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dari BPS atau sebesar 54,05 persen. Daftar K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik, informasi nomor rekomendasi serta kegiatan statistik yang dilaksanakan oleh masing-masing K/L/D/I, dan dokumentasi beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan BPS dapat dilihat pada lampiran.

Dengan menetapkan target sebesar 40,00 persen, maka BPS berhasil melampaui target dengan capaian kinerja 120,00 persen. Capaian tersebut meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 19,60 poin. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan usaha optimal BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I dan mendorong pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik. Meski demikian, terdapat kendala yang dihadapi selama melaksanakan IKU ini. Kendala yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan K/L/D/I terhadap kewajiban pemberitahuan rancangan kegiatan statistik secara aktif dan mandiri ke BPS. Solusi yang telah dilakukan adalah meningkatkan kolaborasi dan memaksimalkan sarana dalam proses penyelenggaraan pembinaan statistik ke K/L/D/I melalui pembinaan dan sosialisasi.

Tentunya BPS telah mengupayakan yang terbaik dalam menjalankan perannya sebagai pembina kegiatan statistik dengan memberikan rekomendasi sesuai ketentuan. Capaian kinerja tersebut sudah dapat dikatakan baik namun hal ini tetap perlu dijadikan penyemangat bagi BPS kedepannya agar dapat melaksanakan perannya dengan lebih baik. Rencana tindak lanjut tahun 2024 untuk mempertahankan capaian kinerjanya adalah dengan mengadakan kegiatan Workshop Rekomendasi Statistik sebagai sarana meningkatkan kolaborasi dalam penyelengaraan statistik sektoral, *launching* Aplikasi Romantik 2.0 sebagai bentuk peningkatan sarana dalam proses penyelenggaraan statistik sektoral dan mengadakan rapat koordinasi metadata statistik dengan K/L/D/I.

Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar

Indikator "**Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar**" masih selaras dengan indikator sebelumnya yakni berkaitan dengan pengaplikasian statistik yang tepat sebagai bentuk komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Indikator ini menangkap kemampuan BPS sebagai pembina kegiatan statistik dalam penerapan standar kegiatan statistik yang akan dilaksakanan K/L/D/I.

Hasilnya selama periode Januari hingga Desember 2023, dari 37 K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik, sebanyak 29 K/L/D/I atau 78,38 persen di antaranya telah menyampaikan metadata sektoral sesuai standar. Artinya BPS telah mampu mencapai target indikator sebesar 76 persen sehingga capaian kinerja IKU ini adalah 103,13 persen. Capaian tersebut menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar 8,16 poin. Oleh karena itu, BPS perlu meningkatkan upayanya sebagai pembina statistik sehingga kedepannya akan lebih banyak lagi K/L/D/I yang dapat menyampaikan metadata sektoral sesuai standar sesuai dengan prinsip SSN. Daftar K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral di tahun 2023 dapat dilihat di lampiran.

Dalam pencapaian target penyampaian metadata sektoral sesuai standar, BPS masih menghadapi kendala dalam pemenuhan IKU yakni K/L/D/I belum semua mengetahui manfaat dari metadata, sehingga minimnya pengajuan metadata di INDAH (Indonesia Data Hub) dan masih kurang efektifnya koordinasi dan kolaborasi dalam penyusunan metadata statistik di K/L/D/I.

Selain itu upaya perbaikan harus terus dilakukan agar persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar dapat terus meningkat dikemudian hari. Upaya tersebut yaitu dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi kepada K/L/D/I terkait pengajuan metadata statistik secara masif. Rencana tindak lanjut tahun 2024 adalah dengan melaksanakan rapat koordinasi metadata statistik dengan K/L/D/I sehingga diharapkan pemahaman terkait penyampaian metadata statistik sektoral menjadi lebih optimal.

3 Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini diperkuat oleh penguatan teknologi informasi dan komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (*wants*), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (*needs*). Maka penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah *better, faster, and cheaper* saat ini haruslah menyentuh pada *reliable* and *accountable*. Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

Sasaran 3.1 Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Tujuan ketiga dicapai dengan beberapa arah kebijakan salah satunya adalah arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

a) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I
b) Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik

Untuk mengukur sasaran ketiga ini, digunakan satu indikator yakni "**Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri**". Rincian target, realisasi, dan capaiannya dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 | Capaian Kinerja Sasaran Strategis
"Penguatan statistik sektoral K/L/D/I"

IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(5)
Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	50,00	51,35	102,70
Rata rata Capaian Kinerja			102,70

Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat capaian Badan Pusat Statistik dalam membina kegiatan statistik K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral yang dilaksanakan K/L/D/I secara mandiri. Hasilnya, dari 37 K/L/D/I yang melakukan kegiatan statistik, 19 K/L/D/I atau 51,35 persen di antaranya telah menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri. Realisasi tersebut telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian kinerja sebesar 102,70 persen. Capaian tersebut juga menurun jika dibandingkan dengan realisasi di tahun 2022 sebesar 17,3 poin. Daftar K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri dapat dilihat di lampiran.

BPS berhasil mencapai target yang ditetapkan berkat upaya meningkatkan kolaborasi dengan Penanggung Jawab Kegiatan (*subject matter*) dalam rangka menjalankan fungsi BPS sebagai pembina data statistik yakni dengan melakukan pembinaan statistik sektoral secara intensif, baik dalam pertemuan luring maupun daring dengan K/L/D/I.

Kendala dalam perwujudan IKU ini yakni terbatasnya alokasi anggaran APBN untuk pembinaan statistik sektoral yang memberi ruang gerak terbatas untuk melakukan proses pembinaan menyeluruh di level pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Solusi yang telah dilakukan yakni membangun perencanaan anggaran yang optimal dan kolaborasi antar unit kerja BPS pada proses pembinaan sektoral di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sebagai upaya perbaikan kedepannya BPS akan terus meningkatkan upaya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN diantaranya dengan cara menjalin kolaborasi yang harmonis antara Direktorat Diseminasi Statistik dengan Penanggung Jawab Kegiatan BPS sebagai pembina data statistik dalam melakukan pembinaan statistik sektoral serta membangun perencanaan anggaran yang optimal dan menyeluruh pada proses pembinaan sektoral di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Tujuan ini berkaitan dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan pengembangan sumber daya manusia.

Salah satu target utama dari reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. BPS sebagai lembaga Negara juga harus meningkatkan. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sasaran 4.1 SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan

Agar pelayanan prima dapat diwujudkan maka diperlukan SDM yang berkualitas dan profesional. Oleh sebab itu pembinaan SDM diperlukan agar pegawai semakin meningkat kualitasnya mengingat kualitas SDM merupakan kunci utama yang dapat mengubah berbagai kelemahan menjadi kekuatan serta mengubah tantangan menjadi peluang. Pembinaan SDM merupakan suatu keharusan karena masyarakat menginginkan pemerintahan yang lebih baik kualitasnya dan lebih mampu mengemban fungsi-fungsi pelayanan publik.

Sasaran "**SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan**" diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) IKU yakni **"Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS"** dan "**Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS**". Capaian kinerja sasaran ini sudah sangat baik dengan rata-rata sebesar 100,06 persen. Ga,baran capaian masing-masing dapat dilihat pada **Tabel 6**.

Tabel 6 | Capaian Kinerja Sasaran Strategis "SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan"

IKU	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(5)
Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	WTP	WTP	100,00
Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	98,00	98,12	100,12
Rata rata Capaian Kinerja			100,06

Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan pemeriksaan atas Laporan keuangan tingkat Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) termasuk BPS. Hal ini bertujuan untuk mengukur tingkat akuntabilitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan di Badan Pusat Statistik. Pemeriksaan dilakukan dengan memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan BPS tersebut berdasarkan:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
3. Efektivitas sistem pengendalian intern; dan
4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan laporan keuangan BPS dilakukan secara berjenjang dari tingkat satker (BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota) dan tingkat Instansi. Penyusunan laporan keuangan BPS dilaksanakan setiap periode pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Periode pelaporan yang dimaksud adalah periode semesteran, triwulan, dan tahunan. Selama tahun 2023, BPS telah melaksanakan penyusunan laporan keuangan untuk 3 periode pelaporan, yaitu:

1. Periode pelaporan tahun 2022, menghasilkan LKKL Unaudited dan Audited. Pelaporan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d bulan Mei 2023.
2. Periode pelaporan Semester I tahun 2023 yang menghasilkan LKKL Semester I. Pelaporan ini dilaksanakan pada bulan Juni s.d bulan Agustus 2023.

3. Periode pelaporan Triwulan III tahun 2023 yang menghasilkan LKKL Triwulan III yang pelaksanannya dilakukan dari bulan Juli s.d bulan September 2023.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa BPS mampu mempertahankan hasil penilaian WTP seperti tahun-tahun sebelumnya. Tentunya BPS akan terus berupaya untuk tetap mempertahankan hasil tersebut di tahun-tahun yang akan datang. Dengan capaian tersebut, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai Berikut:

1. Terdapat ketidaksesuaian pencatatan pada satker, sehingga koreksi pencatatan harus dilakukan, untuk mengatasinya dilakukan koordinasi dengan kementerian keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan guna mengusulkan jurnal koreksi audit.
2. Masih ditemukan kesalahan dalam pencatatan dan kurang mempersiapkan dokumen sumber, akibat dari proses penyesuaian dengan sistem aplikasi baru yakni SAKTI dan MonSAKTI. Dalam hal ini BPS melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak internal dan eksternal mengenai koreksi pencatatan dan dokumen sumber.

Untuk terus menjaga kualitas laporan keuangan, BPS juga melakukan pembinaan kepada pengelola keuangan negara tingkat satker di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Maksud dan tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman terkait penyusunan dan pelaporan keuangan bagi pejabat/pegawai yang memiliki tugas penyusun laporan keuangan di tingkat satker dan wilayah;
2. Menjaring berbagai macam permasalahan dan kendala yang dialami oleh pejabat/pegawai penyusun laporan keuangan di tingkat satker dan wilayah selama melaksanakan proses penyusunan laporan keuangan dari pencatatan dan pengumpulan bukti transaksi sampai dengan membuat laporan keuangan;
3. Sebagai sarana untuk menyampaikan dan mensosialisasikan kebijakan terkait penyusunan dan penyampaian laporan keuangan terutama kebijakan dan prosedur akuntansi serta solusi-solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pejabat/pegawai penyusun laporan keuangan di tingkat satker dan wilayah;
4. Memberikan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan penyusunan dan pelaporan keuangan bagi pejabat/pegawai penyusun laporan keuangan di tingkat satker dan wilayah.

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

Salah satu cara untuk mencapai tujuan peningkatan pelayanan prima adalah dengan meningkatkan kapasitas akses data bagi konsumen. Dengan peningkatan kapasitas, diharapkan konsumen memperoleh data yang diperlukan dengan mudah, cepat, dan murah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai. IKU "Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS" digunakan untuk mendapatkan gambaran seberapa banyak pengguna data BPS yang menyatakan puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan di BPS. Sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu komponen penting dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pengguna data.

Ukuran indikator ini bersumber dari Survei Kebutuhan Data (SKD) Tahun 2023. Hasilnya, dari seluruh konsumen data yang mengakses Pelayanan Statistik Terpadu (PST), sebanyak 98,12 persen di antaranya merasa puas terhadap sarana dan prasarana pelayanan yang dimiliki BPS. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan konsumen sesuai dengan target yang diharapkan sebesar 98 persen. Sehingga, capaian kinerja indikator ini adalah 100,12 persen. Keberhasilan ini menjawab upaya BPS dalam mewujudkan wajah baru pelayanan statistik BPS dengan berinovasi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan BPS. Inovasi tersebut antara lain optimalisasi teknologi informasi, perubahan tampilan ruangan yang *fresh* dan menarik, maupun peningkatan fitur layanan dihadirkan pada unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST). Kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini, pada saat proses renovasi ruangan PST seluruh layanan secara *offline* di PST BPS RI ditiadakan. Hal ini secara tidak langsung dapat berpengaruh terhaap tingkat kepuasan pengguna data. Untuk mengatasinya, BPS memaksimalkan penggunaan PST Online agar kebutuhan pengguna data tetap terpenuhi dan memaksimalkan konsolidasi tim pelaksana renovasi PST agar renovasi dapat diselesaikan tepat waktu.

3.2. Realisasi Kinerja BPS Tahun 2020 - 2023

Dalam satu periode perencanaan jangka menengah yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra), Kementerian/Lembaga diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar terwujud sebuah system pemerintahan yang baik (*good* governance). Keberhasilan kinerja selama lima tahun tersebut dievaluasi setiap tahunnya untuk melihat perkembangan kinerja dan memproyeksikan keberhasilan pencapaian target di akhir tahun periode Renstra di tahun 2024. Perbandingan realisasi kinerja BPS tahun 2020-2023 yang dirinci pada setiap IKU dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7 | Perbandingan Realisasi Kinerja BPS
Tahun 2020-2023

Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja			
	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	92,93	92,52	97,39	97,48
1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	90,00	93,96	97,98	97,72
2.1. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	*n/a	*n/a	35,14	54,05
2.2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	*n/a	*n/a	75,68	78,38
3.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	*n/a	*n/a	49,00	51,35
4.1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	88,37	96,37	97,21	98,12

** Data masih menggunakan IKU lama sebelum Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022 sehingga tidak dapat dibandingkan.*

Secara umum, realisasi pada tahun 2023 meningkat pada hampir seluruh indikator kinerja utama. Jika dilihat pola kenaikan realisasi kinerja selalu mengalami kenaikan dari tahun 2020 hingga 2023. Penurunan terjadi hanya pada indikator **"Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)"** sebesar 0,41 persen dari 98,13 persen di tahun 2022 menjadi 97,72 di tahun 2023.

Realisasi IKU **"Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional"** memiliki realiasi yang cukup tinggi di tahun awal periode dengan 92,93 persen. Kemudian di tahun 2021 realisasinya sempat menurun 0,41 persen akibat Covid-19 varian delta yang membawa Indonesia ke puncak pandemi. Hal tersebut menyebabkan kunjungan langsung ke PST BPS dihentikan selama beberapa waktu sehingga mempengaruhi *response rate* SKD sebagai sumber penghitungan indikator ini. Sebagai solusinya, BPS memaksimalkan penggunaan PST daring serta Pencacahan *Online* agar meningkatkan tingkat respon dalam memberikan data. Upaya tersebut nampaknya membuahkan hasil dan didorong pula dengan dibukanya kembali PST secara luring karena penurunan kasus Covid-19 yang signifikan, maka realisasi IKU ini

kembali meningkat dengan signifikan di tahun 2022 ke angka 97,39 persen dan terus meningkat di tahun 2023 sebesar 97,48 persen.

Realisasi IKU **"Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional"** mengalami peningkatan secara terus menerus secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2022 dengan angka 97,98 persen, namun realisasinya menurun di tahun 2023 menjadi 97,72 persen. Pencapaian indikator ini tidak telepas dari kendala terbatasnya kapasitas SDM dan diiringi dengan jadwal pelaksanaan survei/sensus yang padat. Untuk itu BPS telah berupaya mengarah pada integrasi survei yang bertujuan untuk menjadikan BPS yang lebih efektif, efisien dan ekonomis. Sebagai tindak lanjutnya, BPS berupaya meningkatkan kapasitas SDM dengan mengadakan seminar/workshop terkait penulisan. Selain itu, BPS perlu memperluas cakupan data yang dihasilkan sehingga semakin banyak menjangkau kalangan pengguna data dan akhirnya dapat bermanfaat dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional.

Realisasi IKU **"Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS"** mengalami peningkatan secara terus menerus secara signifikan dari tahun 2020 hingga 2023 dengan angka 98,12 persen. Meski demikian pemenuhan IKU ini masih menemui kendala penataan sarana prasarana PST di beberapa satker BPS Daerah dalam kondisi tidak optimal. Untuk mengatasinya, dilakukan solusi peningkatan kenyamanan sarana prasara dengan berupa pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana, peningkatan fasilitas pelayanan PST secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan anggaran yang ada. Lebih lanjut, promosi terkait produk dan kegiatan BPS di media sosial melalui Humas BPS terus digalakkan guna menjangkau pengguna data yang luas.

Terapat 3 IKU yang baru tersedia datanya di tahun 2022 dikarenakan adanya Perubahan IKU BPS disertai Reviu Renstra BPS sehingga perbandingan data hanya tersedia dari tahun 2022. Realisasi IKU **"Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)"** mengalami peningkatan sebesar 18,91 poin dari 35,14 persen di tahun 2022 menjadi 54,05 persen di tahun 2023. Realisasi IKU **"Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)"** mengalami peningkatan sebesar 2,7 poin dari 75,68 persen di tahun 2022 menjadi 78,38 persen di tahun 2023. Realisasi IKU **"Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)"** meningkat sebesar 2,35 poin dari 49 persen di tahun 2022 menjadi 51,35 persen di tahun 2023. Peningkatan pada ketiga IKU tersebut menunjukkan keberhasilan BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I dalam mendorong permintaan rekomendasi kegiatan, penyampaian metada sektoral sesuai standar, hingga K/L/D/I mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri.

3.3. Capaian Kinerja BPS Terhadap Renstra

Dokumen Renstra menyajikan visi, misi, tujuan, dan target sasaran strategis BPS yang di *breakdown* ke dalam periode jangka menengah lima tahunan. Dalam perjalanannya Renstra BPS mengalami perubahan di tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Kepala Nomor 4 Tahun 2022. Kinerja selama lima tahun tersebut dievaluasi setiap tahunnya untuk melihat perkembangan kinerja dan memproyeksikan keberhasilan pencapaian target di akhir tahun

periode Renstra di tahun 2024.. Tabel 8 menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 terhadap target Renstra tahun 2023 dan 2024 sehingga didapatkan capaian kinerja terhadap target tahun 2023 dan 2024. Secara keseluruhan hampir semua IKU BPS dapat mencapai target Renstra 2023. Beberapa IKU bahkan telah melebihi target Renstra.

Tabel 8 | Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja BPS Terhadap Renstra

Indikator Kinerja Utama	Target Renstra 2023	Target Renstra 2024	Realisasi 2023	Capaian thd Renstra 2023 (%)	Capaian thd Renstra 2024 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	100,00	100,00	**97,48**	97,48	97,48
1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	82,00	86,00	**97,72**	119,17	113,63
2.1. Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	40,00	45,00	**54,05**	120,00	120,00
2.2. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	72,00	76,00	**78,38**	108,86	103,13
3.1. Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	42,00	46,00	**51,35**	120,00	111,63
4.1. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	WTP	WTP	**WTP**	100,00	100,00
4.2. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	99,00	99,00	**98,12**	99,11	99,11

Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)

Berdasarkan hasil SKD Tahun 2023, realisasi Indikator **"Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional"** adalah sebesar 97,48 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator sebesar 97,48 persen terhadap target Renstra tahun 2023. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa di tahun 2023 BPS sudah berhasil menyediakan data yang dapat digunakan pemerintah sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Jika mengacu pada realisasi tahun 2023, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 97,48 persen. Hasil positif ini menjadi pemicu semangat BPS untuk lebih baik lagi memenuhi target akhir Renstra tahun 2024 sebesar 100 persen. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

Realisasi Indikator **"Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional"** pada tahun 2023 sebesar 97,72 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator terhadap Renstra tahun 2023 sebesar 119,17 persen. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa BPS mampu menyajikan publikasi dengan kualitas data yang baik untuk disajikan kepada pengguna data khususnya pemerintah dalam melakukan perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional. Jika mengacu pada realisasi tahun 2023, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 113,63 persen. Artinya pada tahun 2023 BPS telah berhasil memenuhi target akhir Renstra 2024 yang telah ditetapkan. Kedepannya BPS akan menentukan target PK sesuai dengan capaian tahun 2023. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)

Realisasi Indikator **"Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)"** pada tahun 2023 sebesar 54,05 persen. Dengan target Renstra 45 persen, diperoleh capaian kinerja indikator terhadap Renstra tahun 2023 sebesar 120 persen. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen dan usaha optimal BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I dan mendorong pengajuan rekomendasi untuk kegiatan statistik. Jika mengacu pada realisasi tahun 2023, capaian indikator ini terhadap

target Renstra 2024 sudah mencapai 120,00 persen. Artinya pada tahun 2023 BPS telah berhasil memenuhi target akhir Renstra 2024 yang telah ditetapkan. Kedepannya BPS akan menentukan target PK sesuai dengan capaian tahun 2023. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)

Realisasi Indikator **"Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)"** pada tahun 2023 sebesar 78,38 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator terhadap Renstra tahun 2023 sebesar 108,86 persen. Angka tersebut mencerminkan keberhasilan BPS dalam melakukan pembinaan kegiatan statistik terhadap K/L/D/I dalam menerapkan standar kegiatan statistik yang akan dilaksanakan. Jika mengacu pada realisasi tahun 2023, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 103,13 persen. Artinya pada tahun 2023 BPS telah berhasil memenuhi target akhir Renstra 2024 yang telah ditetapkan. Kedepannya BPS akan menentukan target PK sesuai dengan capaian tahun 2023. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)

Realisasi Indikator **"Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)** pada tahun 2023 sebesar 51,35 persen. Dengan hasil tersebut, diperoleh capaian kinerja indikator terhadap Renstra tahun 2023 sebesar 120 persen. Dengan kata lain, BPS berhasil mencapai target yang ditetapkan dan berhasil menjalankan fungsi BPS sebagai pembina data statistik yakni dengan melakukan pembinaan statistik sektoral secara intensif, baik dalam pertemuan luring maupun daring dengan K/L/D/I.

Jika mengacu pada realisasi tahun 2023, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 111,63 persen. Artinya pada tahun 2023 BPS telah berhasil memenuhi target akhir Renstra 2024 yang telah ditetapkan. Kedepannya BPS akan menentukan target PK sesuai dengan capaian tahun 2023. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK

Realisasi Indikator **"Opini terhadap Laporan Keuangan BPS oleh BPK"** pada tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu WTP. Capaian tersebut mencerminkan keberhasilan BPS dalam melaksanakan akuntabilitas keuanga. Jika mengacu pada realisasi tahun 2023, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 juga sudah memenuhi target WTP. Tentunya BPS akan terus berupaya untuk tetap mempertahankan hasil tersebut di tahun-tahun yang akan datang. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)

Realisasi Indikator **"Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)"** pada tahun 2023 sebesar 98,12 persen. Sayangnya, realisasi tersebut belum dapat melampaui target Renstra 2023 yang ditetapkan sebesar 99 persen. Sehingga, capaian kinerja indikator ini adalah 99,11 persen. Jika mengacu pada realisasi tahun 2023 tersebut, capaian indikator ini terhadap target Renstra 2024 sudah mencapai 99,11 persen. Dengan capaian tersebut BPS masih mempunyai tugas untuk meningkatan pelayanan PST BPS dengan menindaklanjuti hasil SKD 2023 terkait perbaikan sarana prasarana pelayanan serta meningkatan kualitas penyediaan data BPS agar capaian indikator ini mencpaai target Renstra tahun 2024 sebesar 99 persen. Penjelasan terkait kendala, solusi, serta rencana aksi untuk tahun berikutnya telah dibahas pada subbab sebelumnya.

3.4. Kegiatan Prioritas BPS

Beberapa kegiatan prioritas BPS di tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Salah satu prioritas kegiatan BPS untuk menunjang Reformasi Birokrasi General untuk RB Nasional adalah pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) ke Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Manfaat EPSS adalah:

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
2. Acuan program pembinaan statistik sektoral;
3. Meningkatkan *awareness* pentingnya statistik bagi pemerintah;

4. Meningkatkan kualitas statistik di instansi pemerintah.

Dari sisi dukungan landasan hukum pelaksanaan EPSS sudah diundangkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral. Selain itu, BPS juga menjadi *leading institution* dalam pelaksanaan RB General dan berperan untuk penguatan penyelenggaraan statistik sektoral. Keterlibatan BPS dalam RB General sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

Di dalam Peraturan Badan Pusat Statistik tentang EPSS disebutkan bahwa pelaksanaan EPSS dilaksanakan setiap dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kegiatan uji coba EPSS telah dilaksanakan pada tahun 2022. Pada tahun 2023, BPS telah berhasil melaksanakan kegiatan EPSS dengan capaian 93,91 persen dengan target sebesar 624 lokus K/L/Pemda. Berdasarkan tingkat lokus penilaian, capaian lokus yang mengikuti EPSS 2023 pada tingkat Instansi Pusat sebesar 93,90 persen, tingkat Pemerintah Provinsi sebesar 97,06 persen, dan tingkat Pemerintah Kabupaten Kota sebesar 93,70 persen.

Rata-rata nilai IPS tahun 2023 yaitu sebesar 1,78 atau berada pada kategori kurang. Berdasarkan tingkat lokus penilaian, rata-rata nilai IPS di tingkat K/L yaitu sebesar 2,20 (kategori cukup), tingkat Pemerintah Provinsi sebesar 2,01 (kategori cukup), dan tingkat Kabupaten/Kota sebesar 1,70 (kategori kurang). Berdasarkan capaian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan statistik sektoral di Indonesia masih belum optimal. Dalam hal ini, BPS sebagai pembina data statistik perlu melakukan penguatan statistik sektoral dalam bentuk pembinaan-pembinaan statistik ke K/L/Pemda, memperkuat kolaborasi Satu Data Indonesia dan memperkuat komitmen K/L/Pemda terhadap penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien.

Penyusunan Disagregasi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, yaitu "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", Prioritas Nasional Ke-1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan", dibutuhkan data investasi fisik atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang dirinci menurut jenis aset tetap, lapangan usaha, dan sektor institusi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan kegiatan penyusunan disagregasi PMTB. Pelaksanaan kegiatan penyusunan disagregasi PMTB juga didasari oleh rekomendasi *Data Gaps Initiative* (DGI), target *Sustainable Development Goals* (SDGs), kebutuhan Perencanaan dan pengambilan kebijakan, dan kebutuhan statistik neraca nasional.

Kegiatan Penyusunan Disagregasi PMTB 2023 bertujuan untuk memperoleh gambaran PMTB di Indonesia menurut jenis aset tetap dan meningkatkan kualitas data neraca nasional lain yang terkait dengan investasi. Tersedianya data PMTB yang rinci akan membantu

pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan iklim investasi dan mempermudah investor dalam berusaha, serta membantu dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan usahanya. Kegiatan penyusunan disagregasi PMTB dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari kegiatan perencanaan pada tahun 2022; kegiatan persiapan, pengumpulan data, pengolahan, analisis dan rekonsiliasi pada tahun 2023; dan kegiatan analisis dan rekonsiliasi lanjutan, diseminasi, dan penyusunan stok kapital pada tahun 2024. Output dari kegiatan tahun 2023 adalah Laporan Hasil Survei Penyusunan Disagregasi PMTB 2023 dan nilai disagregasi PMTB menurut jenis aset tetap dengan status angka sangat sementara.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan disagregasi PMTB 2023 adalah jumlah sampel yang relatif sedikit dan metode pemilihan sampel yang dilakukan secara *purposive* menyebabkan data yang diperoleh hanya berupa indikator untuk estimasi parameter PMTB. Selain itu, proses rekonsiliasi angka disagregasi PMTB belum optimal karena kegiatan rekonsiliasi final dilakukan secara *online*. Hal tersebut memperlambat proses rekonsiliasi sampai akhir tahun.

Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional

Industri pariwisata telah menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan merupakan sektor jasa dengan tingkat pertumbuhan paling pesat di dunia saat ini. Peningkatan jumlah destinasi dan investasi dalam pembangunan pariwisata telah mengubah pariwisata sebagai penggerak utama kemajuan sosio ekonomi suatu negara melalui penerimaan devisa, penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, serta pembangunan infrastruktur.

Maksud dan tujuan pelaksanaan penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional adalah untuk mendukung tersedianya data statistik berkualitas khususnya di sektor pariwisata. Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA) dilaksanakan dalam rangka peningkatan dan pemenuhan data industri pariwisata sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. TSA sendiri berbentuk *full set* neraca yang menjelaskan berbagai data dan indikator pariwisata yang terkait satu sama lain. Melalui neraca-neraca TSA tersebut dapat dihitung nilai kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional yang menggambarkan kinerja sektor tersebut dalam ekonomi Indonesia serta sumber-sumber pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia. Selain itu, neraca-neraca TSA juga menjelaskan data *supply* dan *demand* pariwisata yang konsisten antar-neracanya, sebagaimana direkomendasikan oleh manual internasional.

Tahapan kegiatan ini mencakup penentuan klasifikasi dan cakupan industri serta produk pariwisata yang sesuai dengan rekomendasi internasional. Selanjutnya adalah pengumpulan data dasar, seperti pengeluaran wisatawan dan *output* industri pariwisata. Tahapan ini juga mencakup pengumpulan fenomena kualitatif yang dilakukan melalui *indepth study* guna mendapatkan penjelasan pada setiap perkembangan data yang didapatkan sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah kompilasi dan penyusunan naraca-neraca TSA,

hingga akhirnya penyusunan tabel-tabel sesuai rekomendasi internasional. Tahapan terakhir adalah penyusunan laporan yang menjelaskan seluruh runtutan tahapan-tahapan tersebut. *Output* dari kegiatan ini berupa Laporan Penyusunan *Tourism Satellite Account* (TSA) Indonesia. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan data dan fenomena khususnya terkait kegiatan pariwisata domestik. Kerangka kerja utama, yakni *Supply and Use Table* (SUT) juga belum tersedia secara series.

Berbagai hal tersebut mengakibatkan proses rekonsiliasi *supply* dan *demand* pariwisata tidak berjalan efisien serta menghambat penyusunan estimasi kontribusi pariwisata. Diskusi penyelarasan data *supply* dan *demand* pariwisata perlu dilakukan lebih intens sehingga didapatkan kondisi *supply* dan *demand* pariwisata yang selaras. Komunikasi dengan penyedia data, khususnya data pengeluaran wisatawan juga perlu dilakukan lebih intens sehingga penyusunan estimasi kontribusi pariwisata dapat berjalan lebih efektif. Kendala lainnya yang turut berdampak dalam proses penyusunan TSA Indonesia adalah adanya kegiatan-kegiatan tambahan (*adhoc*) yang berlangsung di akhir tahun, diantaranya adalah penyelenggaraan pendataan regsosek di awal tahun 2023 serta kegiatan pendataan lengkap UMKM (PL-UMKM) sepanjang semester II-2023 yang melibatkan BPS daerah. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan *indepth study* TSA terganggu sehingga pengumpulan data dan fenomena pendukung, khususnya terkait *input* data dalam estimasi *supply* pariwisata turut terganggu.

Pengembangan Statistik Hayati

Maksud dan tujuan dari pengembangan Sistem Statistik Hayati adalah untuk perbaikan mekanisme bagi pakai data dan penyempurnaan mekanisme pemutakhiran data individu. Adapun tujuan khusus pada tahun 2023 adalah untuk menguji platform SSHI yang dapat mengakses NIK ke SIAK (melalui web service dan web portal) untuk dapat dipakai dalam pendataan BPS dan melakukan simulasi penghitungan statistik hayati dari berbagai sumber data untuk menghitung statistik hayati dari data registrasi.

BPS telah mengadakan uji coba Sistem Statistik Hayati Indonesia (SSHI) di tahun 2021 dan 2022. Uji coba SSHI dilanjutkan pada 2023. Berbeda dengan tahun sebelumnya, uji coba SSHI pada tahun 2023 dilakukan dengan tujuan mengujicobakan aplikasi pendataan/ platform SSHI. Selain uji coba platform pendataan, rangkaian tahapan kegiatan lainnya yang dilakukan di tahun 2023 antara lain penyusunan perjanjian kerjasama BPS-Dukcapil yang merupakan salah satu payung hukum untuk menghasilkan statistik hayati. Secara paralel tim SSHI juga membangun *Dashboard* SSHI yang memiliki fungsi sebagai aplikasi simulasi penghitungan statistik hayati dan analisis singkat dari indikator yang menggambarkan peristiwa penting yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan (mobilitas) yang dilengkapi dengan adanya informasi mengenai struktur penduduk, cakupan data administrasi di Indonesia, dan indikator-indikator capaian SDGs. Pada tahun 2023 tepatnya tanggal 30 Oktober - 2 November 2023 juga sudah terselenggara Rapat Koordinasi

BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) seluruh Indonesia dihadiri perwakilan pusat maupun daerah secara tatap muka. Rakor ini diselenggarakan sebagai upaya menjawab isu dan rekomendasi, seperti perluasan proses bisnis, pembagian data, standar data, dan integrasi data sebagai sumber statistik hayati yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Tahapan kegiatan lainnya yang dilakukan untuk pengembangan statistik hayati adalah kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya peningkatan keterampilan dan pengetahuan para petugas yang terlibat dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.

Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 134 tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk melakukan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di seluruh wilayah kabupaten/kota dan hasil pendataan disampaikan kepada Bappenas. Tujuan Pendataan Awal Regsosek adalah untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.

Pelaksanaan kegiatan Pendataan Awal Regsosek dibagi menjadi dua tahun anggaran, yaitu tahun 2022 dan 2023. Kegiatan di tahun 2022 menitikberatkan pada koordinasi dan konsolidasi, penyiapan basis data, serta pengumpulan data, sementara di tahun 2023 menitikberatkan pada kegiatan pengolahan data Regsosek, Forum Konsultasi Publik (FKP), dan diseminasi data.

Pengumpulan data Regsosek telah dilakukan pada periode 15 Oktober 2022 s.d. 14 November 2022 secara *door-to-door* menggunakan *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI). Hasil pengumpulan data tersebut selanjutnya diverifikasi oleh ketua/pengurus Satuan Lingkungan Setempat (SLS) melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tanggal 2-21 Mei 2023. FKP merupakan kegiatan konsultasi dengan tokoh komunitas di wilayah setempat mengenai ketepatan hasil pengelompokan kesejahteraan keluarga berdasarkan hasil pendataan lapangan di tahun 2022. Cakupan kegiatan FKP dilaksanakan hampir di seluruh wilayah Indonesia yang mayoritasnya dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan.

Penyerahan basis data Regsosek dari BPS ke Kementerian PPN/Bappenas telah dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2023 dan ditandai dengan penandatangan BAST Nomor. B-1482-2/03200/PL.714/08/2023 dan Nomor.6363/BAST/06.04/2023 tentang Data Hasil Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi oleh Sekretaris Utama BPS dan Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Selanjutnya, untuk kepemilikan, kewenangan, dan pengelolaan data hasil Pendataan Awal Regsosek, termasuk melakukan pemindahan, penghapusan, pengaksesan, dan pemberian akses kepada pihak lain menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pendataan Awal Regsosek diantaranya adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai *prelist* dalam pengumpulan data belum berhasil diperoleh, terdapat penduduk ataupun kelompok masyarakat yang menolak untuk di data ataupun tidak mau memberikan informasi dengan lengkap, dan terdapat tiga kabupaten di Provinsi Papua yang tidak dilakukan FKP karena alasan keamanan yaitu Kabupaten Nduga, Dogiyai dan Intan Jaya.

Untuk mengatasi kendala tersebut, BPS menggunakan *prelist* yang bersumber dari Sensus Penduduk Tahun 2020. Selain itu, BPS juga berupaya mendapatkan data pendukung dari beberapa K/L lain seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertanian, PT PLN (Persero), dan *Project Management Office* (PMO) Kartu Prakerja. PermasajaTim dari BPS Kabupaten/Kota bekerja sama membantu petugas berkoordinasi dengan aparat setempat untuk melakukan pendataan. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan tujuan kegiatan Pendataan Awal Regsosek kepada responden.

Statistik Wisatawan Nusantara

Survei Wisatawan Nusantara bertujuan untuk mendapatkan data mengenai jumlah perjalanan, lama tinggal, jumlah pengeluaran, demografi, jenis akomodasi dan moda angkutan. Sejak tahun 2020, metode survei ini tidak lagi dengan survei konvensional, melainkan memanfaatkan *mobile positioning data* (MPD) dan survei digital yang terbukti mampu menangkap perjalanan wisatawan nusantara lebih akurat. Dengan memanfaatkan MPD, penghitungan jumlah perjalanan dan lama tinggal wisatawan nusantara (wisnus) bisa diperoleh data menurut kabupaten/kota asal, kabupaten/kota tujuan, dan bulanan seluruh Indonesia.

Hasil profiling pelaku wisnus dari data MPD tersebut dipilih sampel untuk mendapatkan profil wisnus dan data pengeluaran selama berwisata melalui survei digital. Link kuesioner dikirimkan melalui sms ke responden terpilih, selanjutnya responden mengisi kuesioner secara online melalui link tersebut. Tahapan kegiatan ini mencakup proses pengadaan koneksi mediasi data wisatawan nusantara berdasarkan data *mobile network* operator, pengolahan data MPD dan pelaksanaan survei digital. Selanjutnya penghitungan bobot dari data Susenas untuk memperoleh estimasi jumlah perjalanan wisnus, lama tinggal, dan pengeluaran. Pada pelaksanaan tahun 2023, dilakukan rekonsiliasi dan sosialisasi data wisatawan nusantara tahun 2023 yang dapat disajikan secara bulanan.

Statistik *E-Commerce*

Pendataan *e-commerce* berbasis perusahaan dilaksanakan untuk memperoleh gambaran perkembangan usaha *e-commerce* di Indonesia dari sudut pandang pelaku usaha/pengguna jasa *e-commerce*. Pendataan *e-commerce* akan diarahkan pada Metode *Go Digital*, dengan berbasis *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI). Pola pendataan *e-commerce* diharapkan dapat menjadi *benchmark* untuk penerapan Survei *E-Commerce* berikutnya, dimana akan diperoleh gambaran seberapa tinggi *benefit* dan *impact* yang akan diperoleh dengan penerapan pendataan Metode *Go Digital*.

Maksud dan tujuan kegiatan ini yaitu untuk melakukan pemutakhiran kerangka sampel usaha/perusahaan *E-Commerce* di wilayah yang terpilih sampel; menyediakan indikator pokok yang terkait dengan *e-commerce* (jumlah usaha, jenis barang dan jasa yang dijual, nilai transaksi, metoda pembayaran, serta cara pengiriman) yang merujuk pada konsep standar internasional; mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB), dengan menyajikan nilai transaksi *e-commerce*.

Tahapan kegiatan ini mencakup persiapan, yang meliputi rapat serta *workshop* intama dan pelatihan innas untuk mempersiapkan instrumen survei (kuesioner dan buku pedoman) serta pelatihan petugas lapangan di daerah; pelaksanaan, yang meliputi pendaftaran usaha/perusahaan (*listing*) di lapangan, pemilihan sampel, dan melakukan wawancara pada usaha/perusahaan yang terpilih menjadi sampel; pengolahan data, yang meliputi *micro editing*, penghitungan penimbang untuk estimasi di level provinsi dan tabulasi data; diseminasi yang meliputi penyusunan, pencetakan, dan diseminasi publikasi. Kendala yang dihadapi adalah pada instrumen pencacahan CAPI FASIH memerlukan penyesuaian di lapangan terutama karena loading yang agak lama saat isian KBLI 5 digit yang tahun lalu hanya 2 digit.

Passenger Exit Survey (PES)

Maksud dan tujuan kegiatan *Passenger Exit Survey* yaitu untuk memperoleh data pengeluaran wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia dan mendapatkan profil dan rute perjalanan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Indonesia. Tahapan kegiatan ini mencakup tahap persiapan meliputi rapat perencanaan survei dan pembahasan mengenai pelatihan petugas PES dan penyusunan instrumen survei. Pelatihan petugas PES dilakukan secara daring serentak untuk semua petugas pendataan lapangan dan pemeriksaan lapangan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan mendata di pintu keberangkatan internasional oleh petugas pendataan lapangan. Pendataan menggunakan metode CAPI sehingga entri data dilakukan langsung oleh petugas pendataan lapangan. Hasil pendataan ini kemudian diperiksa isian dan kelengkapannya oleh pemeriksa. Data yang telah diperiksa dan disetujui kemudian diperiksa kembali oleh tim PES BPS Pusat dengan dilakukan *micro*

editing. Pengolahan selanjutnya adalah penghitungan estimasi dengan menggunakan pembobotan. Tahap terakhir adalah analisis dan diseminasi statistik dengan menyusun publikasi Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara.

Output dari PES berupa Statistik Pengeluaran Wisatawan Mancanegara 2023, dan Statistik Travel 2023 yang digunakan diantaranya untuk memenuhi keperluan kebijakan kepariwisataan yang diarahkan agar kegiatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain. Sebagaimana sasaran pembangunan pariwisata 2015-2019 yang dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Selain itu, digunakan juga untuk pengukuran *Sustainable Tourism* yang menjadi program PBB dalam kerangka SDGs.

Kendala yang dihadapi adalah proses perijinan PASS bandara yang terutama di Bandara Internasional Soekarno Hatta memakan waktu lama karena pengajuan PASS bandara dengan akun BPS secara institusional awalnya ditolak oleh pihak Otoritas Bandara disebabkan BPS bukan lembaga yang mendapatkan ijin khusus. Bandara Internasional tidak hanya mengacu pada peraturan Indonesia saja tetapi juga terdapat aturan internasional ICAO. Untuk mengatasi kendala pengurusan PASS Bandara untuk jangka pendek: perlu melaksanakan *Letter of Agreement* (LoA) dengan Kantor Otoritas Bandara, sedangkan untuk jangka panjang perlu mengupayakan payung hukum untuk memfasilitasi kegiatan *Passenger Exit Survey* (PES). Kendala lainnya adalah petugas melakukan pendataan pada malam hari, karena jadwal penerbangan banyak pada malam hari.

Sensus Pertanian 2023

Pencacahan lengkap ST2023 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan unit observasi terdiri dari Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Usaha Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Tujuan ST2023 yaitu menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolok ukur statistik pertanian, menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan. Pada kegiatan ST2023, satuan wilayah kerja petugas UTP ditentukan dalam Satuan Lingkungan Setempat (SLS). SLS yang digunakan adalah SLS hasil Sensus Penduduk 2020, yaitu SLS yang ada muatan keluarga hasil SP2020, termasuk juga wilayah non-SLS yang sudah bermuatan.

Wilayah pendataan UTP terbagi menggunakan moda CAPI (*Computer Assisted Personal Interviewing*) dan PAPI (*Paper Assisted Personal Interviewing*). Moda CAPI digunakan di 39 kabupaten/kota yang meliputi seluruh ibukota provinsi kecuali Kabupaten Bulungan (Provinsi Kalimantan Utara) yang digantikan oleh Kota Tarakan dan Kabupaten Manokwari (Provinsi Papua Barat) yang digantikan oleh Kota Sorong serta seluruh wilayah Kabupaten/Kota di DKI Jakarta. Wilayah lainnya sebanyak 475 kabupaten/kota menggunakan moda PAPI.

Tahapan pelaksanaan lapangan yang dilaksanakan di tahun 2023 yaitu rekrutmen dan pelatihan petugas, pencacahan lapangan lengkap, pelaksanaan *Post Enumeration Survey,* dan diseminasi Hasil ST 2023 Tahap 1. Kegiatan pelaksanaan pencacahan lengkap ST2023 dilaksanakan selama 2 bulan mulai 1 Juni s.d. 31 Juli 2023, yang meliputi pengumpulan data UTP, UPB, dan UTL. Pengumpulan data pada pelaksanaan pencacahan lengkap UTP menerapkan 2 mekanisme metode wawancara yaitu *door to door* dan *snowball*. Metode *door to door* merupakan mekanisme pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi seluruh unit observasi dalam setiap *enumeration area*, yang dalam ST2023 disebut sebagai wilkerstat. *Snowball* merupakan mekanisme pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi hanya unit observasi yang teridentifikasi sebagai unit observasi *eligible*.

Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PL-KUMKM)

Pada tahun 2023, Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melaksanakan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023 sebagai upaya terciptanya basis data tunggal Koperasi dan UMKM. Bentuk kerjasama yang dipilih adalah Swakelola Tipe 2 dimana Kementerian KUMKM sebagai pihak pertama yang bertugas dalam perencanaan dan pengawasan, dan BPS sebagai pihak kedua yang bertugas sebagai pelaksana. Sesuai Kesepakatan Kerja sama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dan Badan Pusat Statistik Tentang Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 2023 Nomor: 1/PKS/SM/VII/2023 dan Nomor: 23.01.22/HK.610/PKS/07/2023, PL-KUMKM 2023 dilaksanakan di 33 (tiga puluh tiga) satuan kerja (satker) BPS.

Langkah awal yang dilakukan pada kegiatan PL-KUMKM 2023 adalah pendaftaran bangunan dan UMKM yang berada di dalam bangunan tersebut. Jika keberadaan suatu unit usaha telah diidentifikasi, maka kegiatan ini akan dilanjutkan dengan melakukan pendataan karakteristik usaha dan informasi lainnya. Keberadaan suatu unit usaha/perusahaan akan diidentifikasi oleh petugas lapangan dengan cara mengunjungi setiap bangunan yang berada di Satuan Lingkungan Setempat (SLS). Sedangkan pendataan karakteristik usaha dan informasi lainnya dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan pemilik/pengelola unit usaha dari unit usaha/perusahaan di bangunan tersebut (*door to door*). Keberhasilan kegiatan PL-KUMKM 2023 ini sangat ditentukan oleh kemampuan petugas lapangan dalam mengidentifikasi keberadaan suatu unit usaha dan menggali keterangan atau informasi lainnya dari para responden di lapangan.

PL-KUMKM yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dimaksudkan untuk memperoleh data koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian yang mencakup: pelaku usaha; unit usaha/perusahaan menurut wilayah maupun lapangan usaha; penggunaan tenaga kerja; pasokan dan pasar; struktur pendapatan dan pengeluaran dari kegiatan usaha/perusahaan; permodalan; dan pemanfaatan digitalisasi pada Koperasi dan UKM.

Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area

Dalam rangka memperbaiki akurasi dan aktualitas data, suatu sistem estimasi produksi padi yang lebih akurat, cepat dan obyektif sangat diperlukan. Dengan kemajuan teknologi *Geographic Information System* (GIS) dan penginderaan jauh, teknologi spasial diwujudkan dalam suatu sistem Kerangka Sampel Area (KSA) dan sistem komunikasi data dari lapangan ke pusat yang dibangun dengan memanfaatkan aplikasi berbasis Android. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki akurasi dan aktualitas data estimasi luas panen padi sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, cepat, dan obyektif. Di samping itu, kegiatan ini juga ditujukan untuk menghasilkan data potensi luas panen selama tiga bulan ke depan sebagai *early warning system*.

Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan lapangan yang dilakukan oleh petugas pada 7 (tujuh) hari terakhir setiap bulan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pada 5 (lima) hari pertama pada bulan selanjutnya. Data yang dihasilkan dari Survei KSA yaitu data luas tanaman padi menurut fase tumbuh tanaman (terutama luas panen padi untuk menghitung produksi padi). Hasil pendataan KSA dapat menyajikan data luas panen dan luas potensi panen pada 3 (tiga) bulan ke depan. Selain itu data hasil KSA disampaikan secara rutin kepada *stakeholders* terkait, diantaranya Kementerian Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perekonomian, Badan Urusan Logistik (Bulog), Badan Pangan Nasional (BAPANAS), dan Badan Intelijen Negara, serta beberapa direktorat di BPS. Adapun output dari kegiatan ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan KSA Padi dan KSA Jagung, BRS Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia (angka sementara dan angka tetap), publikasi Luas Panen dan Produksi Padi, dan publikasi Ringkasan Eksekutif Luas Panen dan Produksi Padi.

Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan

Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan dilakukan untuk menyediakan data produksi tanaman pangan dan data pendukung lain terkait luas lahan menurut penggunaan terutama lahan sawah, banyaknya mesin pertanian, serta data perbenihan. Data produktivitas diperoleh melalui Survei Ubinan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan area hasil pendataan KSA untuk padi dan pendekatan rumah tangga untuk palawija, dengan berdasarkan pengukuran langsung di lapangan. Sementara itu, data luas lahan menurut penggunaan, banyaknya alat atau mesin pertanian, informasi penggunaan pupuk dan benih diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data Statistik Pertanian (SP) yang dilakukan secara lengkap di seluruh wilayah kecamatan di Indonesia berdasarkan laporan Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD).

Tahapan kegiatan ini mencakup tahapan pemutakhiran (*updating*) rumah tangga untuk palawija dan tahapan pencacahan sampel rumah tangga padi dan palawija terpilih. Pemutakhiran rumah tangga bertujuan untuk memperoleh daftar nama dan alamat rumah tangga yang lengkap dan mutakhir sekaligus mendapatkan informasi budidaya tanaman palawija yang akan digunakan sebagai kerangka sampel rumah tangga palawija. Pemutakhiran rumah tangga menggunakan daftar SUB-P dilakukan dengan mengunjungi data awal nama dan alamat rumah tangga yang tercetak hasil sensus/survei terakhir yang dilakukan di blok sensus tersebut. Pencacahan rumah tangga bertujuan untuk memperoleh data hasil ubinan dan keterangan lainnya pada petak terpilih. Rumah tangga yang tercantum pada Daftar SUB-DS untuk palawija dan SUB-KSA DS untuk padi dikunjungi untuk dilakukan wawancara secara langsung kepada petani atau anggota rumah tangga yang mengetahui tentang budidaya tanaman pangan. Pengukuran berat hasil panen dilakukan pada plot ubinan terpilih dan dicatat pada daftar SUB-S. *Output* dari survei ini berupa publikasi Analisis Produktivitas Padi, Analisis Produktivitas Jagung dan Kedelai, Luas Lahan menurut Penggunaan, Publikasi Produksi Padi, dan Publikasi Produksi Palawija.

3.5. Prestasi BPS

Berbagai prestasi berhasil diukir atas kinerja BPS selama tahun 2023. Apresiasi tersebut diberikan oleh berbagai kementrian dan lembaga atas kinerja BPS yang dianggap baik. Beberapa penghargaan tersebut antara lain:

1. BPS menjadi Badan Publik dengan Kualifikasi "Informatif" yang merupakan kualifikasi tertinggi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik;
2. Sebanyak 4 Satuan Kerja (satker) Badan Pusat Statistik (BPS) meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2023 yaitu BPS Provinsi Kalimantan Utara, BPS Kabupaten Bengkulu Utara, BPS Kabupaten Semarang, dan BPS Kabupaten Kendal;
3. BPS dinobatkan sebagai K/L Terbaik dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023;
4. BPS memperoleh opini kualitas tinggi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 yang diselenggarakan Ombudsman RI;
5. Dalam bidang pengelolaan SDM, BPS memperoleh Kategori Patuh berdasarkan reviu Komisi ASN terhadap Pelaksanaan Nilai Dasar Kode Etik dan Kode Perilaku (NKK) ASN;
6. BPS juga meraih Peringkat 3 Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN dan Pemanfaatan Sistem Informasi. Prestasi ini menunjukkan keberhasilan BPS dalam melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraannya;
7. BPS meraih Digital Government Award untuk Kategori Pencapaian Indeks SPBE;
8. BPS meraih Terbaik ke-2 Kategori Kampanye Komunikasi Publik dan Terbaik ke-3 Kategori Media Sosial untuk K/L;

9. Untuk keenam kalinya secara berturut-turut, Badan Pusat Statistik (BPS) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
10. Badan Pusat Statistik (BPS) mendapatkan penghargaan Kinerja Anggaran Terbaik 2022 kelima untuk Kategori Kementerian Negara/Lembaga dengan Pagu Sedang;
11. BPS menerima pengakuan Kelayakan Pusat Penilaian Kompetensi BPS dengan kategori B dari BKN;
12. Penghargaan untuk BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah dan KPPN;

serta penghargaan lainnya terlampir.

3.6. Inovasi BPS

Berbagai inovasi juga telah dilakukan oleh BPS dalam rangka mendukung tercapainya kinerja selama tahun 2023 antara lain:

1. Implementasi SIPECUT (Sistem Informasi Pengajuan Cuti)

   SIPECUT adalah Sistem Informasi Pengajuan Cuti yang dibuat untuk pengelolaan pengajuan cuti pegawai BPS. Aplikasi SIPECUT menjadikan proses pengajuan cuti pegawai menjadi lebih mudah, cepat, dan terotomatisasi.

2. Pengembangan Aplikasi KipApp

   KiPApp merupakan aplikasi berbasis web untuk mendukung penyelenggaraan Pengelolaan Kinerja ASN di lingkungan Badan Pusat Statistik. Aplikasi KiPApp membantu dalam perencanaan kinerja agar selaras dengan tujuan dan sasaran instansi serta memberikan informasi kinerja dari level unit kerja sampai dengan level pegawai di lingkungan BPS.

3. Pengembangan Settama Menjawab

   Settama Menjawab merupakan aplikasi *helpdesk* penyelesaian masalah seputar Kesestamaan. Fitur utama yang tersedia dalam aplikasi Settama Menjawab adalah *knowledge sharing* dan permintaan/konsultasi seputar Kesestamaan.

4. Hub Data Regsosek

   Hub Data Regsosek adalah sistem yang dibuat dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi dan pemanfaatan data Regsosek bagi instansi pemerintah dan masyarakat. Hub Data Regsosek memberikan *insight* kebijakan terkait penghapusan kemiskinan dan juga memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional

   serta inovasi-inovasi lainnya terlampir.

3.7. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Pada awal tahun anggaran 2023, BPS menerima anggaran sebesar Rp 8.018,90 milyar sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP-DIPA-054.01-0/2023 tanggal 30 November 2022. Sepanjang tahun 2023, terdapat penyesuaian pagu anggaran dikarenakan adanya penyesuaian kegiatan di BPS. Pagu BPS kondisi 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 7.737,05 milyar. Informasi perubahan pagu anggaran BPS dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9 | Pagu Anggaran BPS Menurut Bulan TA 2023 (Milyar)

Bulan	Pagu	Keterangan
(1)	(2)	(3)
Januari s.d Juni	8.018,90	-
Juli	7.861,76	1. Penyesuaian/pemotongan anggaran belanja pegawai yang berasal dari blokir Automatic Adjustment (AA) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) 2. Penambahan PNBP satker BPS Kab.Badung dikarenakan adanya kerjasama dengan Pemda Kab.Badung untuk Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan dan penambahan PNBP Fungsional pada satker Pusdiklat BPS
Agustus s.d September	8.159,57	1. Penambahan PNBP satker Sekretariat Utama dan 32 satker BPS Provinsi dikarenakan kegiatan PL-KUMKM 2. Penambahan PNBP satker Sekretariat Utama dikarenakan adanya klaim asuransi BMN, penambahan PNBP Fungsional di satker Polstat STIS dan Pusdiklat BPS
Oktober	7.734,45	Pengurangan alokasi anggaran yang berasal dari Automatic Adjustment (AA) ke BA BUN
November	7.734,42	Pengurangan anggaran pada program Dukungan Manajemen
Desember	7.737,05	1. Penambahan hibah langsung yang berasal dari UNFPA dan UNICEF 2. Penambahan anggaran pada Program Dukungan Manajemen

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023, BPS menggunakan anggaran setelah sebesar Rp 7.737,05 milyar. Jika dibandingkan dengan pagu yang diterima, total realisasi anggaran BPS sampai dengan akhir periode 2023 mencapai 7.504,61 milyar atau sebesar 97,00 persen. Angka tersebut sedikit menurun dibandingkan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar 97,08 persen.

Sumbangan terbesar terhadap realisasi anggaran BPS berasal dari Program PPIS dengan realisasi sebesar Rp 4.391,03 milyar, kontribusinya terhadap total realisasi anggaran BPS sebesar 58,51 persen. Kontribusi lainnya berasal dari Program Dukungan Manajemen dengan realisasi sebesar Rp 3.113,57 milyar, kontribusinya mencapai 41,49 persen. Informasi lebih lengkap tentang realisasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 | Pagu dan Realisasi Anggaran BPS Menurut Program TA 2023 (Milyar)

Program	Pagu	Realisasi	Realisasi/Pagu (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Dukman	3.190,54	3.113,57	40,24
06 PPIS	4.546,51	4.391,03	56,76
Total	7.737,05	7.504,60	97,00

Untuk melihat efisiensi penggunaan sumber daya dari sisi anggaran pada level Kegiatan dapat dicermati pada Tabel 11. Perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi anggaran tahun 2023 menunjukkan bahwa seluruh kegiatan yang ada di BPS memiliki capaian kinerja yang melampaui realisasi anggarannya. Hal ini menunjukkan upaya BPS dalam penggunaan anggaran yang efisien namun tetap berorientasi pada pencapaian target. Kegiatan dengan selisih paling jauh antara capaian kinerja dengan realisasi anggarannya adalah kegiatan Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum. Rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan tersebut diakibatkan adanya anggaran untuk kegiatan Revisi Undang-Undang Statistik yang melibatkan pihak eksternal BPS yang dalam realisasi pelaksanaan tidak berjalan sesuai dengan rencana sehingga anggaran tidak bisa terserap maksimal. Meskipun demikian, capaian kinerja pada kegiatan ini tetap berhasil dicapai 100 persen sesuai target kinerja yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja.

Tabel 11 | Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran BPS Tahun 2023 Menurut Kegiatan

Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Capaian Kinerja(%)	Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	99,80	86,40
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	100,00	53,47
2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	110,06	92,62
2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	101,34	95,67
2885	Dukungan Manajemen BPS Lainnya	100,35	92,09
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	108,33	98,35
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	110,52	99,57
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	111,93	97,04
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	99,10	88,75
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	100,00	94,00
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	103,01	91,74
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	100,00	93,04
2901	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	100,02	94,41
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	100,75	97,38
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	105,07	85,63
2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	100,83	93,05
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	108,00	92,74
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	106,33	95,41
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	108,00	95,59
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	108,59	97,03
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	102,22	94,92
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100,00	90,81
4203	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	104,63	97,45
4204	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	106,21	98,85
4205	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	107,77	99,33

Tabel 12 | Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Setahun dengan Realisasi Anggaran Menurut Sasaran TA 2023

	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Anggaran (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	Realisasi Anggaran (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	98,60	4.207,10	4.072,17	96,79
02	Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	111,57	336,15	316,20	94,06
03	Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	102,70	3,26	2,66	81,67
04	SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	100,06	3.190,54	3.113,57	97,59

Tabel 12 menunjukkan hampir seluruh sasaran berhasil memenuhi target yang ditetapkan kecuali Sasaran 1. Meskipun Sasaran 1 belum tepat memiliki capaian yang maksimal namun capaian kinerjanya sudah tinggi sebesar 98,60 persen. Realisasi anggaran per sasaran menunjukkan realisasi yang cukup tinggi untuk seluruh sasaran kecuali pada Sasaran 3 yang hanya sebesar 81,67 persen. Angka realisasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh anggaran pembinaan statistik sektoral yang tidak terserap maksimal karena pada pelaksanaannya, pembinaan sektoral seringkali dilaksanakan dalam skala besar untuk mengefisiensikan anggaran serta adanya permintaan pembinaan oleh K/L sehingga tidak menggunakan anggaran dari BPS. Perbandingan capaian kinerja dengan realisasi anggaran menurut sasaran menunjukkan pola yang selaras dimana besar realisasi anggaran hampir selalu diiringi dengan capaian kinerja sasaran yang besar pula. Hal ini menunjukkan upaya BPS dalam penggunaan anggaran yang efisien namun tetap berorientasi pada pencapaian target.

Gambar 5 | Nilai Efisiensi Anggaran BPS Tahun 2020 - 2023

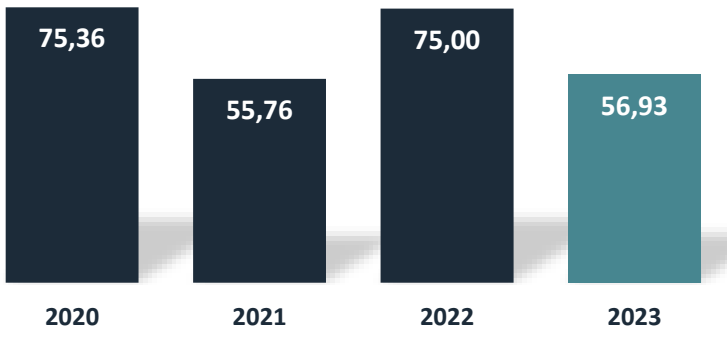

Sesuai dengan rumus perhitungan nilai efisiensi anggaran yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, didapatkan nilai efisiensi anggaran BPS. Gambar 5 menunjukkan pergerakan nilai efisiensi yang fluktuatif dimana nilai efisiensi anggaran sempat meningkat di tahun 2022 namun menurun kembali di tahun 2023. Penurunan ini terjadi seiring dengan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada penyerapan anggaran BPS di tahun 2023 dan adanya penurunan capaian kinerja BPS secara total.

Rumus penghitungan nilai efisiensi adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((AAi \times Ci) - RAi)}{\sum_{i=1}^{n} AAi} \times 100\%$$

$$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$$

Keterangan

E : efisiensi
AA : alokasi anggaran per Sasaran
RA : realisasi anggaran per Sasaran
C : capaian kinerja per Sasaran
NE : nilai efisiensi

Penutup 4

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Sebagai wujud nyata peningkatan kualitas data statistik, BPS terus berupaya meningkatkan capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis. Kinerja BPS pada tahun 2023 dapat dikatakan memuaskan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 103,31. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti jumlah SDM dan sarana prasarana yang terbatas, kurangnya kepatuhan K/L/D/I terhadap rekomendasi dan metadata, transisi penggunaan aplikasi SAKTI dalam perencanaan dan penganggaran, dan alokasi anggaran yang terbatas. Namun atas arahan dan evaluasi pimpinan secara komprehensif, kendala-kendala tersebut tidak menghambat pencapaian kinerja BPS secara signifikan.

Jika dilihat dari sisi tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai BPS, capaian kinerjanya juga sudah sesuai dengan yang diharapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan pertama yaitu **menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan**, memiliki satu sasaran strategis **meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas**. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 98,60 persen.
2. Tujuan kedua yaitu **meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN**, memiliki satu sasaran strategis **penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN**. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 111,57 persen.
3. Tujuan ketiga yaitu **meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN**, memiliki satu sasaran strategis **penguatan statistik sektoral K/L/D/I**. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 102,70 persen.
4. Tujuan keempat yaitu **penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi**, memiliki satu sasaran strategis **SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan**. Rata-rata capaian kinerja untuk sasaran ini sebesar 100,06 persen.

Dengan capaian kinerja tersebut dan realisasi anggaran di tahun 2023 sebesar 97,00 persen dari total pagu 7,7 triliun rupiah menggambarkan kemampuan BPS melakukan efisiensi dengan nilai efisiensi sebesar 56,93 persen.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Di sisi lain pencapaian pada tahun berikutnya juga harus ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja tersebut antara lain:

1. Meningkatkan pelayanan publik BPS dengan penyediaan ruang publik (*public space)* untuk pelayanan statistik dan penyediaan ruang *National Statistics Command Center* (NSCC) yang salah satunya bertujuan untuk menyajikan informasi dari berbagai sistem serta menyajikan *analytic dashboard.*
2. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk mengurangi beban kerja pegawai sehingga capiaan kegiatan prioritas menjadi lebih optimal.
3. Meningkatkan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral melalui kegiatan Workshop Rekomendasi Statistik, *launching* Aplikasi Romantik 2.0 sebagai bentuk peningkatan sarana dalam proses penyelenggaraan statistik sektoral.
4. Mengoptimalkan pemahaman terkait penyampaian metadata statistik sektoral melalui rapat koordinasi metadata statistik dengan K/L/D/I
5. Meningkatkan pemahaman Tim Pembinaan Statistik Sektoral BPS terkait penyelenggaraan statistik sektoral dan membangun perencanaan anggaran yang optimal dan menyeluruh pada proses pembinaan sektoral di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
6. Melanjutkan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebagai upaya mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan statistik sektoral di Indonesia dan sebagai bahan rekomendasi pembinaan statistik untuk Tim Pembina Statistik Sektoral BPS.
7. Melakukan pembinaan kepada pengelola keuangan negara tingkat satker di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Lampiran

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 Januari 2023
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PUSAT STATISTIK

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi yang dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi pembangunan nasional (%)	Persen	98
Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	40
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata statistik sektoral sesuai standar (%)	Persen	76
Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri (%)	Persen	50
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS	Skor	WTP
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98

	Kegiatan		Anggaran
1.	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp.	4.771.389.267.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp.	3.247.216.325.000,-
	Jumlah	**Rp.**	**8.018.605.592.000,-**

Jakarta, 14 Januari 2023
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Margo Yuwono S.Si, M.Si
NIP. 19630605 198702 1 001

Jumlah Pegawai BPS Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat					
Kepala Badan Pusat Statistik					-
Sekretariat Utama	4	111	211	85	411
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	9	120	194	18	341
Deputi Bidang Statistik Sosial	7	99	83	7	196
Deputi Bidang Statistik Produksi	2	66	82	10	160
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	6	85	88	25	204
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	2	97	89	1	189
Inspektorat Utama		43	47	11	101
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	5	32	24	10	71
Politeknik Statistika STIS	24	57	22	7	110
Daerah*					
BPS Provinsi Aceh	3	56	377	147	583
BPS Provinsi Sumatera Utara		172	516	227	915
BPS Provinsi Sumatera Barat	1	91	328	105	525
BPS Provinsi Riau		48	285	83	416
BPS Provinsi Jambi		58	217	63	338
BPS Provinsi Sumatera Selatan	1	101	306	100	508
BPS Provinsi Bengkulu	1	55	202	39	297
BPS Provinsi Lampung		82	276	147	505
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		37	156	43	236
BPS Provinsi Kepulauan Riau	1	26	142	76	245
BPS Provinsi DKI Jakarta		63	117	48	228
BPS Provinsi Jawa Barat	1	209	477	294	981
BPS Provinsi Jawa Tengah	3	305	652	458	1.418
BPS Provinsi D I Yogyakarta	2	133	121	55	311

SATUAN KERJA	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S3	S2	S1	DIII kebawah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi Jawa Timur	3	273	618	319	1.213
BPS Provinsi Banten		80	138	91	309
BPS Provinsi Bali	2	49	177	46	274
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	43	252	99	395
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur		46	358	191	595
BPS Provinsi Kalimantan Barat	1	49	269	95	414
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	1	31	266	67	365
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	1	51	254	120	426
BPS Provinsi Kalimantan Timur	1	45	230	57	333
BPS Provinsi Kalimantan Utara		8	122	29	159
BPS Provinsi Sulawesi Utara		42	260	78	380
BPS Provinsi Sulawesi Tengah		47	220	86	353
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	1	71	452	209	733
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara		55	261	137	453
BPS Provinsi Gorontalo		20	137	37	194
BPS Provinsi Sulawesi Barat		30	141	47	218
BPS Provinsi Maluku		27	212	91	330
BPS Provinsi Maluku Utara		15	185	75	275
BPS Provinsi Papua Barat		23	223	59	305
BPS Provinsi Papua		33	375	107	515
Jumlah	83	3.184	10.162	4.099	17.528

** Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya*

Jumlah Pegawai BPS Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2023

SATUAN KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pusat					
Kepala Badan Pusat Statistik					-
Sekretariat Utama	56	320	35		411
Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	45	294	2		341
Deputi Bidang Statistik Sosial	50	146			196
Deputi Bidang Statistik Produksi	41	118	1		160
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	44	159	1		204
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	50	139			189
Inspektorat Utama	17	77	7		101
Pusat Pendidikan dan Pelatihan	23	45	3		71
Politeknik Statistika STIS	39	67	4		110
Daerah*					
BPS Provinsi Aceh	46	457	80		583
BPS Provinsi Sumatera Utara	101	716	97	1	915
BPS Provinsi Sumatera Barat	52	431	42		525
BPS Provinsi Riau	34	350	32		416
BPS Provinsi Jambi	38	270	30		338
BPS Provinsi Sumatera Selatan	54	406	48		508
BPS Provinsi Bengkulu	27	245	25		297
BPS Provinsi Lampung	42	392	71		505
BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	32	175	29		236
BPS Provinsi Kepulauan Riau	17	182	46		245
BPS Provinsi DKI Jakarta	41	176	11		228

SATUAN KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
	IV	III	II	I	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BPS Provinsi Jawa Barat	124	764	92	1	981
BPS Provinsi Jawa Tengah	179	1.103	135	1	1.418
BPS Provinsi D I Yogyakarta	61	228	22		311
BPS Provinsi Jawa Timur	139	909	165		1.213
BPS Provinsi Banten	42	216	51		309
BPS Provinsi Bali	28	225	19	2	274
BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	31	306	58		395
BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	33	433	128	1	595
BPS Provinsi Kalimantan Barat	40	328	46		414
BPS Provinsi Kalimantan Tengah	33	290	42		365
BPS Provinsi Kalimantan Selatan	39	322	65		426
BPS Provinsi Kalimantan Timur	30	271	32		333
BPS Provinsi Kalimantan Utara	8	134	17		159
BPS Provinsi Sulawesi Utara	24	315	41		380
BPS Provinsi Sulawesi Tengah	32	255	66		353
BPS Provinsi Sulawesi Selatan	57	553	123		733
BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	33	358	62		453
BPS Provinsi Gorontalo	11	170	13		194
BPS Provinsi Sulawesi Barat	23	177	18		218
BPS Provinsi Maluku	21	255	54		330
BPS Provinsi Maluku Utara	16	207	52		275
BPS Provinsi Papua Barat	20	240	45		305
BPS Provinsi Papua	30	419	66		515
Jumlah	1.903	3.643	.976	6	17.528

** Jumlah Pegawai BPS Provinsi termasuk pegawai dari BPS Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya*

Jumlah Pejabat Fungsional BPS Tahun 2023

No	Jabatan Fungsional	Utama	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Analis Anggaran			24					24
2	Analis Hukum		1	1					2
3	Analis Kepegawaian		7	84	54	4	10	1	160
4	Analis Pengelolaan Keuangan APBN		9	91	18				118
5	Apoteker				1			1	2
6	Arsiparis		2	31	22		8	5	68
7	Asessor SDM Aparatur			11					11
8	Asisten Apoteker								-
9	Auditor		19	24	16	1	1	7	68
10	Dokter		2		1				3
11	Dokter Gigi		2						2
12	Dosen	2	11	45	4				62
13	Penata Laksana Barang					1	12	19	32
14	Peneliti								-
15	Penerjemah		1	2					3
16	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa		2	46	48				96
17	Pengembang Teknologi Pembelajaran		1	6	1				8
18	Penyuluh Hukum			4	3				7
19	Perancang Peraturan Perundang-undangan		1		2				3

No	Jabatan Fungsional	Utama	Madya	Muda	Pertama	Penyelia	Mahir	Terampil	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Perawat		1					2	3
21	Perawat Gigi					1		1	2
22	Perencana		3	12	8				23
23	Pranata Humas		3	14	31	1			49
24	Pranata Keuangan APBN					28	45	133	206
25	Pranata Komputer	1	56	525	374	4	25	6	991
26	Pustakawan			3		2	1	6	12
27	Statistisi	7	464	3573	3725	406	940	897	10.012
28	Widyaiswara	3	8	8					19
	Jumlah	13	593	4.504	4.308	448	1.042	1.078	11.986

Tampilan Dashboard SKD, indikator "Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional (%)"

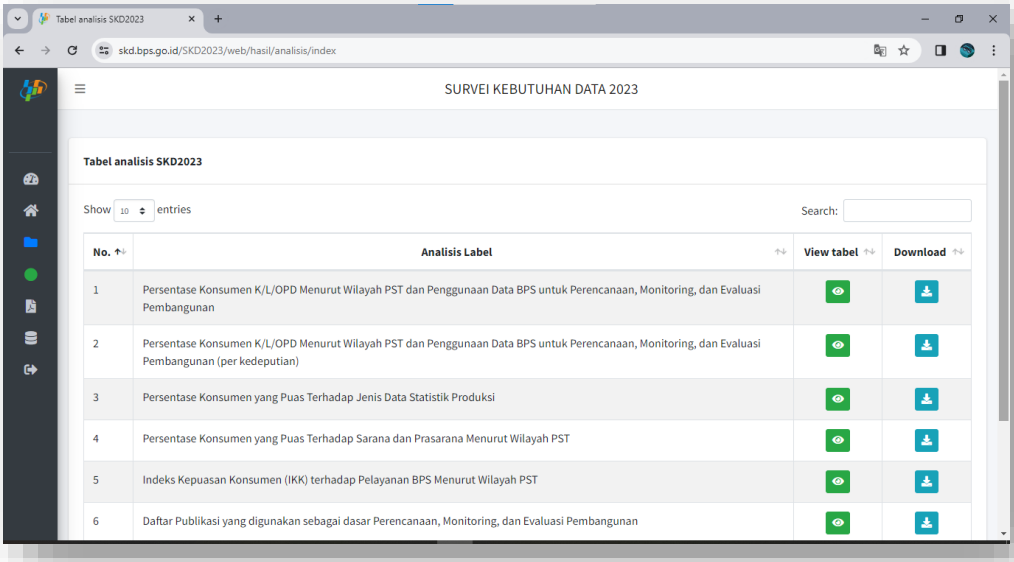

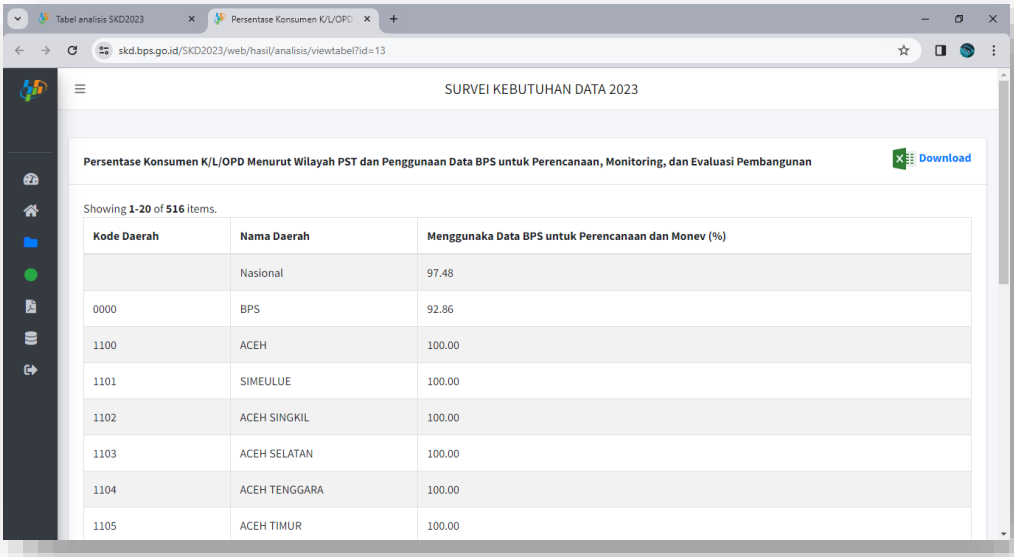

Tampilan Dashboard SKD, indikator "Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS"

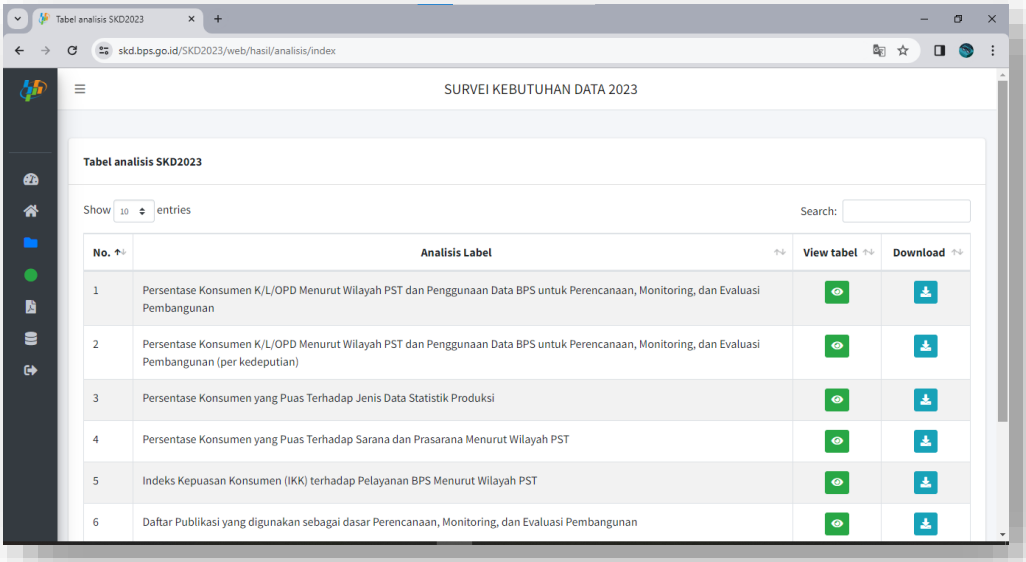

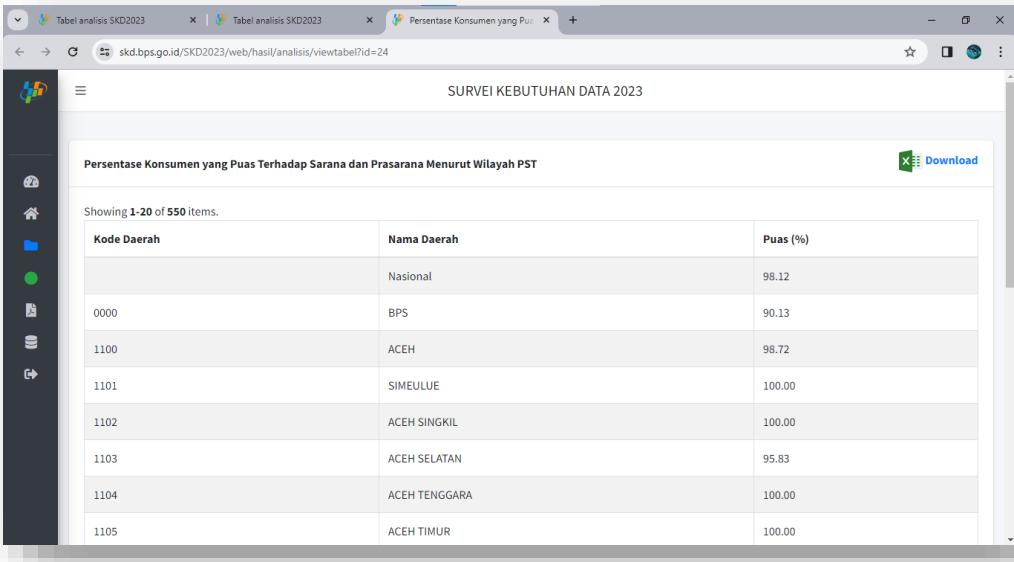

Daftar Publikasi yang Menerapkan Standar Akurasi yang Dimanfaatkan sebagai Dasar Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
1	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Lampung
2	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan
3	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan
4	Statistik Kesejahteraan Rakyat
5	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali
6	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan
7	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau
8	Statistik Pemuda Provinsi Sulawesi Selatan
9	Statistik Potensi Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur
10	Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia
11	Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tenggara
12	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah
13	Statistik Perumahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
14	Profil Perempuan Provinsi Kalimantan Tengah
15	Analisis Kondisi Kemiskinan Provinsi Jambi
16	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta
17	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat
18	Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Banten
19	Indikator Utama Sosial, Politik, dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah
20	Statistik Potensi Desa Provinsi Sumatera Selatan
21	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur
22	Statistik Gender Provinsi Sumatera Utara

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
23	Statistik Gender Provinsi Jawa Tengah
24	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat
25	Statistik Ketenagakerjaan
26	Indikator Penting Provinsi Papua
27	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat
28	Profil Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta
29	Statistik Potensi Desa Indonesia
30	Statistik Gender Provinsi Aceh
31	Perkembangan Indikator SDGs Bidang Kesehatan dan Perumahan
32	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah
33	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah
34	Pola Konsumsi Penduduk Provinsi Lampung
35	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jambi
36	Profil Tempat Tinggal Provinsi Jawa Tengah
37	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah
38	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Barat
39	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur
40	Statistik ketenagakerjaan provinsi jawa timur
41	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat
42	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
43	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur
44	Booklet Survei Angkatan Kerja Nasional
45	Profil Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Hasil Sakernas
46	Statistik Perumahan Provinsi Jawa Barat
47	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan
48	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
49	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
50	Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
51	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus
52	Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan
53	Statistik Potensi Desa Provinsi Jawa Timur
54	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur
55	Potensi Desa Provinsi Jawa Barat
56	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat
57	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Barat
58	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Sumatera Barat
59	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat
60	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Maluku
61	Statistik Potensi Desa Provinsi Jambi
62	Statistik Potensi Desa Provinsi Sumatera Utara
63	Statistik Potensi Desa Provinsi Kalimantan Tengah
64	Indikator Pendidikan Provinsi Gorontalo
65	Statistik Pendidikan
66	Statistik Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
67	Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
68	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Gorontalo
69	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo
70	Indikator Pasar Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo
71	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah
72	Statistik Sosial dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Hasil Susenas
73	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bengkulu
74	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
75	Profil Kesehatan Indonesia
76	Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Barito Selatan
77	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Aceh
78	Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia
79	Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
80	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Selatan
81	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kepulauan Riau
82	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau
83	Statistik Perumahan Provinsi Banten
84	Statistik Potensi Desa Provinsi Kepulauan Riau
85	Statistik Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
86	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Gorontalo
87	Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
88	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi DI Yogyakarta
89	Profil Kesehatan Ibu dan Anak
90	Statistik Penduduk Lanjut Usia
91	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
92	Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi
93	Statistik Pemuda Indonesia
94	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Utara
95	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku
96	Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Maluku
97	Evaluasi Ruku Warga (RW) Kumuh Provinsi DKI Jakarta
98	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau
99	Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Maluku
100	Data Mikro Kependudukan

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
101	Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Lampung
102	Statistik Ketenagakerjaan Provinsi DI Yogyakarta
103	Kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) KOR
104	Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua
105	Statistik Ketahanan Sosial Provinsi Sumatera Barat
106	Profil Tenaga kerja Provinsi Kalimantan Selatan
107	Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara
108	Indeks Perilaku Anti Korupsi
109	Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Provinsi Gorontalo
110	Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Gorontalo
111	Keadaan Pekerja Provinsi Gorontalo
112	Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Timur
113	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten
114	Indikator Sosial Budaya dan Pendidikan Provinsi Jawa Timur
115	Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Jambi
116	Direktori Perusahaan Industri Besar dan Sedang Provinsi Kepulauan Riau
117	Perkembangan Indeks Produksi Industri Manufaktur
118	Statistik Industri Besar dan Sedang Provinsi Kalimantan Timur
119	Profil Industri Mikro dan Kecil
120	Statistik Industri Besar dan Sedang Indonesia
121	Perkembangan Indeks Produksi Triwulanan Industri Mikro dan Kecil
122	Indeks Ketahanan Pangan Indonesia
123	Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara
124	Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara
125	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Riau Menurut Lapangan Usaha
126	Buku Saku PDRB Provinsi Banten, PDRB Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, PDRB Provinsi se-Pulau Jawa, dan PDB Indonesia

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
127	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur Menurut Lapangan Usaha
128	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara menurut lapangan Usaha
129	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Tenggara Menurut Pengeluaran
130	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
131	Statistik Daerah Provinsi Banten
132	Indeks Pembangunan Gender
133	Pendapatan Nasional Indonesia
134	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Utara Menurut Lapangan Usaha
135	Indikator Kesejahteraan Rakyat
136	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pengeluaran
137	Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah
138	Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha
139	Indeks Pembangunan Manusia
140	Potret Ekonomi Provinsi DKI Jakarta
141	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha
142	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha
143	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Menurut Lapangan Usaha
144	Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
145	Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan
146	Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sulawesi Selatan
147	Analisis Hasil Listing SE2016 Potensi Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan
148	Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Nasional (BPS PUSAT)
149	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha
150	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Lampung Menurut Lapangan Usaha
151	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha
152	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
153	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi Menurut Lapangan Usaha
154	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Provinsi Gorontalo
155	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo Menurut Lapangan Usaha
156	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo Menurut Pengeluaran
157	Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Indonesia
158	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh Menurut Lapangan Usaha
159	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah Menurut Pengeluaran
160	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Kalimantan Selatan
161	Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu menurut Lapangan Usaha
162	Analisis Hasil SE2016 Lanjutan Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Provinsi Gorontalo
163	Indikator Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
164	Analisis Hasil Listing SE2016 Potensi Ekonomi Provinsi DKI Jakarta
165	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha
166	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Menurut Lapangan Usaha
167	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha
168	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DI Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha
169	Perkembangan Ekonomi Sumatera Barat (Tinjauan PDRB Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha)
170	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua Menurut Lapangan Usaha
171	Laporan Perekonomian Provinsi Gorontalo
172	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Barat Menurut Lapangan Usaha
173	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten Menurut Lapangan Usaha
174	Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha
175	Provinsi Kalimantan Utara Dalam Angka
176	Provinsi Kalimantan Timur Dalam Angka
177	Provinsi Lampung Dalam Angka
178	Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
179	Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka
180	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka
181	Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka
182	Provinsi Riau Dalam Angka
183	Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka
184	Provinsi Nusa Tenggara Timur Dalam Angka
185	Provinsi Bali Dalam Angka
186	Provinsi Papua Barat Dalam Angka
187	Statistik Indonesia
188	Provinsi Maluku Utara Dalam Angka
189	Provinsi Banten Dalam Angka
190	Provinsi Jawa Barat Dalam Angka
191	Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka
192	Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka
193	Provinsi DKI Jakarta Dalam Angka
194	Provinsi Gorontalo Dalam Angka
195	Provinsi Bengkulu Dalam Angka
196	Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka
197	Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka
198	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur
199	Provinsi Jambi Dalam Angka
200	Provinsi Aceh Dalam Angka
201	Provinsi Papua Dalam Angka
202	Provinsi Kepulauan Riau Dalam Angka
203	Provinsi Jawa Timur Dalam Angka
204	Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka

No	Judul Publikasi
(1)	(2)
205	Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka
206	Provinsi Maluku Dalam Angka
207	Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi
208	Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka
209	Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka
210	Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka
211	Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan
212	Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka
213	Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan
214	Statistik Indonesia, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan
215	Provinsi Papua Barat Dalam Angka, Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan

Daftar K/L/D/I yang Mendapatkan Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2023

No.	K/L/D/I
(1)	(2)
1	Badan Keamanan Laut
2	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
3	Badan Pangan Nasional
4	Badan Pemeriksa Keuangan
5	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6	Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
7	Kementerian Agama
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan
9	Kementerian Kesehatan
10	Kementerian Ketenagakerjaan
11	Kementerian Keuangan
12	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13	Kementerian Pemuda dan Olahraga
14	Kementerian Perdagangan
15	Kementerian Perhubungan
16	Komisi Aparatur Sipil Negara
17	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
18	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
19	Perpustakaan Nasional RI
20	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Daftar K/L/D/I yang Menyampaikan Metadata Sektoral Sesuai Standar Tahun 2023

No.	K/L/D/I
(1)	(2)
1	Badan Keamanan Laut RI
2	Badan Kepegawaian Negara
3	Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
4	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
5	Badan Pangan Nasional
6	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
7	Badan Pemeriksa Keuangan
8	Badan Pengawas Obat dan Makanan
9	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
10	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
11	Kementerian Keuangan
12	Kementerian Komunikasi dan Informatika
13	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
14	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15	Kementerian Luar Negeri
16	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
17	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18	Kementerian Pemuda dan Olahraga
19	Kementerian Perdagangan
20	Kementerian Pertanian
21	Komisi Aparatur Sipil Negara
22	Komisi Pengawas Persaingan Usaha

No.	K/L/D/I
(1)	(2)
23	Perpustakaan Nasional RI
24	Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian
25	Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Perhubungan
26	Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan
27	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
28	Televisi Republik Indonesia
29	Komisi Informasi Pusat

Daftar K/L/D/I yang Mampu Menyelenggarakan Statistik Sektoral Secara Mandiri

No.	K/L/D/I
(1)	(2)
1	Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
2	Badan Kepegawaian Negara
3	Badan Pangan Nasional
4	Badan Pemeriksa Keuangan
5	Badan SAR Nasional/Badan Nasional Pencarian Pertolongan
6	Kementerian Kelautan dan Perikanan
7	Kementerian Kesehatan
8	Kementerian Keuangan
9	Kementerian Luar Negeri
10	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
12	Kementerian Perhubungan
13	Kementerian Perindustrian
14	Kementerian Pertanian
15	Komisi Informasi Pusat
16	Komisi Pengawas Persaingan Usaha
17	Perpustakaan Nasional
18	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
19	Televisi Republik Indonesia

Daftar Prestasi BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2023

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BPS Kabupaten Sikka	Dedikasi dan Prestsi memujudkan Desa Cantik	Januari	Kepala Desa Watuliwung
2	BPS Kabupaten Sikka	Dedikasi dan Prestasi Mewujudkan Desa Cantik	Januari	Lurah Wolomarang
3	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Peringkat 1 Satker tingkat wilayah dengan Laporan Keuangan KL tingkat UAPPA-W TA 2021	Januari	Kepala Kanwil DJPb Kepulauan Riau
4	BPS Kabupaten Konawe Utara	Piagam Penghargaan atas Kerjasananya dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam Penyediaan Publikasi Data Tahunan Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022	Januari	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
5	BPS Kabupaten Konawe Utara	Piagam Penghargaan atas Kerjasamanya dengan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Konawe Utara dalam Pembinaan Statistik Sektoral Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022	Januari	Pemerintah Kabupaten Konawe Utara
6	BPS Kabupaten Boalemo	Kantor Dinas Instansi Vertikal Pertama di Kabupaten Boalemo yang telah 100 persen melakukan pelaporan SPT Tahunan 2022 dan Pemadanan NIK-NPWP	Januari	Kantor Pajak Tilamuta
7	BPS Kabupaten Langkat	Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Tahun 2022 Audited Tercepat dan Tepat	Januari	KPPN Medan
8	BPS Kabupaten Langkat	Bendahara Pengeluaran Tercepat atas Penyampaian LPJ Bendahara periode Triwulan I 2023	Januari	KPPN Medan
9	BPS Provinsi Kalimantan Timur	Peringkat III Pelaksanaan LPJ Bendahara Penerimaan Tercepat dan Terakurat Kategori Pagu Besar	Januari	KPPN Samarinda

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	BPS Kabupaten Pasaman	piagam satker kolaboratif dari KPPN	Januari	KPPN Lubuk Sikaping
11	BPS Provinsi Gorontalo	Satuan Kerja dengan Penyampaian UP Tercepat	Januari	KPPN Gorontalo
12	BPS Kabupaten Pemalang	Wajib Pajak Instansi Pemerintah Pusat Penentu Penerimaan KPP Pratama Pekalongan	Januari	KPP Pratama Pekalongan
13	BPS Kabupaten Pemalang	Wajib Pajak Instansi Pemerintah Pusat Penentu Penerimaan KPP Pratama Pekalongan	Januari	KPP Pratama Pekalongan
14	BPS Kabupaten Pinrang	Sertifikat penghargaan dari Diskominfosandi Pinrang atas Pembinaan Statistik Sektoral melalui Romantik tentang IKM Diskominfosandi tahun 2022	Januari	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pinrang
15	BPS Kabupaten Pinrang	Sertifikat penghargaan dari Diskominfosandi Pinrang atas Pembinaan Statistik Sektoral melalui Romantik tentang Penyusunan Indeks Kepuasan Penggunaan Wi-Fi Publik Kabupaten Pinrang tahun 2022	Januari	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Pinrang
16	BPS Kabupaten Grobogan	Satker terbaik Penyampaian LPJ Bendahara	Januari	KPPN Purwodadi
17	BPS Kota Pariaman	sertifikat diberikan kepada BPS Kota Pariaman atas pencapaian 100% tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahunan Tahun pajak 2022	Januari	Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan pariaman
18	BPS Kota Salatiga	Berkontribusi sebagai Pembina Data pada Forum Satu Data untuk Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Produsen Data Dalam Publikasi Statistik Sektoral (DATAKU) 2022	Januari	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga
19	BPS Kabupaten Gorontalo	Peringkat pertama Petugas satuan kerja terbaik semester II T.A. 2022	Januari	KPPN GORONTALO
20	BPS Provinsi Banten	Kepatuhan Pelaporan SPT Masa Terbaik Pertama Kategori Instansi Vertikal Tahun 2022	Januari	DJP Pratama Serang Barat
21	BPS Kabupaten Mamasa	Instansi Pemerintah tercepat dalam pelaporan SPT tahunan 2022 dan Pemutakhiran Data Mandiri NIK menjadi NPWP di	Januari	KPP Pratama Majene

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Wilayah Kerja BPS Kabupaten Mamasa		
22	BPS Kabupaten Kaimana	Peringkat II Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan IV 2022 Kategori Pagu 2 s.d. 10 Miliar	Januari	KPPN Fak-Fak
23	BPS Kabupaten Bone	atker Terbaik Pertama Implementasi Marketplace Platform Digipay Tahun 2022	Januari	KPPN Watampone
24	BPS Kabupaten Gorontalo	Peringkat Ketiga Satuan Kerja satuan kerja dengan penyampaian Rekonsiliasi Terbaik Semester II Tahun Anggaran 2022	Januari	KPPN Gorontalo
25	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Upaya Pembinaan Agen Statistik dan Statistik Khusu di Universitas Tomakaka	Januari	Rektor Universitas Tomakaka
26	BPS Kabupaten Sumbawa Barat	Peringkat I IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satker Lingkup KPPN Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2022	Januari	KPPN Sumbawa Besar NTB
27	BPS Kabupaten Kaur	Apresiasi Atas Program Penguatan Desa Digital Melalui Pembinaan Statistik (PEDAL ANTIK)	Januari	Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian
28	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	PARTISIPASI LAYANAN KONSULTASI STATISTIK DAN REKOMENDASI TERKAIT SUVEI KEPUASAN MASYARAKAT ONLINE POLRES LIMA PULUH KOTA	Januari	POLRES LIMA PULUH KOTA
29	BPS Kota Palangka Raya	Penghargaan sebagai Badan dalam Membantu Pemko Palangka Raya Menangani Inflasi dan Peningkatan Perekonomian di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2023 (diterima Januari 2024)	Januari	Pj.Walikota Palangka Raya
30	BPS Kabupaten Sumbawa	Instansi yang Berperan Strategis dalam Pembangunan Daerah Tahun 2022	Januari	Bupati Sumbawa
31	BPS Kabupaten Serang	Instansi Penyedia Data Ketenagakerjaan Paling Informatif Tahun 2022	Januari	Disnakertrans Kabupaten Serang

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
32	BPS Kabupaten Lampung Utara	Satker dengan Nilai Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran dengan Kluster Pagu Besar (Lebih dari Rp. 10.000.000.000,-)	Januari	KPPN Kotabumi
33	BPS Kabupaten Kebumen	Piagam Penghargaan Penyelenggara Exit Survey Kebumen International Expo Tahun 2023	Januari	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
34	BPS Kabupaten Kebumen	Piagam Penghargaan Pelaksanaan Indepth Study Kemiskinan Kebumen Tahun 2022	Januari	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
35	BPS Kabupaten Kebumen	Piagam Penghargaan Penyelenggara Exit Survey Kebumen International Expo Tahun 2023	Januari	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
36	BPS Kabupaten Kebumen	Pelaporan SPT 2022 dengan capaian 100%	Januari	KPP Pratama Kebumen
37	BPS Kabupaten Pohuwato	Penghargaan dari KP2KP Marisa atas partisipasi dalam penyelesaian pelaporan SPT Tahunan serta pemadanan NIK menjadi NPWP	Januari	KP2KP Marisa
38	BPS Kabupaten Pohuwato	Penghargaan dari KPPN Marisa Sebagai Pengguna Kartu Kredit Pemerintah	Januari	KPPN Marisa
39	BPS Kabupaten Halmahera Utara	Sertifikat Penghargaan Satker Kooperatif Terbaik Peringkat 1	Januari	KPPN Tobelo
40	BPS Kabupaten Muara Enim	Kolaborasi Dalam Penyediaan Data Statistik Tanaman Padi	Januari	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikulturan Provinsi Sumatera Selatan
41	BPS Kabupaten Lebong	Juara Pertama (I) Satker Mitra KPPN Curup Kategori Pagu Besar dengan nilai IKPA 98,88	Januari	KPPN Curup
42	BPS Kabupaten Gunung Mas	WP Instansi Pemerintah Kab. Gunung Mas seluruh Pegawai Lapor SPT Paling Awal Th 2022	Januari	Kepala KP2KP Kuala Kurun
43	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	Satker Aktif Pengguna Digipay Tahun 2022	Januari	KPPN Kotabaru Kalimantan Selatan
44	BPS Kabupaten Malang	Terbaik I Pengguna Cash Management System dengan Voume dan Frekuensi Tertinggi Tahun 2022	Januari	KPPN Malang
45	BPS Kabupaten Malang	Pengguna Kartu Kredit Pemerintah dengan Volume	Januari	KPPN Malang

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dan Frekuensi Tertinggi Tahun 2022		
46	BPS Kabupaten Bojonegoro	SATUAN KERJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN CAPAIAN IKPA BERPREDIKAT SANGAT BAIK TAHUN 2023	Januari	KPPN BOJONEGORO
47	BPS Kabupaten Sikka	Sertifikat Pembinaan Statistik Sektoral Pertanian	Januari	Dinas Pertanian Kabupaten Sikka
48	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Penghargaan Pengguna KKP Teraktif Semester II TA.2022	Februari	KPPN Palembang
49	BPS Kabupaten Situbondo	Satuan Kerja Teresponsif dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Tahun 2023	Februari	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Situbondo
50	BPS Kabupaten Situbondo	capaian tingkat pelaporan SPT Tahunan orang pribadi tahun pajak 2022 oleh seluruh ASN BPS Kabupaten Situbondo sebesar 100%	Februari	KPP Pratama Situbondo
51	BPS Kabupaten Grobogan	Satker terbaik Penyampaian LPJ Bendahara	Februari	KPPN Purwodadi
52	BPS Kota Padangsidimpuan	Peringkat Pertama Kategori Satuan Kerja dengan Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran 2022 untuk satuan kerja pada KPPN Kota Padangsidimpuan	Februari	KPPN Padangsidimpuan
53	BPS Kota Padangsidimpuan	Nominasi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Inspiratif untuk satuan kerja pada KPPN Kota Padangsidimpuan	Februari	KPPN Kota Padangsidimpuan
54	BPS Kota Tarakan	Rekan Treasury Analytics	Februari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan
55	BPS Kota Salatiga	Kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan data kependudukan yang dibutuhkan oleh PDAM Kota Salatiga	Februari	PDAM Kota Salatiga
56	BPS Kabupaten Aceh Tenggara	Satuan Kerja dengan frekuensi CMS terbanyak	Februari	KPPN Kutacane
57	BPS Kabupaten Gorontalo	Piagam Penghargaan BPS Kab Gorontalo Dalam Berperan Aktif Dalam Penginputan Capaian Output Untuk Mewujudkan Nilai IKPA Yang Optimal	Februari	KPPN GORONTALO

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
58	BPS Kabupaten Gorontalo	Piagam Penghargaan BPS Kab Gorontalo Atas Kontribusinya dalam penyelesaian lebih awal pelaporan SPT Tahunan dan Pemadanan NIK menjadi NPWP	Februari	KP2KP Limboto
59	BPS Kabupaten Buton Utara	Peringkat 1 Satuan kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu Sedang	Februari	KPPN Bau-Bau
60	BPS Kabupaten Buton Utara	Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu Sedang	Februari	KPPN Bau-Bau
61	BPS Kabupaten Mamasa	Peringkat Sepuluh Besar IKPA Terbaik Kategori DIPA Besar (Pagu>5 Miliar)	Februari	KPPN Majene
62	BPS Kabupaten Gorontalo Utara	Penyelesaian pelaporan SPT Tahunan dan Pemedanan NIK menjadi NPWP	Februari	KP2KP Dirjen Pajak
63	BPS Kabupaten Nias	Peringkat II Satker dengan nilai IKPA terbaik kategori Pagu Besar Periode Semester II Tahun 2022	Februari	KPPN Gunungsitoli
64	BPS Kabupaten Nias	Juara II Satuan Kerja terbaik dalam penyusunan Digipay MarketPlace Periode semester II Tahun 2022	Februari	KPPN Gunungsitoli
65	BPS Kota Sibolga	Partisipasi Aktif Dalam Penyampaian MateriKegiatan Press Release APBN Tahun Anggaran 2023	Februari	KPPNS Sibolga
66	BPS Kabupaten Trenggalek	Penyedia Data Bagi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gunungkidul	Februari	Bupati Gunungkidul
67	BPS Kota Banda Aceh	Anugrah KPPN Awards BPS Kota Banda Aceh Terbaik IV Kategori Penggunaan CMS Terbaik	Februari	KPPN Banda Aceh
68	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Kerjasamanya Sebagai Pembina Statistik Sektoral di Provinsi Sulawesi Barat	Februari	Dinas Ketahanan Pangan
69	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Pembinaan Agen Statistik dan Statistik Khusus di Universitas Muhammadiyah Mamuju	Februari	Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju
70	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Terbaik 1 Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2021	Februari	Kepala Kantor Wilayah DJPB Prov. Sulawesi Barat

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71	BPS Provinsi Di Yogyakarta	Peringkat II Kategori Satuan Kerja dengan Penatausahaan BMN Terbaik Tahun 2022 di Provinsi D.I. Yogyakarta	Februari	KPKNL Yogyakarta
72	BPS Provinsi Jawa Tengah	Terbaik Pertama dalam Digital Payment Award 2022 Tingkat K/L Lebih Dari 30 Satker	Februari	Kemenkeu
73	BPS Provinsi Jawa Tengah	Terbaik Ketiga Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Tahun 2022 Kategori III (Jumlah Satker di atas 35)	Februari	Kemenkeu
74	BPS Kabupaten Magelang	SATUAN KERJA DENGAN NILAI "SANGAT BAIK"	Februari	KPPN MAGELANG
75	BPS Kabupaten Barito Kuala	Satuan Kerja dengan Nilai UP Kecil pada Transaksi Digipay/Marketplace Tahun 2022	Februari	Kementerian Keuangan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin
76	BPS Kota Bekasi	Satker dengan Kinerja Pelaksana Anggaran Terbaik II Kategori Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Teriode TA 2022	Februari	KPPN Bekasi
77	BPS Kabupaten Lampung Timur	Penghargaan Penyediaan Data Perencanaan Pembangunan	Februari	Bappeda Kabupaten Lampung Timur
78	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Peringkat II Satuan Kerja Terbaik dalam Implementasi Cash Management System (CMS) di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	Februari	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
79	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik II Operator Satker Tahun 2022	Februari	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Banjarmasin
80	BPS Provinsi Jambi	Penghargaan BEKABI AWARDS 2023	Februari	KPPBC TMP B Jambi
81	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Pembina dan Pendamping Pada Kegiatan Penyusnuan Survei Kepuasan Masyarakat Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 2022	Februari	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara
82	BPS Kabupaten Blora	Implementasi Standar kompetensi	Februari	KPPN Purwodadi

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
83	BPS Kabupaten Toraja Utara	Peringkat 2, Tingkat Kepatuhan Penyelesaian LPJ Bendahara Periode Semester II Tahun 2023	Februari	KPPN Makale
84	BPS Kabupaten Toraja Utara	Penggunaan Platform Digipay dan Marketplace Periode Semester II	Februari	KPPN Makale
85	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peringkat Pertama Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Periode Semester II TA 2022	Maret	Kepala Kanwil DJPB NTT
86	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peringkat Ketiga Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan IV TA 2022 Kategori Pagu Sedang	Maret	Kepala Kanwil DJPB NTT
87	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Pembina Data Dalam Pelaksanaan Satu Data Indonesia	Maret	Gubernur Kepulauan Riau
88	BPS Kabupaten Langkat	Selama Kurun aktu Tahun 2023 Telah Turut Berpartisipasi Dalam Pelestarian Lingkungan Dengan Mendaur Ulang Di INDOARSIP Setara dengan Penyelamatan 63 Pohon	Maret	PT.INDOARSIP KERTASKARYA BUANASENTOSA
89	BPS Kabupaten Kepahiang	SERTIFIKAT PODCAST TEMA SENSUS PERTANIAN TAHUN 2023	Maret	Kemenag Kepahiang
90	BPS Kabupaten Grobogan	Satker terbaik Penyampaian LPJ Bendahara	Maret	KPPN Purwodadi
91	BPS Kabupaten Barito Timur	Penghargaan atas pencapaian 100% Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022	Maret	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh
92	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Peringkat II Kategori Satker Terbaik dalam Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2022 Unaudited Lingkup non Kemenkeu	Maret	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado, Asyep Syaefudin
93	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Penghargaan atas capaian Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Tahun 2022 Kategori Pembina (Sedang) 11 s.d. 20 Satker dengan Peringkat III	Maret	Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani
94	BPS Kabupaten Batu Bara	Penghargaan Lingkungan dr Indoarsip	Maret	Indoarsip

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95	BPS Kota Semarang	SATKER TERBAIK PERINGKAT KE 2 KATEGORI PENYAMPAIAN GAJI INDUK TERCEPAT	Maret	KPPN SEMARANG II
96	BPS Kabupaten Tana Tidung	Terbaik 2 dalam Penilaian Indikator Kinerja Penilaian Anggaran (IKPA) TA 2022 Kategori Pagu Sedang	Maret	KPPN TARAKAN
97	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Juara Umum Treasury Awards KPPN Manna Tahun 2023	Maret	KPPN Manna
98	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat I Realisasi Uang Persediaan KKP	Maret	KPPN MANNA
99	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat II LPJ Bendahara Pengeluaran	Maret	KPPN MANNA
100	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat II Penyampaian Gaji Induk	Maret	KPPN MANNA
101	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat II Penyampaian Saldo Rekening	Maret	KPPN MANNA
102	BPS Kabupaten Bengkulu Selatan	Peringkat III Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan	Maret	KPPN MANNA
103	BPS Kabupaten Boyolali	Penghargaan Terbaik I CMS (Triwulan I 2023)	Maret	KPPN KLATEN
104	BPS Kabupaten Boyolali	Penghargaan Terbaik I CMS (Triwulan I 2023)-KPPN KLATEN-7 MARET 2023	Maret	KPPN KLATEN
105	BPS Kabupaten Aceh Selatan	Peringkat Pertama Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022	Maret	KPPN Tapaktuan
106	BPS Provinsi Jawa Barat	Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Terbaik ke 2	Maret	Kanwil DJPB Provinsi Jawa Barat
107	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penghargaan Satuan Kerja Terbaik KPPN Tanjung Semester II Tahun 2022	Maret	KPPN Tanjung
108	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penghargaan Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Implementasi Digipay Terbaik Semester II Tahun 2022	Maret	KPPN Tanjung
109	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penghargaan Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Kinerja Terbaik Kategori Rekonsiliasi Laporan Keuangan	Maret	KPPN Tanjung
110	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penghargaan Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Implementasi Platform Cash Management System (CMS) Terbaik	Maret	KPPN Tanjung

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
111	BPS Kabupaten Bandung	Penghargaan Pengguna Cash Manajemen System (CMS Bank) terbaik ke-1 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (KPPN II Bandung)	Maret	Kementerian Keungan RI melalui KPPN II Bandung
112	BPS Kabupaten Malinau	Penghargaan Peringkat 3 IKPA Terbaik Tahun Anggaran 2022 Kategori Pagu 5 Milyar sampai 50 Milyar	Maret	KPPN Tanjung Selor
113	BPS Kabupaten Malinau	Penghargaan Peringkat 2 Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2022 Unaudited Kategori Kewenangan Satker Kantor Daerah	Maret	KPPN Tanjung Selor
114	BPS Kabupaten Serang	Instansi Terpercaya Penyedia Indikator Strategis Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2022	Maret	Bappedalitbang Kabupaten Serang
115	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penghargaan sebagai Peringkat Kedua dalam Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAPPA-W Semester I T.A. 2022 lingkup Kantor Wilayah DjPb Provinsi NTB	Maret	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
116	BPS Provinsi Sumatera Utara	Peringkat III Koordinator Pengelola Anggaran K/L Tingkat Wilayah Kategori Pagu Sedang	Maret	Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Utara
117	BPS Kabupaten Seluma	Peringkat III Satker dengan Katagori Nilai IKPA Tertinggi Satker Dengan Pagu DIPA Besar	Maret	KPPN Manna
118	BPS Kota Pekalongan	Sertifikat Penghargaan Atas Terselenggaranya Pembinaan Statistik Sektoral di Kota Pekalongan	Maret	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pekalongan
119	BPS Kota Pekalongan	Piagam Penghargaan Atas Kerjasamanya Sebagai Penyedia Data Pertanian Yang Berkualitas Dan Indikator Strategis Tahun 2022	Maret	Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Pekalongan
120	BPS Kabupaten Bantul	Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran IKPA Terbaik Kategori Pagu Sedang	Maret	KPPN Yogyakarta
121	BPS Kabupaten Balangan	Peringkat 2 Satker Implementasi CMS Terbaik Semester II 2022	Maret	KPPN 151 Tanjung

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
122	BPS Kabupaten Balangan	Peringkat 2 Satker Rekon LK Terbaik Semester II 2022	Maret	KPPN 151 Tanjung
123	BPS Kabupaten Balangan	Peringkat 2 Satker Implementasi Digipay Terbaik Semester II 2022	Maret	KPPN 151 Tanjung
124	BPS Kabupaten Konawe	Dedikasi dalam mendukung penyelenggaran dan pembangunan di Kabupaten Konawe	Maret	Bupati Konawe
125	BPS Kabupaten Konawe	Kontribusi dalam Pembinaan Pengelolaan Data pada 22 Desa/Kelurahan Lokasi Kemiskinan Ekstrim dan Stunting di Kabupaten Konawe	Maret	Bupati Konawe
126	BPS Kabupaten Konawe	Kontribusi sebagai Pembina Statistik Sektoral di Kabupaten Konawe	Maret	Bupati Konawe
127	BPS Kota Sorong	Peringkat Pertama Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Terbaik Lingkup KPPN Sorong Tahun Anggaran 2022	Maret	KPPN Sorong
128	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara TA 2022 Peringkat Kedua	Maret	KPPN Tanjung Selor
129	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Peringkat Pertama Laporan Keuanga Tingkat UAKPA TA 2022 Unaudited Kategori Kewenangan Satker Kantor Daerah	Maret	KPPN Tanjung Selor
130	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Satker Kategori Pagu Besar dengan Nilai IKPA Terbaik Periode Triwulan I Tahun 2023	April	Kepala KPPN Kupang
131	BPS Kabupaten Kupang	Penyampaian LPJ bendahara pengeluaran terbaik 2 triwulan 1	April	Kementrian Keuangan Kanwil DJPB Provinsi NTT
132	BPS Kabupaten Pelalawan	Percepatan Penyampian SPT Tahunan orang pribadi	April	KPP Pratama Pangkalan Kerinci
133	BPS Kota Sungai Penuh	Juara 1 Satuan Kerja Terbaik Triwulan I 2023 Kategori Pagu Anggaran Sedang Terbaik	April	Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sungai Penuh
134	BPS Kabupaten Kepulauan Talaud	Satker dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori SANGAT BAIK Periode Triwulan I Tahun 2023	April	KPPN Bitung

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
135	BPS Kabupaten Bogor	Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup KPPN Bogor Periode TW 4 2022	April	KPPN Bogor
136	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Pembinaan Agen Statistik dan Statistik Khusus di Universitas Sulawesi Barat	April	Rektor Universitas Sulawesi Barat
137	BPS Kabupaten Mamuju	Top three satuan kerja teraktif dalam penggunaan digipay periode s.d. Triwulan I Tahun 2023	April	Direktorat Jenderal perbendaharaan KPPN Mamuju
138	BPS Provinsi Jambi	Penghargaan Nilai IKPA 100 Tw I 2023	April	KPPN Jambi
139	BPS Kabupaten Kepulauan Selayar	Peringkat Terbaik Pertama Penilaian IKPA kategori Pagu Besar Triwulan I TA 2023	April	KPPN Benteng
140	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Capaian Nilai IKPA sempurna Triwulan I Tahun 2023	Mei	Kepala Kanwil DJPB NTT
141	BPS Kabupaten Berau	SATUAN KERJA DENGAN TRANSAKSI DIGIFAY TERAKTIF SAMPAI DENGAN PERIODE APRIL TAHUN ANGGARAN 2023	Mei	Kepala KPPN Tanjung Redeb
142	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Penghargaan Mitra Kerja Sebagai Regional Chief Economist Kementerian Keuangan	Mei	DJPB Kanwil Provinsi Sumatera Selatan
143	BPS Kabupaten Serdang Bedagai	Monitoring penghargaan pengguna CMS	Mei	KPPN Tebing Tinggi
144	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Mitra Kerja dalam Pembinaan Statistik Sektoral Tingkat Desa Melalui Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) Tahun 2023	Mei	Kepala Dinas PMD Kabupaten OKU
145	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Mitra Kerja dalam Penyediaan data Strategis Kabupaten OKU	Mei	Bappelitbangda Kabupaten OKU
146	BPS Kabupaten Situbondo	The Best Partner in Public Policy Consulting	Mei	Bappeda Situbondo
147	BPS Kabupaten Situbondo	The Best Partner in The Discussion of Algicultural Statistical Indicators	Mei	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo
148	BPS Kabupaten Situbondo	The Best Partner in Statistical Consulting	Mei	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo
149	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Penghargaan atas capaian Peringkat III Kategori Satker Terbaik dalam Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban	Mei	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado, Asyep Syaefudin

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(LPJ) Bendahara Penerimaan Triwulan I Tahun 2023		
150	BPS Kota Bengkulu	Penyediaan Data Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu 2022	Mei	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu
151	BPS Kota Pekanbaru	PENYAMPIAN APRESIASI DAN PENGHARGAAN SATUAN KERJA LINGKUP KPPN PEKANBARU DENGAN CAPAIAN IKPA PREDEKAT SANGAT BAIK TRIWULAN I TAHUN 2023	Mei	KPPN Pekanbaru
152	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat II Penilaian pengelolaan kinerja APBN dengan pagu kecil (1 milyar s.d kurang dari 5 milyar) lingkup KPPN Sidikalang	Mei	KPPN Sidikalang
153	BPS Kabupaten Buton	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Triwulan I Tahun 2023	Mei	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
154	BPS Kabupaten Buton	Peringkat 1 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Besar	Mei	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
155	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Pencapaian IKPA Sangat Baik Triwulan I 2023	Mei	KPPN Kuala Tungkal
156	BPS Kabupaten Buton Utara	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Triwulan I Tahun 2023	Mei	KPPN Bau-Bau
157	BPS Kabupaten Buton Utara	Peringkat 2 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Sedang	Mei	KPPN Bau-Bau
158	BPS Kabupaten Kudus	Terbaik Ketiga Kinerja Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP)	Mei	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
159	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	Piagam Penghargaan sebagai Penyedia data Indikator Strategis	Mei	BAPPEDA KABUPATEN OKI
160	BPS Kabupaten Kaimana	Peringkat III Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Tercepat Triwulan I 2023	Mei	KPPN Fak-Fak

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
161	BPS Kabupaten Kaimana	Peringkat I Komitmen dalam Menjaga Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I 2023 Kategori Pagu 2 s.d. 10 Miliar	Mei	KPPN Fak-Fak
162	BPS Kota Lhokseumawe	PLAKAT PENGHARGAAN ATAS MOU ANTARA BPS KOTA lHOKSEUMAWE DAN STIE LHOKSEUMAWE	Mei	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI LHOKSEUMAWE
163	BPS Kabupaten Gunung Kidul	Satuan Kerja Berkomitmen Tinggi, Berintegritas, serta Berpartisipasi Aktif dalam Pencegahan Korupsi	Mei	Hotel Sahid Raya Yogyakarta
164	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Piagam Penghargaan BPS Kabupaten Lampung Tengah sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah Terbaik TA 2022	Mei	KPPN Metro
165	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Piagam Penghargaan BPS Kabupaten Lampung Tengah sebagai Peringkat Ketiga Satuan Kerja Pengguna Cash Management System Bank BRI Terbaik Semester II TA 2022	Mei	KPPN Metro
166	BPS Kabupaten Banjarnegara	Penghargaan dari KPPN Banjarnegara terkait Penghargaan Implementasi Digipay sebagai Satuan Kerja Yang Aktif Menggunakan Marketplace Digipay dengan Jumlah Transaksi Barang Terbanyak Diberikan kepada Peringkat I BPS Kabupaten Banjarnegara, selama Triwulan I 2023 Telah melakukan Belanja Barang Melalui Digipay sebanyak 28 transaksi Belanja Barang, 11 Mei 2023.	Mei	KPPN Banjarnegara
167	BPS Kabupaten Nagan Raya	Apresiasi Terhadap Dukungan dan Partisipasi dalam Pembinaan Statistik Sektoral Daerah serta Pengembangan Portal Nagan Raya Satu Data Periode 2021-2022	Mei	Bupati Nagan Raya
168	BPS Kabupaten Sleman	Satker yang memiliki komitmen tinggi, beritegritas, serta berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan korupsi	Mei	Hotel New Shapir Yogyakarta

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
169	BPS Kota Jakarta Utara	SELAMA KURUN WAKTU TAHUN 2022-2023 TELAH TURUT BERPARTISIPASI DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DENGAN MENDAUR ULANG LIMBAH BARANG PENDUKUNG DOKUMEN/NON ARSIP DI INDOARSIP SETARA DENGAN PENYELAMATAN 9 POHON	Mei	PT INDOSARSIP KERTASKARYA BUANASENTOSA
170	BPS Provinsi Di Yogyakarta	Pelanggan Setia PT Pohon Cahaya 2022	Mei	PT Pohon Cahaya
171	BPS Kabupaten Serang	Mitra Statistik dalam Penyediaan Data Statistik Ketahanan Pangan Yang berkualitas	Mei	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Serang
172	BPS Kabupaten Serang	Mitra Statistik Dalam Penyedia Data Statistik Pertanian Yang Berkualitas	Mei	Dinas Perikanan Kabupaten Serang
173	BPS Kabupaten Kebumen	Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	Mei	BPJS Ketenagakerjaan
174	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penghargaan atas Kerjasama Dalam Program Outing Class SMP-SMA Lenterahati Islamic Boarding School Goes to Badan Pusat Statistik Provinsi NTB Tanggal 15, 17, 23 Mei 2023	Mei	Lenterahati Islamic Boarding School
175	BPS Kota Pekalongan	Piagam Penghargaan Satuan Kerja Dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Periode Triwulan I Tahun 2023	Mei	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekalongan
176	BPS Kabupaten Lampung Timur	Satuan Kerja Pengguna Cash Management System Bank BRI	Mei	KPPN Metro
177	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	Operator CMS Terbaik IV tahun 2023	Mei	KPPN Kotabaru Kalimantan Selatan
178	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	Operator DiGIPAYSATU Terbaik II Tahun 2023	Mei	KPPN Kotabaru Kalimantan Selatan
179	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	Operator Implementasi KKP Terbaik II Tahun 2023	Mei	KPPN Kotabru Kalimantan Selatan
180	BPS Kabupaten Rejang Lebong	Terbaik 3 Pawai Adat dalam Rangka HUT Kota Curup 2023	Mei	Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong
181	BPS Kabupaten Sijunjung	Penghargaan BPJS Mitra BPS Sijunjung 2023	Mei	BPSJ KETENAGAKERJAAN
182	BPS Kabupaten Sijunjung	Piagam Penghargaan_Satu Data Indonesia	Mei	Bappppeda Sijunjung
183	BPS Kabupaten Sijunjung	Piagam Penghargaan_Pembinaan Statistik Sektoral 2023	Mei	Kominfo KabupatenSijunjung

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
184	BPS Kabupaten Kotawaringin Timur	Penghargaan Penggunaan Virtual Account Dengan Transaksi Terbanyak untuk Penggunaan Rekening Bank BRI Triwulan I 2023, 26 Juni 2023	Juni	KPPN Sampit
185	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Mitra Kerja dalam Forum Satu Data Indonesia	Juni	Dinas Kominfo Kabupaten OKU
186	BPS Provinsi Lampung	Peringkat I Laporan Keuangan K/L Tingkat UAPPA-W TA 2022 Kategori Sedang	Juni	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung
187	BPS Provinsi Lampung	Penghargaan sebagai satker berkinerja baik lingkup KPPN Bandar Lampung Kategori Zero Retur Periode Triwulan I Tahun 2023	Juni	Kepala KPPN Bandar Lampung
188	BPS Kabupaten Grobogan	Satker terbaik Penyampaian LPJ Bendahara	Juni	KPPN Purwodadi
189	BPS Kabupaten Kulon Progo	Penghargaan Peringkat I Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2022	Juni	Kepala KPPN Wates
190	BPS Kabupaten Kulon Progo	Peringkat Kedua Penghargaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga.	Juni	Kepala KPPN Wates
191	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Piagam Penghargaan sebagai Peringkat 1 Kualitas Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Kategori UAPPA-W Besar Tahun 2022	Juni	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
192	BPS Kota Bengkulu	Penyampaian SPM Terbaik 2 KPPN Bengkulu	Juni	KPPN Bengkulu
193	BPS Kota Salatiga	Berkontribusi sebagai Pembina Data untuk Penguatan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Produsen Data dalam Kegiatan Pelatihan Metadata Statistik Tahun 2023	Juni	Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga
194	BPS Provinsi Jawa Barat	Satker Terbaik Kategori Penatausahaan dan Pengamanan BMN	Juni	KPKNL Bandung
195	BPS Provinsi Maluku	Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I 2023	Juni	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
196	BPS Kota Kupang	penghargaan dan ucapan terimakasih atas kerja Kolaborasi bersama Pemerintah Kota Kupang dalam menjaga Inflasi Kota Kupang tetap terkendali	Juni	Pemerintah Kota Kupang
197	BPS Kabupaten Lima Puluh Kota	PERAN AKTIF DAN KEPEDULIANNYA TERHADAP PERLINDUNGAN SELURUH MITRA STATISTIK KEDALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	Juni	BPJS KETENAGAKERJAAN
198	BPS Provinsi Di Yogyakarta	Partisipasi dalam Pelestarian Lingkungan	Juni	PT Indoarsip Kertaskarya Buanasentosa
199	BPS Kabupaten Sumbawa	Peringkat ke-2 atas peran serta dalam Implementasi Digitalisasi Pembayaran Pemerintah Tahun 2023	Juni	Kepala KPPN Sumbawa Besar
200	BPS Kabupaten Musi Rawas	Penghargaan sebagai Instansi Pemerintah Panutan atas Kepatuhan ASN dalam Pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022	Juni	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuklinggau
201	BPS Kabupaten Sorong Selatan	Peringkat Pertama Satuan Kerja dengan Laporan Keuangan tahun 2022 Terbaik	Juni	KPPN Sorong
202	BPS Provinsi Bali	Peringkat Pertama atas Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan UAPPA-W Tahun 2022 Kategori UAPPA-W Sedang	Juni	Kanwil DJPb Provinsi Bali
203	BPS Provinsi Bali	Penilaian LK UAPPA-W Tahun 2022 Audited Dengan Hasil Sangat Baik	Juni	Kanwil DJPb Provinsi Bali
204	BPS Kabupaten Gunung Mas	Penghargaan Stat Sektoral 2023	Juni	Bappedalitbang Kab. Gunung Mas
205	BPS Kabupaten Gunung Mas	Piagam Penghargaan Literasi Keuangan	Juni	Penggadaian CP Palangka Raya
206	BPS Kabupaten Gunung Mas	Sertifikat Perlindungan Petugas (ST2023)	Juni	BPJS Ketenagakerjaan Palangka Raya
207	BPS Kabupaten Sijunjung	Penghargaan BPJS petugas ST2023	Juni	PBJS KETENAGAKERJAAN
208	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Badan Publik Informatif	Juli	Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT
209	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Capaian Nilai IKPA Sempurna Triwulan II Tahun 2023	Juli	Kepala Kanwil DJPB NTT

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
210	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Satker Kategori Pagu Besar dengan Nilai IKPA Terbaik III Periode Semester I Tahun 2023	Juli	Kepala KPPN Kupang
211	BPS Kota Sawah Lunto	Ketepatan dan Kecepatan Penyampaian LK Unaudited	Juli	KPPN Sijunjung
212	BPS Kabupaten Boalemo	Satuan Kerja dengan IKPA Berpredikat "Sangat Baik" Semester I Tahun Anggaran 2023	Juli	KPPN Marisa
213	BPS Kabupaten Kuningan	Akurasi SPM Semester I Tahun 2023	Juli	KPPN
214	BPS Kabupaten Kuningan	KPPN	Juli	KPPN KUNINGAN
215	BPS Kabupaten Pasaman	Peringkat I Satker Pagu Besar dengan Nilai IKPA Semester I 2023 dengan nilai 100	Juli	KPPN Lubuk Sikaping
216	BPS Kabupaten Pasaman	Piagam Penghargaan Partner Kolaboratif KPPN Lubuk Sikaping Semester I Tahun 2023	Juli	KPPN
217	BPS Kabupaten Karimun	Peringkat 3 Satker dengan Nilai IKPA Indikator Deviasi Halaman III DIPA Terbaik Semester 1 TA 2023	Juli	KPPN Batam
218	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbaik Pertama Panyusunan LK UAPPA-W Tahun 2022 lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung	Juli	Kepala Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung
219	BPS Kota Tanjung Pinang	Satuan Kerja Terbaik Kedua atas Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang Periode Triwulan II 2023	Juli	KPPN Tipe A1 Tanjungpinang
220	BPS Kabupaten Serdang Bedagai	Peringkat 3 penyampaian laporan pertanggungjawaban dan rekonsiliasi tercepat dan akurat semester I 2023	Juli	KPPN Tebing Tinggi
221	BPS Provinsi Gorontalo	Peringkat Kedua Satuan Kerja dengan Implementasi KKP BNI Terbaik Semester I TA 2023	Juli	KPPN Gorontalo
222	BPS Kabupaten Lingga	Terbaik Ketiga Satker Berprestasi atas Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang (Pagu Rp 5 Milyar s.d. Rp 25 Milyar) Periode Triwulan II 2023	Juli	KPPN Tanjungpinang
223	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Terbaik Ketiga Nilai IKPA Satker Lingkup KKPN Baturaja	Juli	KPPN Baturaja

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kategori Pagu Tinggi Periode Semester 1 2023		
224	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Predikat Sempurna Kualitas Perencanaan Penarikan Dana Satker Lingkup KPPN Baturaja Periode Semester 1 2023	Juli	KPPN Baturaja
225	BPS Kota Balikpapan	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Periode Semester I Tahun 2023 Predikat Sangat Baik (≥95)	Juli	KPPN Balikpapan
226	BPS Kota Sungai Penuh	Juara 1 Satuan Kerja Terbaik Semester I 2023 Kategori Pagu Anggaran Sedang	Juli	Plt. Kepala KPPN Sungai Penuh
227	BPS Kota Cirebon	Badan Publik kategori Menuju Informatif dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik	Juli	Komisi Informasi Kota Cirebon
228	BPS Kabupaten Kepulauan Talaud	Satker dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori SANGAT BAIK Periode Triwulan II Tahun 2023	Juli	KPPN Bitung
229	BPS Kabupaten Pakpak Bharat	Peringkat III kategori bendahara terbaik satker lingkup Pelayanan Perbendaharaan Negera Sidikalang periode Semester I TA 2023	Juli	KPPN Sidikalang
230	BPS Kabupaten Pasaman Barat	Partner Kolaboratif KPPN Lubuk Sikaping	Juli	KPPN Lubuk Sikaping
231	BPS Kabupaten Buton	Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Sedang	Juli	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
232	BPS Kabupaten Aceh Tenggara	IKPA Terbaik 3 Semester I	Juli	KPPN Kutacane
233	BPS Kabupaten Buton Utara	Peringkat 3 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Sedang	Juli	KPPN Bau-Bau
234	BPS Provinsi Maluku	Penghargaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon
235	BPS Kabupaten Kaimana	Peringkat I Komitmen dalam Menjaga Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Juli	KPPN Fak-Fak

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Triwulan II 2023 Kategori 2 s.d. 10 Miliar		
236	BPS Kabupaten Kaimana	Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Pelopor Digitalisasi Pembayaran pada Kebijakan Sistem Marketplace Pemerintah Periode Semester I Tahun 2023	Juli	KPPN Fak-Fak
237	BPS Kabupaten Kaimana	Penghargaan Sebagai Satuan Kerja Pelopor Digitalisasi UMKM pada Kebijakan Sistem Marketplace Pemerintah Periode Semester I Tahun 2023	Juli	KPPN Fak-Fak
238	BPS Kabupaten Bogor	Capaian Penggunaan Fitur Cash Management System (CMS) dengan kriteria banyaknya transaksi dan jumlah nilai transaksi	Juli	KPPN Bogor
239	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Tiga Satuan Kerja Terbaik dalam Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran	Juli	Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Mamuju
240	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Peringkat 1 Satuan Kerja dengan PPSPM Terbaik Kategori Jumlah SPM lebih dari 100 Periode Semester I TA 2023	Juli	Kepala KPPN Mamuju
241	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Peringkat 2 Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik: 99,18, Kategori Pagu DIPA Besar Periode Semester I TA 2023	Juli	Kepala KPPN Mamuju
242	BPS Kabupaten Seram Bagian Timur	Instansi Penyedia Data Untuk Perencanaan Pengembangan di Kabupaten Seram Bagian Timur	Juli	Kejaksaan Negeri Kabupaten Seram Bagian Timur
243	BPS Kabupaten Mamuju	Sebagai Satuan Kerja dengan PPSPM Terbaik kategori Jumlah SPM Lebih dari 100 Periode Semester I TA 2023	Juli	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Mamuju
244	BPS Kabupaten Katingan	Inisiator Transaksi Perdana DIGIPAY Kabupaten katingan	Juli	KPPN Sampit
245	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Koordinator Wilayah KL Prov. kalteng Semester 1 Tahun 2023	Juli	Kanwil DJPB

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
246	BPS Kabupaten Sumbawa	Piagam Penghargaan Penyelenggaraan Regsosek_2023	Juli	Bupati Sumbawa
247	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	Partisipasi dan kerjasama meningkatkan mutu pendidikan pada kegiatan magang kerja bagi peserta didik Genius College Angkatan XI TA 2022/2023	Juli	Genius College
248	BPS Kabupaten Pohuwato	Penghargaan dari KPPN Marisa sebagai Pengguna KKP s.d. Semester I 2023 Satker Lingkup KPPN Marisa	Juli	KPPN Marisa
249	BPS Kabupaten Lombok Timur	penghargaan dari KPPN Selong kepada BPS Kabupaten Lombok Timur sebagai Peringkat II (dua) Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semeser I Tahun 2023 Kategori Pagu DIPA diatas Rp. 10 Miliar	Juli	KPPN SELONG
250	BPS Provinsi Jawa Timur	IKPA	Juli	Kanwil DJPb
251	BPS Kabupaten Sidenreng Rappang	TERBAIK 1 KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PERIODE SEMESTER I TAHUN 2023	Juli	KPPN KOTA PARE-PARE
252	BPS Provinsi Jawa Barat	Satker Dengan Nilai IKPA Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2023	Juli	KPPN Bandung II
253	BPS Provinsi Jawa Barat	Satker Berpartisipasi Dalam Implementasi Kartu Kredit Pemerintah	Juli	KPPN Bandung II
254	BPS Kota Yogyakarta	Pembina Desa Cantik	Juli	Kelurahan Gunungketur Kota Yogyakarta
255	BPS Kabupaten Bantul	Satker yang memiliki Komitmen Tinggi, Berintergrasi, dan Berparsitipasi Aktif dalam Upaya Pencegahan Korupsi	Juli	Hotel Grand Rohan Jogja
256	BPS Provinsi Jambi	Penghargaan Nilai IKPA 100 Semester I 2023	Juli	KPPN Jambi
257	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Terbaik Pertama Penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Tahun 2022 lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Juli	Kanwil Direktorat Jenderala Perbendaharaan Provinsi Kep. Bangka Belitung
258	BPS Kabupaten Sijunjung	Penghargaan BRI Cabang Sijunjung	Juli	BRI CABANG SIJUNJUNG

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
259	BPS Kabupaten Bandung Barat	Partisipasi dalam Implementasi Kartu Kredit Pemerintah	Juli	KPPN Bandung II
260	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Terbaik Ketiga Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Periode Semester I Tahun 2023	Agustus	Kepala Kanwil DJPB NTT
261	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Mitra Pembangunan Dalam Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Agustus	Gubernur Kepulauan Riau
262	BPS Kabupaten Bima	Satuan Kerja dengan predikat BAIK dengan nilai IKPA 84 s.d 94,99	Agustus	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima
263	BPS Kabupaten Bima	Terbaik Ketiga Penggunaan Marketplace Digipay Satu Semester I 2023	Agustus	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima
264	BPS Kabupaten Bima	Terbaik Ketiga Penerima Transaksi Terbanyak Cash Management System (CMS) Semester I 2023	Agustus	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bima
265	BPS Kabupaten Bangka	Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Berkinerja Terbaik Kategori Pagu DIPA Sedang Periode Semester I Tahun 2023	Agustus	KPPN Pangkalpinang
266	BPS Kota Bekasi	Pengguna CMS Terbaik II	Agustus	KPPN Bekasi
267	BPS Kabupaten Kediri	Atas Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023	Agustus	KPPN KEDIRI
268	BPS Kota Kediri	Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satker Semester I Tahun 2023	Agustus	KPPN Kediri
269	BPS Kabupaten Toba Samosir	Piagam Penghargaan - Peringkat III - Penggunaan Digital Paymet Aplikasi Market Place	Agustus	KPPN Balige

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
270	BPS Kabupaten Toba Samosir	Piagam Penghargaan - Peringkat III - Pengelolaan Anggaran (IKPA) Kategori Pagu Sedang	Agustus	KPPN Balige
271	BPS Kabupaten Sinjai	Piagam Penghargaan Peringkat I Pengguna Aplikasi Digipay Dengan Jumlah Transaksi dan Volume Terbanyak oleh Satker pada Wilayah Pembayaran KPPN Sinjai Periode Semester I Tahun 2023	Agustus	Kepala KPPN Sinjai Arih Kurniadi
272	BPS Kota Dumai	Piagam Penghargaan sebagai Mitra dengan Luaran Terbaik pada Kegiatan Pemberdayaan Aparatur Desa dalam Pengelolaan Statistik Sektoral di Desa Cantik (Desa Cantik Statistik) Kota Dumai	Agustus	Koordinator Prodi Statistika FMIPA Universitas Riau
273	BPS Kabupaten Asahan	Peringkat ke 1 Kinerja Saker Mitra KKPN Tg. Balai Penggunaan UP,TUP Kartu Kredi Pemerintah Semester I Tahun 2023	Agustus	KKPN Tanjung Balai
274	BPS Kota Payakumbuh	Kontribusi dalam Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi di Kota Payakumbuh tahun 2023	Agustus	Pemerintah Kota Payakumbuh
275	BPS Kota Parepare	Penghargaan Partisipasi dalam Pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Muhammadiyah Makassar Tahun Akademik 2023/ 2024	Agustus	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Muhammadiyah Makassar
276	BPS Kota Parepare	Penghargaan Atas Peran Aktif dalam Penyediaan Data Statistik bagi Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan di Kota Parepare	Agustus	Pemerintah Kota Parepare
277	BPS Kabupaten Samosir	PERINGKAT II PENGGUNAAN DIGITAL PAYMENT PADA APLIKASI MARKET PLACE SEMESTER I TAHUN 2023	Agustus	KEPALA KPPN BALIGE
278	BPS Kota Padangsidimpuan	Nilai IKPA Sempurna sampai dengan Semester I tahun 2023	Agustus	KPPN Kota Padangsidimpuan
279	BPS Kabupaten Labuhan Batu Selatan	PERINGKAT III PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH TERBANYAK PERIODE S.D. TRIWULAN II 2023	Agustus	KEPALA KPPN RANTAUPRAPAT

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
280	BPS Kabupaten Waropen	Satuan Kerja dengan Penyampaian SPM Gaji Terbaik Semester I 2023	Agustus	KPPN Serui
281	BPS Kabupaten Purbalingga	Terbaik 4_Optimalisasi Pembayaran Non Tunai Kategori Jumlah Transaksi CMS Terbanyak Semester 1 2023	Agustus	KPPN Purwokerto
282	BPS Kabupaten Buton	Nilai akhir Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Sangat Baik Periode Semester I Tahun 2023	Agustus	Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
283	BPS Kabupaten Nganjuk	Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023 dengan Predikat Sangat Baik	Agustus	KPPN Kediri
284	BPS Kabupaten Pasaman Barat	Kiprah dan Andil dalam Mendukung Pembangungan Zona Integritas pada Polres Pasaman Barat melalui Pembinaan Statistik Sektoral	Agustus	Kepolisian Resor Pasaman Barat
285	BPS Kabupaten Boyolali	Penghargaan KONTRIBUSI PEMBAYARAN PAJAK INSTANSI PEMERINTAH-KPP BOYOLALI-31 AGT 2023	Agustus	KPP BOYOLALI
286	BPS Kabupaten Boyolali	Penghargaan KONTRIBUSI PENYEDIAAN DATA PERPAJAKAN-KPP BOYOLALI-31 AGT 2023	Agustus	KPP BOYOLALI
287	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	BPJS Ketenaga Kerjaan	Agustus	BPJS Ketenaga Kerjaan
288	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	IKPA Berpredikat Sangat Baik di wilayah KPPN Rengat Sem 1 2023	Agustus	KPPN Rengat
289	BPS Kabupaten Kuantan Singingi	Terbaik II IKPA Sem I 2023 Pagu Sedang	Agustus	KPPN Rengat
290	BPS Kota Tanjung Balai	Piagam Penghargaan Sebagai Peringkat Satu Kinerja Pelaksanaan APBN Satker Mitra KPPN Tanjung Balai Dengan Pagu Kelolaan Sedang Periode Semester I TA 2023	Agustus	KPPN Tanjungbalai
291	BPS Provinsi Aceh	Terbaik III Penggunaan CMS Terbaik Periode Semester I Tahun 2023	Agustus	KPPN Banda Aceh
292	BPS Kabupaten Kaimana	Peringkat I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan II 2022 Kategori Pagu 2 s.d. 10 Miliar	Agustus	KPPN Fak-Fak

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
293	BPS Kabupaten Garut	Satuan Kerja dengan Kualitas Laporan Pertangungjawaban (LPJ) Bendahara Pengeluaran Terbaik Lingkup KPPN Garut Semester I Tahun 2023	Agustus	Kepala KPPN Garut
294	BPS Kabupaten Puncak	Peringkat Ketiga Nilai IKPA Tertinggi Kategori Pagu Besar Semester I Tahun Anggaran 2023	Agustus	KPPN Timika
295	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Peraih Nilai IKPA Terbaik, Penilaian IKPA pada Kementrian/Lembaga Pengelola Pagu Tertinggi	Agustus	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
296	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Peringkat 3 Penilaian Laporan Keuangan	Agustus	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
297	BPS Provinsi Sulawesi Barat	Peringkat 3 Penilaian Kinerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP)	Agustus	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
298	BPS Kabupaten Mamuju	Peringkat ketiga penilaian kinerja penggunaan Digipay	Agustus	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
299	BPS Kabupaten Mamuju	Peringkat keempat penilaian kinerja penggunaan Cash Management System (CMS)	Agustus	Kantor wilayah direktorat jenderal perbendaharaan provinsi Sulawesi Barat
300	BPS Kabupaten Labuhan Batu Utara	Peringkat ke II penggunaan KKP terbanyak periode sd triwulan II 2023	Agustus	KPPN Rantau Prapat
301	BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	Terbaik II_IKPA Semester I Tahun 2023	Agustus	KPPN Tapaktuan
302	BPS Kabupaten Aceh Barat Daya	Terbaik II_Laporan Keuangan semester I 2023	Agustus	KPPN Tapaktuan
303	BPS Kabupaten Indragiri Hulu	Satuan kerja dengan capaian IKPA berpredikat sangat baik semester I 2023	Agustus	Kepala KPPN Rengat
304	BPS Provinsi Sulawesi Tenggara	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Semester I	Agustus	Direktorat Jendral Perbendaharaan Kementerian Keuangan
305	BPS Kabupaten Serang	Pembina Data atas Pelaksanaan Satu Data Kabupaten Serang	Agustus	Diskominfosantik Kabupaten Serang
306	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	Penyediaan Data Statistik Berkualitas untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Agustus	Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
307	BPS Kabupaten Dompu	Satuan Kerja BerPredikat "BAIK" Dengan Nilai IKPA anatar 84 s.d 94,99	Agustus	Kemenkeu Dirjen Perbendaharaan KPPN Bima
308	BPS Kabupaten Dompu	Terbaik KEDUA Penggunaan Market Place Semester I Tahun 2023	Agustus	Kemenkeu Dirjen Perbendaharaan KPPN Bima
309	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penghargaan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Terbaik II Kategori Satuan Kerja Pagu Besar (Lebih dari 20 Miliar Rupiah)	Agustus	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
310	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penghargaan sebagai UAPPA-W Terbaik Ketiga untuk Kategori Jumlah Satker 11 atau Lebih lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB	Agustus	Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
311	BPS Kota Baubau	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Sangat Baik Semester I Tahun 2023	Agustus	Kepala DJPB Sultra (Syarwan)
312	BPS Kabupaten Lombok Utara	Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Terbaik I Kategori Satker Pagu Sedang	Agustus	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mataram
313	BPS Provinsi Jawa Barat	Kepatuhan Pelaksanaan Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan Triwulan I Tahun Anggaran 2023	Agustus	KPPN Bandung II
314	BPS Kabupaten Trenggalek	Predikat Sangat Baik Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA/Satuan Kerja Periode Semester I Tahun 2023	Agustus	Kepala KPPN Kediri
315	BPS Kota Bima	Satker dengan Predikat Sangat Baik Nilai IKPA diatas 95	Agustus	Kepala Kantor KPPN Bima
316	BPS Kabupaten Banyumas	Terbaik II Optimalisasi Pembayaran Non Tunai Kategori Jumlah Transaksi CMS Terbanyak Semester I 2023	Agustus	KPPN Purwokerto
317	BPS Kabupaten Gunung Mas	Sertifikat Penghargaan (statistik sektoral)	Agustus	Dinas Sosial Gunung Mas
318	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	Implementasi CMS Terbaik II Semester I Tahun 2023	Agustus	KPPN Kotabaru Kalimantan Selatan
319	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	Implementasi Digipay Terbaik I Semester I Tahun 2023	Agustus	KPPN Kotabaru Kalimantan Selatan

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
320	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	Implementasi KKP Terbaik I Semester I Tahun 2023	Agustus	KPPN Kotabaru Kalimantan Selatan
321	BPS Kabupaten Bangka	Peringkat Kedua Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Berkinerja Terbaik Kategori Pagu DIPA Sedang Periode Semester I Tahun 2023	Agustus	KPPN Pangkalpinang
322	BPS Kabupaten Ende	Peringkat IV Satker Dengan Transaksi KKP Terbesar	Agustus	KPPN Ende
323	BPS Kabupaten Kupang	Kinerja Penyampaian SPM Gaji Induk Bulanan terbaik 3 semester 1	September	Kementrian Keuangan Kantor Wilayah DJPB Provinsi NTT
324	BPS Provinsi Kalimantan Timur	Peringkat I Transaksi Digipay Terbesar Semester I TA 2023	September	KPPN Samarinda
325	BPS Provinsi Kalimantan Timur	Peringkat II Capaian Output Terbaik Kategori Satker DIPA Pagu Sedang Semester I TA 2023	September	KPPN Samarinda
326	BPS Provinsi Kalimantan Timur	Peringkat II IKPA Terbaik Kategori Satker DIPA Pagu Sedang Semester I TA 2023	September	KPPN Samarinda
327	BPS Kabupaten Cilacap	Jumlah Transakasi Menggunakan DIGIPAY SATU Semester 1 Tahun 2023	September	KPPN
328	BPS Kabupaten Cilacap	Jumlah Transakasi CMS	September	KPPN
329	BPS Kabupaten Cilacap	Pemenuhan Target Transakasi Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah	September	KPPN
330	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Penghargaan Satuan Kerja Terbaik Dalam Membina Desa Cinta Statistik	September	Bupati OKU Timur
331	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Penghargaan Satker Penyedia Data Sosial Ekonomi Berkualitas dan Indikator Strategis	September	Bupati Ogan Komering Ulu Timur
332	BPS Kabupaten Simalungun	Satuan Kerja yang Telah Berpartisipasi dalam Pengelolaan Uang Persediaan melalui Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Periode Semester I Tahun 2023	September	Kementerian Keuangan - KPPN Pematang Siantar
333	BPS Kabupaten Jembrana	Piagam Dukungan Bupati Jembrana kepada BPS Kabupaten Jembrana sebagai dukungan pelaksanaan	September	Bupati Jembrana

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kegiatan Desa Cantik Warnasari 2023		
334	BPS Kota Tasikmalaya	Laporan Penatausahaan BMN sehingga masuk kategori 10 Satker dengan respon tercepat dan lengkap dalam pengiriman tembusan Catatan Atas Laporan BMN periode Semester I Tahun 2023	September	KPKNL Tasikmalaya
335	BPS Kabupaten Klungkung	Peringkat III Pengelolaan Rekening Satuan Kerja Lingkup Kementerian/Lembaga	September	KPPN Amlapura
336	BPS Kabupaten Klungkung	Peringkat III Satuan Kerja dengan Jumlah Transaksi Cash Management System (CMS)	September	KPPN Amlapura
337	BPS Kabupaten Garut	Piagam Penghargaan 10 Satker dengan Respon Tercepat dan Lengkap dalam Pengiriman Tembusan Catatan Atas Laporan BMN Periode Semester II Tahun 2022	September	Kepala KPKNL Tasikmalaya
338	BPS Kabupaten Gunung Kidul	Magang Siswa SMK Negeri 1 Tepus	September	SMKN 1 Tepus
339	BPS Kabupaten Lampung Barat	Satuan Kerja dengan Capaian Nilai IKPA untuk Indikator Penyerapan Anggaran Terbaik ke-2 Kategori Pagu Besar	September	KPPN Liwa
340	BPS Kabupaten Lampung Barat	Agro Room dari BPS Provinsi Lampung	September	Bupati Lampung Barat
341	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Piagam Penghargaan BPS Kabupaten Lampung Tengah sebagai Peringkat Kedua Satker Hasil Penilaian Penggunaan Digipay Semester 1 TA 2023	September	KPPN Metro
342	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Piagam Penghargaan BPS Kabupaten Lampung Tengah sebagai Peringkat Pertama Satker Hasil Penilaian Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Semester 1 TA 2023	September	KPPN Metro

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
343	BPS Kabupaten Lampung Tengah	Piagam Penghargaan BPS Kabupaten Lampung Tengah sebagai Peringkat Kedua Satker Hasil Penilaian PenggunaanCash Management System Bank BRI Terbaik Semester 1 Tahun 2023	September	KPPN Metro
344	BPS Kabupaten Ponorogo	Terbaik Ke-2 Atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 Teraktif Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah / Domestik (KKP/D)	September	KPPN MADIUN
345	BPS Kabupaten Ponorogo	Terbaik ke-3 Atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 Transaksi Cash Management System (CMS) Terbanyak	September	KPPN MADIUN
346	BPS Kabupaten Bangli	E_Partisipasi dalam Inovasi Cakra 154 bulan September 2023 dari KPPN Amlapura	September	KPPN Amlapura
347	BPS Kabupaten Bangli	E_Peringkat III Satuan Kerja dengan Jumlah Transaksi CMS di atas 1000 Transaksi Semester I Thn 2023	September	KPPN Amlapura
348	BPS Kabupaten Bangli	E_Peringkat Pertama Satker dengan Kualitas dan Penyampaian LK Smtr 1 untuk pagu antara 6 - 15 M dari KPPN Amlapura	September	KPPN Amlapura
349	BPS Provinsi Di Yogyakarta	Penyelenggara Bhakti Sosial Donor Darah Massal	September	Palang Merah Indonesia Kabupaten Bantul
350	BPS Kota Tasikmalaya	Penghargaan dari KPKNL - 10 Satker Respon Tercepat dan Terlengkap Penatausahaan BMN	September	KPKNL Tasikmalaya
351	BPS Kabupaten Karang Asem	Peringkat I Satuan Kerja dengan Jumlah Transaksi Cash Management System (CMS) di atas 1000 Transaksi Periode Semester I Tahun 2023	September	KPPN Amlapura
352	BPS Kabupaten Karang Asem	Peringkat II Satuan Kerja dengan Kualitas dan Penyampaian Laporan Keuangan Terbaik untuk Pagu DIPA 6 s.d. 15 Miliar Rupiah Periode Semester I Tahun 2023	September	KPPN Amlapura

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
353	BPS Kabupaten Barito Kuala	Pembimbing Dalam Program Desa Cinta Statistik	September	Desa Barambai Kolam Kanan
354	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik III Implementasi Cash Management System (CMS) Semester I Tahun 2023 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan	September	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
355	BPS Kabupaten Lebong	Satker Kinerja Terbaik Berdasarkan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN Periode Agustus 2023 Peringkat Kedua	September	KPPN Curup
356	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik I Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023 Kategori Kementerian/Lembaga Besar (Jumlah Satker 11 sampai dengan 29) Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan	September	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
357	BPS Kabupaten Bantul	Penyedia Data Bagi Perencanaan Pembangunan Kabuapten Bantul	September	Pemkab Bantul
358	BPS Kota Probolinggo	Satker Lingkup KPPN Bondowoso dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Semester I Tahun 2023	September	KPPN Bondowoso
359	BPS Kabupaten Karanganyar	Terbaik 3 Dalam implementasi Digitalisasi Pembayaran dengan menggungan CMS semester 1 Tahun 2023	September	KPPN Sragen
360	BPS Kabupaten Banjar	Sertifikat atas partisipasi sebagai Exhibitor Stand Expo Pembangunan pada Banjar Expo 2023	September	Bupati Banjar
361	BPS Kabupaten Soppeng	Penghargaan sebagai Peringkat Ketiga IKPA Triwulan III tahun 2023 Kategori Satker Pagu DIPA Diatas 7 Miliyar	Oktober	Kepala KPPN Watampone
362	BPS Kabupaten Berau	Apresiasi Dalam Rangka Pembinaan Desa Cantik (Cinta Statistik) pada Kampung Maluang Tahun 2023	Oktober	Kepala Desa Maluang Kabupaten Berau
363	BPS Kabupaten Gayo Lues	Piagam Penghargaan Peringkat Pertama (1) Satuan Kerja dengan Transaksi Menggunakan CMS Terbanyak di Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2023	Oktober	KPPN KUTACANE

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
364	BPS Kabupaten Pasaman	Terbaik I sebagai Satker dengan IKPA Terbaik Periode s.d TW III 2023	Oktober	KPPN Lubuk Sikaping
365	BPS Kabupaten Karimun	Peran sebagai Mitra Pembangunan dalam Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Oktober	Bupati Karimun
366	BPS Kabupaten Serdang Bedagai	Peringkat II Penyampaian laporan keuangan terlengkap sampai dengan triwulan III/2023	Oktober	KPPN Tebing Tinggi
367	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Terbaik Kedua Nilai IKPA Satker Lingkup KKPN Baturaja Kategori Pagu Tinggi Periode Triwulan 3 2023	Oktober	KPPN Baturaja
368	BPS Kabupaten Bolaang Mongondow	Implementasi Aplikasi Digipay Satu TERBAIK III Triwulan III	Oktober	Kepala KPPN Tipe A2 Kotamobagu
369	BPS Kota Sungai Penuh	Peringkat 1 Satuan Kerja dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Kategori Satker dengan Pagu Sedang (Rp1-6 miliar) Lingkup KPPN Sungai Penuh	Oktober	Plt. Kepala KPPN Sungai Penuh
370	BPS Kabupaten Kepulauan Talaud	Satker dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori ISTIMEWA Periode Triwulan III Tahun 2023	Oktober	KPPN Bitung
371	BPS Kabupaten Pacitan	PERINGKAT III SATKER PENGGUNA KKP	Oktober	KPPN PACITAN
372	BPS Kabupaten Tana Tidung	Pelopor Implementasi Digipay Satu Wilayah Kabupaten Tana Tidung	Oktober	KPPN TARAKAN
373	BPS Kabupaten Lamandau	Satker Kinerja Terbaik Triwulan III Kabupaten Lamandau	Oktober	KPPN Pangkalan Bun
374	BPS Kabupaten Buru Selatan	Satuan Kerja dengan Jumlah Transaksi Digipay Tertinggi Triwulan III Tahun 2023	Oktober	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon
375	BPS Kabupaten Pasaman Barat	Terbaik 1 KPA Satuan Kerja dengan Akurasi dan Kecepatan Penyelesaian Rekonsiliasi SAKTI-SPAN Terbaik Triwulan III Tahun 2023	Oktober	KPPN Lubuk Sikaping
376	BPS Kabupaten Aceh Tenggara	IKPA Terbaik 2 Triwulan III	Oktober	KPPN Kutacane

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
377	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penghargaa Juara Pertama Satuan Kerja Terbaik Kategori Implementasi Cash Management System (CMS) Periode Semester I Tahun 2023	Oktober	KPPN Tanjung
378	BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara	Penghargaan Juara Kedua Satuan Kerja dengan IKPA Terbaik Kategori Pagu >3,5 Miliar Periode Semester I Tahun 2023	Oktober	KPPN Tanjung
379	BPS Kabupaten Teluk Bintuni	Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Ternaik ke-3 Kategori D Triwulan III Tahun Anggaran 2023	Oktober	KPPN Manokwari
380	BPS Provinsi Maluku	Peringkat Terbaik ll Satuan Kerja dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Periode Triwulan lll Tahun 2023	Oktober	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon
381	BPS Provinsi Maluku	Peringkat Ketiga Pengelolaan BMN Kategori Continuous Improvement	Oktober	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon
382	BPS Kabupaten Malinau	Piagam Bupati Malinau atas Partisipasi dalam Irau ke 10 Tahun 2023	Oktober	Bupati Malinau
383	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	Piagam Penghargaan Sebagai Penyedia Data Indikator Strategis Melalui Aplikasi Si OKI OKE	Oktober	DISKOMINFO KABUPATEN OKI
384	BPS Kabupaten Ogan Komering Ilir	Piagam Penghargaan Statistik Sektoral Tingkat Kecamatan Melalui PERAHU KAJANG OKI	Oktober	SEKDA KABUPATEN OKI
385	BPS Kota Pagar Alam	MENGENAL OFFICIAL STATISTIK	Oktober	UNIVERSITAS LEMBAH DEMPO
386	BPS Kabupaten Garut	Piagam Penghargaan Sebagai Peringkat Kedua Satker dengan Laporan Keuangan Terbaik Lingkup KPPN Garut Semester 1 Tahun 2023	Oktober	Kepala KPPN Garut
387	BPS Kabupaten Bangli	E_Partisipasi dalam Inovasi Cakra 154 bulan Oktober dari KPPN Amlapura	Oktober	KPPN Amlapura
388	BPS Kota Palangka Raya	Piagam Apresiasi atas Sinergi Optimal dalam Pengelolaan Keuangan Negara Tingkat Kuasa Pengguna Anggaran	Oktober	KPPN Palangka Raya

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
389	BPS Provinsi Sumatera Utara	Satker Terbaik dalam Implementasi Pembayaran Digital (Cashless) pada KPPN Medan II Periode Tahun 2023	Oktober	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
390	BPS Provinsi Sumatera Utara	Satker Terbaik dalam Implementasi Pembayaran Digital (Cashless) pada KPPN Medan II Periode Tahun 2023	Oktober	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
391	BPS Provinsi Jawa Timur	IKPA	Oktober	Kanwil DJPb
392	BPS Kota Batu	Satker Terbaik Kategori Satker dengan Pengajuan SPM Gaji Induk Tercepat Periode Triwulan III TA 2023	Oktober	KPPN Malang
393	BPS Kabupaten Lebong	Satker Kinerja Terbaik Berdasarkan Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN Periode September 2023 Peringkat Kedua	Oktober	KPPN Curup
394	BPS Provinsi Bali	Penilaian LK UAPPA-W dan UAKPA BLU Semester I Tahun 2023 Kategori Penyampaian Paling Cepat dan Akurat	Oktober	Kanwil DJPb Provinsi Bali
395	BPS Kabupaten Sarolangun	Ucapan Terima Kasih sudah menjadi Responden Survei Indeks Risiko Terorisme (IRT)	Oktober	Badan Nasional Penangulangan Terorisme RI (BNPT RI)
396	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Laporan Keuangan Terbaik Kategori Satuan Kerja Kewenangan Kantor Daerah Periode Semester 1 TA 2023	Oktober	KPPN Tanjung Selor
397	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Peringkat Kedua Kategori LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik Periode Semester 1 TA 2023	Oktober	KPPN Tanjung Selor
398	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Peringkat Kedua Kategori Penggunaan Cash Management System (CMS) Periode Semester 1 TA 2023	Oktober	KKPPN Tanjung Selor
399	BPS Kabupaten Kepulauan Selayar	Terbaik Pertama IKPA Katergori Pagu Besar Triwula III TA 2023	Oktober	KPPN Benteng
400	BPS Provinsi Kepulauan Riau	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2023	November	Ketua Komisi Informasi Prov. Kepulaun Riau
401	BPS Kabupaten Tebo	Badan Publik Informatif	November	Komisi Informasi Provinsi Jambi
402	BPS Kota Tangerang Selatan	Satker dengan Perolehan nilai IKPA periode s.d. Triwulan III	November	KPPN Tangerang

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tahun 2023 dengan Predikat "SANGAT BAIK"		
403	BPS Kabupaten Kutai Barat	Pembina Data Statistik Sektoral	November	Bupati Kutai Barat
404	BPS Kabupaten Kerinci	KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2023 KATEGORI INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN/KOTA	November	KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI
405	BPS Kabupaten Kepulauan Anambas	Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2023	November	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
406	BPS Kabupaten Karimun	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau sebagai Badan Publik Informatif	November	Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
407	BPS Provinsi Sumatera Selatan	Sertifikat ISO 9001:2015	November	PT. CBQA GLOBAL
408	BPS Kabupaten Batang Hari	Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2023 Kategori Instansi Vertikal Kabupaten/Kota BPS Kabupaten Batang Hari sebagai Badan Publik INFORMATIF	November	Komisi Informasi Publik Provinsi Jambi
409	BPS Kabupaten Minahasa	Pemateri dalam kegiatan FGD Data Analytics Analisis Ekonomi Regional Periode Triwulan IV Tahun 2023	November	KPPN Manado
410	BPS Kabupaten Lingga	Terbaik Ketiga Satker Berprestasi atas Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang (Pagu Rp 5 Milyar s.d. Rp 25 Milyar) Periode Triwulan III 2023	November	KPPN Tanjungpinang
411	BPS Kabupaten Lingga	Penanganan dalam Penurunan Angka Kemiskinan di Kabupaten Lingga	November	Bupati Lingga
412	BPS Provinsi Lampung	Peringkat II Laporan Keuangan K/L Tingkat UAPPA-W Semester I Tahun 2023 Kategori UAPPA-W Sedang	November	Kepala Kanwil DJPb Provinsi Lampung
413	BPS Kabupaten Bengkulu Utara	Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	November	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
414	BPS Kabupaten Bengkulu Utara	Telah Aktif Dalam Mengisi Acara di Radio Kharisma Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2023	November	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara
415	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2023 Kategori Instansi Vertikal Kabupaten/Kota	November	KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI
416	BPS Kabupaten Kaur	Satker dengan Peringkat 3 dalam Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Triwulan III Tahun 2023	November	KPPN Manna
417	BPS Kota Sungai Penuh	Peringkat 1 Badan Publik INFORMATIF untuk Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-Provinsi Jambi Tahun 2023 Kategori Instansi Vertikal Kabupaten/Kota	November	Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi
418	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Certificate of Registration ISO 9001:2015 Quality Management Systems	November	CBQA Global
419	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Piagam Penghargaan untuk Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Sulawesi Utara sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori “Pelayanan Prima” Tahun 2023	November	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, H. Abdullah Azwar Anas
420	BPS Kabupaten Tangerang	Satker dengan perolehan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) periode s.d Triwulan III Tahun 2023 dengan predikat "Sangat Baik"	November	KPPN Tangerang
421	BPS Provinsi Bengkulu	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2023	November	MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
422	BPS Provinsi Bengkulu	Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Ketegori Badan Publik Vertikal Provinsi Bengkulu	November	Komisi Informasi Provinsi Bengkulu
423	BPS Provinsi Bengkulu	Sertifikat ISO 9001:2015 Quality Management System	November	System Certification ISO 9001
424	BPS Provinsi Jawa Barat	Instansi Vertikal Informatif Dalam E-Monev Kerbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat	November	Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
425	BPS Provinsi Banten	Badan Publik Informatif	November	Komisi Informasi Provinsi Banten

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
426	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	Mitra Pembangunan Dalam Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	November	Pemda Kabupaten Kepulauan Aru
427	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	Piagam Atas Inovasi Baku Kele Kalesang Desa Pakai Data	November	Pemda Kabupaten Kepulauan Aru
428	BPS Kabupaten Kepulauan Aru	Piagam atas Peran dalam Pembinaan Statistik	November	Universitas Pattimura Ambon
429	BPS Provinsi Aceh	Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kualifikasi INFORMATIF	November	Komisi Informasi Aceh
430	BPS Kota Pagar Alam	NARA SUMBER DATA KEMISKINAN, INFLASI DAN DESA CANTIK DI WILAYAH KOTA PAGAR ALAM	November	WALIKOTA PAGAR ALAM
431	BPS Kabupaten Kaimana	Peringkat I Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan III 2023 Kategori Pagu DIPA diatas 10 Miliar	November	KPPN Fak-Fak
432	BPS Kota Pagar Alam	VISUALISASI DATA DALAM INFOGRAFIS	November	UNIVERSITAS LEMBAH DEMPO
433	BPS Kabupaten Demak	Piagam Penghargaan Kinerja Cash Management System Terbaik I	November	KPPN Kudus
434	BPS Kabupaten Soppeng	Penghargaan Inovasi Pembuatan Tools Penginputan Data Statistik Pertanian Hortikultura (INHORTI) Tahun 2023	November	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturam Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng
435	BPS Kabupaten Sumbawa Barat	Pembinaan Statistik Sektoral Di Kabupaten Sumbawa Barat Dalam Kegiatan Pembinaan Desa Cinta Statistik (CANTIK)	November	Bupati Kabupaten Sumbawa Barat
436	BPS Kabupaten Semarang	WBK	November	Kemenpan RB
437	BPS Kabupaten Semarang	BPS Kabupaten Semarang sebagai unit kerja pelayanan berpredikat WBK 2023	November	Kemenpan RB
438	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Badan Publik Vertikal (Informatif)	November	Komisi Informasi
439	BPS Kabupaten Kotawaringin Barat	Turut memajukan dan memasyarakatkan Senam Tera Indonesia	November	Ketua Senam Tera Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat
440	BPS Kabupaten Nunukan	Piagam Penghargaan Jumlah Transaksi CMS Terbanyak Tahun Anggaran 2023 Lingkup KPPN Nunukan	November	KPPN Nunukan

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
441	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penghargaan sebagai Mitra Strategis Pendukung Asesmen Ekonomi dan Keuangan Daerah Terbaik Provinsi Nusa Tenggara Barat	November	Bank Indonesia
442	BPS Provinsi Jawa Timur	Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" Tahun 2023	November	KemenPAN RB
443	BPS Provinsi Jawa Timur	Sertifikasi ISO 9001:2015	November	CBQA Global
444	BPS Kabupaten Lahat	Kontribusi dalam penyedia data di Portal Satu Data Indonesia	November	DISKOMINFO
445	BPS Kabupaten Lahat	Kontribusi dalam penyediaan data laporan perekonomian tahunan	November	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
446	BPS Kabupaten Balangan	Juara 2 Satker Implementasi Digipay Semester I 2023	November	KPPN 151 Tanjung
447	BPS Kabupaten Balangan	Juara 3 Satker Implementasi CMS Semester I 2023	November	KPPN 151 Tanjung
448	BPS Kabupaten Jember	Peringkat 5 Satuan Kerja dengan Capaian Realisasi Kartu Kredit Pemerintah diatas 100%	November	KPPN Kabupaten Jember
449	BPS Kota Jambi	BPS KOTA JAMBI SEBAGAI BADAN PUBLIK INFORMATIF	November	KOMISI INFORMASI PROVINSI JAMBI
450	BPS Provinsi Jambi	Penghargaan KIP Instansi Vertikal Jambi	November	KIP Jambi
451	BPS Kabupaten Sarolangun	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kategori Informatif	November	Komisi Informasi Publik
452	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Wilayah Bebas Korupsi	November	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
453	BPS Kabupaten Majene	Upaya Pembinaan Desa Cantik di Totoli diberikan oleh Kelurahan Totoli	November	Kantor Lurah Totoli, Kec. Banggae, Kab. Majene
454	BPS Kabupaten Bintan	Keterbukaan informasi publik menuju informatif	November	Komisi Informasi Kepulauan Riau
455	BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur	Peringkat Kedua Pengelolaan Pagu, Realiasai dan Capaian Output K/L TA 2023 Lingkup provinsi NTT-Kategori Pagu Sedang	Desember	Kepala Kanwil DJPb

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
456	BPS Kabupaten Cilacap	BPS Kabupaten Cilacap sebagai Satker Terbaik Pertama dalam Pemanfaatan Digipay Tahun 2022	Desember	KPPN Cilacap
457	BPS Kabupaten Boalemo	Peringkat Pertama Satker Paling Aktif	Desember	KPPN Marisa
458	BPS Kabupaten Berau	Terbaik Kedua SATKER dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023 Kategori Pagu Kecil	Desember	Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Kalimatan Timur
459	BPS Kabupaten Berau	Pembinaan Statistik Sektoral yaitu Pembinaan Desa Cantik (Cinta Statistik) Pada Kampung Maluang Tahun 2023	Desember	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Berau
460	BPS Kota Langsa	Peringkat II Satuan Kerja Mitra KPPN Langsa Dengan Transaksi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Terbesar Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2023	Desember	KPPN Langsa
461	BPS Kota Langsa	Peringkat III Satuan Kerja Mitra KPPN Langsa Dengan Transaksi Menggunakan Platform Digipay Terbanyak Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2023	Desember	KPPN Langsa
462	BPS Kabupaten Ciamis	Pembina Data Statistik Berkualitas 2023	Desember	Diskominfo Kab. Ciamis
463	BPS Kabupaten Ciamis	Pembina Data Statistik Berkualitas di Kab. Pangandaran Tahun 2023	Desember	Diskominfo, Statistik dan Persandian Kab. Pangandaran
464	BPS Kabupaten Ciamis	Pembina Data Statistik Berkualitas di Kab. Ciamis Tahun 2023	Desember	Diskominfo Kab. Ciamis
465	BPS Kabupaten Ciamis	Kegiatan Ngarak Pataka "Sarakan Mapag Harepan" dalam rangka Hari Jadi ke-381 Tahun Kab. Ciamis pada Tahun 2023	Desember	Sekretariat Daerah Kab. Ciamis
466	BPS Kabupaten Ciamis	Instansi Penyedia Data Statistik Untuk Perencanaan Pembangunan Kab. Ciamis Tahun 2023	Desember	Bappeda Kab. Ciamis
467	BPS Kabupaten Ciamis	Instansi Penyedia Data Statistik Untuk Perencanaan Pembangunan Kab. Pangandaran Tahun 2023	Desember	Bappeda Kab. Pangandaran

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
468	BPS Kabupaten Klaten	Satuan Kerja Terbaik II kategori Penggunaan CMS sampai dengan TW II Tahun 2023	Desember	KPPN Klaten
469	BPS Kabupaten Ciamis	Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka RPJPD dan RPJMD Pemerintah Kab. Ciamis	Desember	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Ciamis
470	BPS Provinsi Kalimantan Timur	Penghargaan Terbaik I Kategori Vertikal Provinsi di Kalimantan Timur sebagai Badan Publik Informatif	Desember	Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur
471	BPS Kota Bekasi	Pelaksana Anggaran Terbaik II	Desember	KPPN
472	BPS Kabupaten Kolaka Utara	Peringkat III Satuan Kerja dengan Nilai IKPA Terbaik Tahun 2023	Desember	KPPN Kolaka
473	BPS Kabupaten Mojokerto	Stakeholder yang berperan aktif dalam Pengendalian Inflasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	Desember	Bupati Mojokerto
474	BPS Kabupaten Mojokerto	Satker Pengguna Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah dengan Nilai Transaksi Tertinggi tahun Anggaran 2023	Desember	KPPN Mojokerto
475	BPS Kabupaten Mojokerto	Stakeholder yang berperan aktif dalam Pengendalian Inflasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2023	Desember	Bupati Mojokerto
476	BPS Kabupaten Mojokerto	Satker Pengguna Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah dengan Nilai Transaksi Terbesar Semester 1 tahun Anggaran 2023	Desember	Kemenkeu
477	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Implementasi Transaksi CMS Tertinggi II Tingkat Wilayah TA 2023	Desember	Kanwil DJPB Provinsi Bangka Belitung
478	BPS Kota Kediri	Satker Terinteraktif Hai-CSO Periode Semester II TA 2023	Desember	KPPN Kediri
479	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat 3 Capaian IKPA 2023 pada Kategori Satuan Kerja dengan Pagu Besar	Desember	KPPN Tuban
480	BPS Kabupaten Tuban	Peringkat 2 Penyampaian dan Validasi Data LPJ Bendahara	Desember	KPPN Tuban

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
481	BPS Kabupaten Jembrana	Piagam Penghargaan Bupati Jembrana kepada BPS Kabupaten Jembrana atas Kerjasama dan komitmen pada pemanfaatan data statistik dan pembinaan statistik sektoral di wilayah Kabupaten Jembrana tahun 2023	Desember	Bupati Jembrana
482	BPS Kabupaten Pegunungan Bintang	Turut Menyukseskan dalam hal Berpartisipasi dalam Menyediakan Fasilitas Tempat Jaringan Internet Kepada Peserta Ujian Kompeherensif Manajemen Puskesmas Tahun 2023	Desember	Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang
483	BPS Kota Padang	Instansi Pembina dalam penilaian program evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral 2023	Desember	Walikota Padang
484	BPS Kabupaten Ogan Komering Ulu	Peringkat Pertama Satuan Kerja Dengan Nilai IKPA Terbaik Kategori Pagu Besar Tahun Anggaran 2023	Desember	KPPN Baturaja
485	BPS Provinsi Lampung	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Kategori Instansi Vertikal Provinsi Lampung sebagai Badan Publik Informatif	Desember	Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung
486	BPS Kabupaten Pemalang	Satuan Kerja Pengguna Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan nilai transaksi tertinggi	Desember	KPPN Tegal
487	BPS Kabupaten Flores Timur	Piagam Penghargaan sebagai Satker dengan Kategori Transaksi Digipay Terbaik Periode Semester II TA 2023	Desember	KPPN Larantuka
488	BPS Kabupaten Flores Timur	Penghargaan sebagai Satker dengan Kategori Transaksi Gidipay Terbaik Semester II TA 2023	Desember	KPPN Larantuka
489	BPS Kabupaten Bengkulu Utara	Pembina Data Statistik Sektoral Dalam Kegiatan Satu Data Indonesia (SDI)	Desember	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara
490	BPS Kota Parepare	Satker dengan Nilai Profil Pengelolaan Anggaran dan Belanja Pemerintah Pusat Terbaik Tahun 2023 Kategori: Bagian Anggaran Badan Pusat Statistik	Desember	KPPN Parepare

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
491	BPS Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Satker Mitra Kerja KPPN Kuala Tungkal Pengguna Transaksi CMS Via BPG Teraktif	Desember	KPPN Kuala Tungkal
492	BPS Kabupaten Pinrang	Piagam penghargaan dari KPPN Tipe A1 Pare-Pare sebagai terbaik ke-3 Satker dengan Nilai Profil Pengelolaan Anggaran dan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2023	Desember	KPPN Tipe A1 Pare-Pare
493	BPS Kabupaten Pinrang	Piagam pelestarian lingkungan dengan mendaur ulang limbah kertas periode tahun 2022	Desember	PT. UWAAA DAUR ULANG
494	BPS Kabupaten Ngada	Implementasi Digital Payment (DIGIPAY) Terbaik I Lingkup KPPN Ruteng	Desember	KPPN Tipe A2 Ruteng
495	BPS Kabupaten Sumba Barat Daya	Satker Terbaik Pengguna KKP terbaik Periode Januari s.d November 2023	Desember	KPPN Waingapu
496	BPS Kabupaten Barito Timur	Penghargaan Peringkat Ketiga Atas Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran TA 2023	Desember	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Buntok
497	BPS Kabupaten Barito Timur	Peringkat Pertama Atas Penyelesaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tahun Anggaran 2023	Desember	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Buntok
498	BPS Kabupaten Padang Lawas	Penyerapan Anggaran Tertinggi Kategori Satker dengan Pagu Sedang Periode Anggaran sampai TW3 2023	Desember	KPPN Padang Sidempuan
499	BPS Provinsi Sulawesi Utara	Piagam Penghargaan sebagai Mitra Strategis Terbaik dalam mendukung Asesmen Ekonomi dan Keuangan Daerah	Desember	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Andry Prasmuko
500	BPS Kabupaten Samosir	PERINGKAT KETIGA PENGGUNAAN DIGITAL PAYMENT PADA APLIKASI MARKET PLACE MITRA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGERA BALIGE PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2023	Desember	KEPALA KPPN BALIGE
501	BPS Kota Padangsidimpuan	Nilai IKPA Sempurna sampai dengan Triwulan III tahun 2023	Desember	KPPN Kota Padangsidimpuan
502	BPS Kabupaten Batu Bara	Sertifikat EPSS	Desember	Bupati Batu Bara

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
503	BPS Kabupaten Batu Bara	Pembina Desa Cantik	Desember	Bupati Batu Bara
504	BPS Kabupaten Batu Bara	Penilai Badan Penyelenggara Statistik Sektoral (EPSS)	Desember	Bupati Batu Bara
505	BPS Kota Pariaman	sertifikat penghargaan kepada BPS Kota Pariaman atas peran aktif dalam pembinaan sektoral pada organisasi perangkat Daerah dalam Lingkungan Kota Pariaman tahun 2023	Desember	Dinas Komunikasi dan informasi
506	BPS Kabupaten Temanggung	Terbaik 2 Satker Terbaik dalam Implementasi Digipay dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Tahun 2023	Desember	KPPN Magelang
507	BPS Kabupaten Boyolali	Penghargaan Terbaik I CMS (Triwulan III 2023)	Desember	KPPN KLATEN
508	BPS Kabupaten Boyolali	Penghargaan Terbaik I CMS (Triwulan III 2023)-KPPN KLATEN- 13 DES 2023	Desember	KPPN KLATEN
509	BPS Kabupaten Deli Serdang	Peringkat 2 Kategori Satuan Kerja dengan Jumlah Transaksi CMS Terbanyak	Desember	KPPN Tebing Tinggi
510	BPS Kota Dumai	Piagam Penghargaan Atas Kontribusi Melakukan Pembinaan Statistik Sektoral kepada OPD-OPD di lingkungan pemerintahan Kota Dumai Tahun 2023	Desember	Sekretaris Daerah Kota Dumai
511	BPS Kota Dumai	Piagam Penghargaan Atas Kontribusi dalam Memberikan Rekomendasi Kegiatan Statistik kepada OPD-OPD di lingkungan pemerintahan Kota Dumai Tahun 2023	Desember	Sekretaris Daerah Kota Dumai
512	BPS Kota Dumai	Piagam Penghargaan Sebagai Instansi yang berkontribusi sebagai penyedia data berkualitas untuk dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pengemngunan di lingkungan pemerintahan Kota Dumai Tahun 2023	Desember	Sekretaris Daerah Kota Dumai
513	BPS Kota Magelang	Satuan Kerja Terbaik Pertama Penyaji Laporan Keuangan Kategori Pagu Sedang	Desember	KPPN Magelang

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
514	BPS Kota Magelang	Satuan Kerja Terbaik Pertama Implementasi Digipay dengan Jumlah Transaksi Terbanyak Tahun 2023	Desember	KPPN Magelang
515	BPS Provinsi Sumatera Utara	Kinerja Sangat Baik pada Tahun 2022-2023 Administrasi BMN yang Handal untuk wilayah kerja Kanwil DJKN SUMUT	Desember	Kanwil DJKN SUMUT
516	BPS Provinsi Sumatera Utara	Peringkat 1 Laporan Keuangan (LK) unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Tahun 2022 Terbaik	Desember	KANWIL DJPB PROVINSI SUMUT
517	BPS Provinsi Maluku	Peringkat III Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Tahun 2023	Desember	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku
518	BPS Provinsi Gorontalo	Meraih Predikat INFORMATIF pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023	Desember	Komisi Informasi Provinsi Gorontalo
519	BPS Kota Gorontalo	Penghargaan Bappeda Kota Gorontalo Atas Kinerja Dalam Membantu Pelaksanaan Satu Data Indonesia Kota Gorontalo	Desember	Bappeda Kota Gorontalo
520	BPS Kota Gorontalo	Penghargaan Bappeda Kota Gorontalo Atas Kinerja Dalam Membantu Penyediaan Data Untuk Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan	Desember	Bappeda Kota Gorontalo
521	BPS Kota Pagar Alam	Nara Sumber Kegiatan Rapat High level Terkait perhitungan Nilai NTP dan Arus Barang dan Jasa Kota Pagar Alam	Desember	Walikota Pagar Alam
522	BPS Kota Pagar Alam	PARTISIPASI DAN KONTRIBUSINYA PADA KEGIATAN RAPAT PENGENDALIAN INFLASI-INDEKS PERKEMBANGAN HARGA KOTA PAGAR ALAM	Desember	WALIKOTA PAGAR ALAM
523	BPS Kabupaten Aceh Timur	Satuan kerja mitra KPPN Langsa dengan penyerapan anggaran terbaik sampai dengan triwulan III tahun 2023 kategori pagu DIPA Besar	Desember	KPPN Langsa
524	BPS Kota Gorontalo	Penghargaan DKPP Kota Gorontalo Atas Dukungan dan Koordinasi dalam penyediaan	Desember	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian Kota Gorontalo

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		data pertanian di Kota Gorontalo Tahun 2023		
525	BPS Provinsi Riau	Peringkat Menuju Informatif kategori Badan publik instansi vertikal Provinsi Riau 2023	Desember	Komisi Informasi Provinsi Riau
526	BPS Kabupaten Kolaka Timur	Peringkat I Satuan Kerja dengan Penyampaian LPJ Bendahara Terbaik Tahun 2023	Desember	KPPN Kolaka
527	BPS Kabupaten Lahat	Pembina Statistik Sektoral	Desember	DisDukcapil
528	BPS Kabupaten Seram Bagian Timur	Instansi Penyedia Data Untuk Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur	Desember	Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
529	BPS Kabupaten Banjarnegara	Penghargaan dari KPPN Kabupaten Banjarnegara diberikan kepada BPS Kabupaten Banjarnegara sebagai Peringkat Pertama Satuan Kerja Teraktif Pengguna Uang Persediaan Pada Platform Digipay Tahun 2023, 19 Desember 2023.	Desember	KPPN Banjarnegara
530	BPS Kabupaten Banjarnegara	Penghargaan sebagai Satuan Kerja Dengan Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik Ketiga	Desember	KPPN Banjarnegara
531	BPS Kabupaten Lahat	Kontribusi sebagai penyedia data PL K - UMKM	Desember	Dinas Koperasi
532	BPS Kabupaten Klaten	Terbaik Kedua Satker Terbaik Kategori Penggunaan CMS s.d Triwulan III Tahun 2023	Desember	Kementerian Keuangan DIrektorat Jendral Perbendaharaan KPPN Tipe A1 Klaten
533	BPS Kabupaten Buton Utara	Peringkat 3 Satuan Kerja Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 (IKPA, Pertanggungjawaban Keuangan, dan Digitalisasi Pembatasan) Kategori Pagu Sedang	Desember	KPPN Bau-Bau
534	BPS Kabupaten Buton Utara	Satuan Kerja dengan nilai IKPA 100 Tahun Anggaran 2023	Desember	KPPN Bau-Bau
535	BPS Kabupaten Aceh Barat	Satuan Kerja Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Terbaik Tahun Anggaran 2023	Desember	KPPN Meulaboh

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
536	BPS Kabupaten Banyuwangi	Peringkat 3 Satker Dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik Kategori Pagu Besar Tahun 2023	Desember	KPPN Banyuwangi
537	BPS Kota Tangerang	Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Kota Tangerang	Desember	Pemerintah Kota Tangerang
538	BPS Kota Palangka Raya	Narsum FGD Data Analytics Analisis Peran Belanja Pemerintah Dalam Pembentukan Angka Perekonomian Kota Palangka Raya	Desember	KPPN Palangka Raya
539	BPS Kota Pagar Alam	Terbaik Ketiga Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang (2 s.d 10 M) Tahun Anggaran 2023 dengan nilai 98,59	Desember	KPPN Lahat
540	BPS Kota Pagar Alam	Terbaik Ketiga Perolehan Nilai IKPA Kategori Pagu Sedang (2 s.d 10 M) Tahun Anggaran 2023 dengan Nilai 98,59	Desember	KPPN Lahat
541	BPS Kota Pagar Alam	Terbaik Pertama Frekuensi Kehadiran Sosialisasi/Bimtek Tertinggi Tahun Anggaran 2023 dengan Persentase Kehadiran 100 %	Desember	KPPN Lahat
542	BPS Kota Sibolga	Satuan Kerja dengan Capaian IKPA Berpredikat Sangat Baik Tahun 2023	Desember	KPPN Sibolga
543	BPS Kabupaten Kebumen	Penghargaan Satker Dengan Realisasi Anggaran Kategori Pagu Diatas Rp20 Milyar Lingkup KPPN Purworejo Tahun Anggaran 2023	Desember	KPPN Purworejo
544	BPS Kabupaten Kebumen	Penghargaan Satker Dengan KKP Terbaik Lingkup KPPN Purworejo Tahun Anggaran 2023	Desember	KPPN Purworejo
545	BPS Kabupaten Kebumen	Penghargaan Satker dengan Digipaysatu Terbaik Lingkup KPPN Purworejo Tahun Anggaran 2023	Desember	KPPN Purworejo
546	BPS Provinsi Jawa Tengah	Sertifikasi ISO 90001:2015	Desember	CBQA Global
547	BPS Provinsi Jawa Tengah	Predikat Menuju Informatif dengan nilai 87,88	Desember	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
548	BPS Kabupaten Lombok Timur	penghargaan dari Bupati Lombok Timur sebagai Kontributor Utama Penyediaan Data Strategis Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lombok Timur Pada Tahun 2023	Desember	Bupati Lombok Timur
549	BPS Kabupaten Magelang	Satker Terbaik Kedua Penyaji Laporan Keuangan Tahun 2023 Kategori Pagu Besar (Diatas 10 miliar)	Desember	KPPN Magelang
550	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	Peran Serta Melakukan Survei IHK dan Perhitungan Angka Inflasi secara tepat dan komprehensif	Desember	Gubernur
551	BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat	Penghargaan sebagai Pengguna Digital Payment dengan Transaksi Terbesar Tahun 2023	Desember	Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Barat
552	BPS Kabupaten Luwu Utara	Piagam Penghargaan sebagai wujud apresiasi atas peran aktif dalam Penyediaan Data Statistik bagi Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023	Desember	Bupati Luwu Utara
553	BPS Kabupaten Luwu Utara	Piagam Penghargaan sebagai wujud apresiasi atas peran aktif dalam Penyediaan Data Statistik bagi Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023	Desember	Kepala Bapperida Kabupaten Luwu Utara
554	BPS Kabupaten Lahat	Kontribusi sebagai mitra kerja	Desember	Palcomtech
555	BPS Kabupaten Lahat	Pembina Pojok Statistik	Desember	Universitas Serelo Lahat
556	BPS Kabupaten Aceh Tamiang	Peringkat I Satker Mitra KPPN dengan Penyerapan Angaran Terbaik Sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 Kategori Pagu DIPA Sedang	Desember	KPPN Langsa
557	BPS Kota Gorontalo	Penghargaan Walikota Gorontalo Atas Dukungan Dalam Penyediaan Data Dalam Pengendalian Inflasi Tahun 2023	Desember	Walikota Gorontalo
558	BPS Kabupaten Lahat	IKPA Kategori Baik	Desember	KPPN Lahat
559	BPS Kabupaten Lahat	Pengguna Layana HAI-CSO teraktif	Desember	KPPN Lahat

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
560	BPS Kabupaten Lahat	Mitra Kerja Pendukung Penyaluran Wesel POS Terbesar 2023	Desember	PT POS Lahat
561	BPS Kabupaten Sidenreng Rappang	SATUAN KERJA DENGAN NILAI PROFIL PENGELOLAAN ANGGARAN DAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TERBAIK II TAHUN 2023 KATEGORI : BAGIAN ANGGARAN BADAN PUSAT STATISTIK	Desember	KPPN KOTA PARE-PARE
562	BPS Kabupaten Halmahera Utara	Sertifikat atas Partisipasi sebagai Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka	Desember	Universitas Khairun
563	BPS Provinsi Papua Barat	Regional Statistic dan Financial Data Collaborator	Desember	Kanwil DJPB Provinsi Papua Barat
564	BPS Kabupaten Buol	Piagam Penghargaan Pembinaan Statistik Sektoral 2023	Desember	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Buol
565	BPS Kabupaten Buol	Piagam Pembinaan Rekomendasi Kegiatan Statistik Tahun 2023	Desember	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol
566	BPS Kabupaten Lahat	Mitra Kerja Pengguna Jasa Hotel Bukit Serelo Terbanyak tahun 2023	Desember	Hotel Bukit Serelo Lahat
567	BPS Provinsi Kalimantan Selatan	Terbaik II Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 untuk Kategori Besar (Jumlah Satker lebih dari 10)	Desember	Gubernur Kalimantan Selatan dan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
568	BPS Provinsi Bali	Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Badan Publik Dengan Kategori Informatif	Desember	Komisi Informasi Provinsi Bali
569	BPS Kabupaten Lahat	Pembina Statistik Sektoral	Desember	DISKOMINFO
570	BPS Kabupaten Lahat	Pembina Statistik Sektoral di BAPPEDA	Desember	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
571	BPS Kabupaten Lahat	Sebagai satuan kerja pembukaan rekening tenaga kontrak terbanyak	Desember	Bank Syariah Mandiri
572	BPS Kabupaten Tanah Bumbu	Implementasi Digitalisasi Pembayaran Terbaik I Semester II Tahun 2023	Desember	KPPN Kotabaru Kalimantan Selatan

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
573	BPS Provinsi Kalimantan Utara	Capaian Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah Terbaik	Desember	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi kalimantan utara
574	BPS Kabupaten Blitar	Terbaik II sebagai Satuan Kerja Terbaik II dalam Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah, Digipay, dan Cash Management System Periode Tahun 2023.	Desember	KPPN Blitar
575	BPS Kabupaten Kota Baru	Peringkat II Implementasi Digitasi Pembayaran Semester II Tahun 2023	Desember	KPPN Kotabaru
576	BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kategori Implementasi Transaksi CMS Tertinggi ke II Tingkat Wilayah TA 2023	Desember	Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
577	BPS Kabupaten Grobogan	Satker berkinerja terbaik penyampaian LPJ melalui aplikasi Sakti	Desember	KPPN Purwodadi
578	BPS Kabupaten Grobogan	Implementasi Digipay	Desember	KPPN Purwodadi
579	BPS Kabupaten Lamongan	Peringkat III (tiga) Kategori Satuan Kerja Besar (pagu DIPA lebih dari 10 Miliar) Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV Tahun 2023 Satuan Kerja K/L di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bojonegoro	Desember	Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
580	BPS Kabupaten Lamongan	Sebagai Satuan Kerja Kementrian Negara/Lembaga dengan Capaian IKPA berpredikat Sangat Baik Tahun 2023	Desember	Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
581	BPS Kota Pariaman	Sertifikat penghargaan kepada BPS Kota Pariaman Sebagai pembina Program Desa Cinta Statistik 2023Sehingga Desa Kampung Gadang Kota pariaman Memperoleh 10 Besar Tingkat Nasional yang di selenggarakan oleh BPS RI	Desember	Walikota Pariaman
582	BPS Kabupaten Alor	Satuan Kerja dengan Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tercepat untuk Tahun Pajak 2023 di Kabupaten Alor	Desember	KP2KP Kalabahi

No.	Nama Satker	Nama Penghargaan	Bulan Perolehan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
583	BPS Kabupaten Kendal	Satker Terbaik dalam Pembangunan ZI untuk WBK 2023	Desember	Kemenpan RB
584	BPS Kabupaten Gowa	Satuan Keja dengan transaksi CMS terbanyak keempat tahun 2023	Desember	KPPN Makassar 2

Daftar Inovasi BPS Menurut Satuan Kerja Tahun 2023

No.	Satker	Judul Inovasi	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1	BAGIAN TATA USAHA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Aplikasi SIMODIS (Sistem Informasi Mobil/Motor Dinas)	Aplikasi SIMODIS digunakan oleh Bagian Umum dan seluruh pegawai BPS Provinsi NTT untuk menginput data pemegang kendaraan dinas (mobil/motor) dan menginput jumlah penggunaan BBM dari setiap pegawai. Output dari aplikasi ini adalah data rekap penggunaan BBM kendaraan dinas, SPJ penggunaan BBM pegawai dan penyimpanan bukti penggunaan BBM secara digital.
2	BAGIAN TATA USAHA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Aplikasi SERASI (Sistem Manajemen Kinerja Terintegrasi)	Aplikasi SERASI adalah sebuah tools yang dapat mempermudah dan mempercepat proses monitoring dan evaluasi capaian realisasi kinerja yang terintegrasi untuk semua kegiatan di BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. Aplikasi ini melengkapi penggunaan KipApp untuk monitoring pencapaian kinerja BPS Kabupaten/Kota. Output dari aplikasi SERASI berupa matriks rencana kerja yang menyeluruh dan detail dari BPS Provinsi untuk BPS Kabupaten/Kota (top-down) dalam periode waktu bulanan dan tahunan.
3	BIDANG INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK PROVINSI DKI JAKARTA	APELO : Aplikasi PEnunjuk LOkasi	APELO (Aplikasi PEnunjuk LOkasi) merupakan aplikasi gratis yang dapat digunakan untuk menampilkan batas wilayah (format KML), menampilkan titik tagging (format Geojson harus disertai field id, nama, latitude, dan longitude) serta dapat menampilkan rute menuju titik yang diinginkan (dengan bantuan Maps). Aplikasi ini menggunakan basemap dari openstreetmap.
4	BIDANG INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	SISBRO	Sistem Informasi Manajemen Program Perubahan. Aplikasi ini merupakan tools untuk melakukan manajemen program perubahan bagi change agent network di BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

No.	Satker	Judul Inovasi	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
5	BIDANG INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Paspor PL-KUMKM	Pantau Status Progres Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM merupakan inovasi berbasis web untuk memonitoring progres pendataan lapangan yang dilakukan oleh petugas, yang ditampilkan melalui dashboard monitoring.
6	BIDANG INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Monika ST2023	Sistem informasi untuk monitoring anomali dan konfirmasi error pengolahan ST2023.
7	BIDANG INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Paspor ST2023	Sistem Informasi untuk pelaporan progres pendataan ST2023. Melalui aplikasi ini petugas melaporkan progres pendataan melalui web browser kemudian ditampilkan secara realtime melalui dashboard pendataan.
8	BIDANG INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Survei Kepuasan Masyarakat BPS Provinsi NTT	Website Survei Kepuasan Masyarakat merupakan website yang dapat digunakan oleh pengguna layanan data BPS Provinsi NTT (masyarakat, instansi/dinas, mahasiswa, swasta, dll) untuk memberikan penilaian terhadap kinerja pelayanan data yang diterima. Data dari website ini digunakan oleh BPS Provinsi NTT untuk mengevaluasi kinerja pelayanan publik secara periodik sehingga dapat terus meningkatkan kepuasan pengguna data BPS.
9	BIDANG INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Aplikasi Android Kamus EPSS	Aplikasi Android Kamus EPSS adalah aplikas android yang menampilkan penjelasan rinci tentang domain, aspek, dan indikator yang digunakan untuk kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) sesuai Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022. Aplikasi ini dapat diunduh oleh publik, khususnya digunakan oleh Instansi/Dinas Pemerintah untuk mempermudah pelaksanaan EPSS di instansi masing-masing.

No.	Satker	Judul Inovasi	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
10	BIDANG INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	Sasando (Sarana Sharing Informasi dan Dokumentasi IPDS)	Sasando adalah google sites yang digunakan sebagai media sharing informasi dan dokumentasi kegiatan dari Tim IPDS. Sasando digunakan oleh BPS Kabupaten/Kota untuk mendapatkan informasi terkait jadwal kegiatan, file pedoman kegiatan, monitoring kegiatan, sarana komunikasi (QnA) dan dokumentasi diskusi yang mendetail dan rinci. Sasando diharapkan dapat membantu Tim IPDS Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk melaksanakan setiap kegiatan.
11	BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI PROVINSI JAWA BARAT	exim32	exim32 adalah Dashboard Visualisasi Data Ekspor dan Impor Jawa Barat dengan menggunakan library streamlit python.
12	BIDANG STATISTIK PRODUKSI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Akar Bahar (Aplikasi Komoditas Pertanian Berbahasa Lokal dan Bergambar)	Akar Bahar alias Aplikasi Komoditas Pertanian Berbahasa Lokal dan Bergambar, merupakan sebuah aplikasi yang berisi direktori seluruh komoditas pertanian, dilengkapi dengan kode, nama lokal, gambar, dan keterangan-keterangan lain yang nantinya akan memudahkan seluruh petugas lapangan ST2023.Karna akan digunakan secara nasional oleh seluruh petugas ST2023, Akar Bahar dibranding sebagai Aplikasi ST2023-Kode.
13	KAB. BANGKA	Aplikasi Alokasi SPK ST2023	Aplikasi berbasis google spreadshet untuk mengalokasikan beban kerja petugas ST2023 pada bulan Juni dan Juli 2023 melalui link http://s.bps.go.id/Alokasi-SPK-ST2023 sehingga beban tugas bisa merata dan tercapai 120 KK Tani per bulan atau 240 KK biasa
14	KAB. BANGKA	Satu Pegawai Satu Pembinaan (SBST)	Inovasi pembinaan Statistik Sektoral dalam rangka meningkatkan literasi statistik bagi seluruh OPD dan Desa/Kelurahan melalui Setiap Pegawai melakukan pembinaan minimal 1 OPD atau 1 desa/kelurahan sehingga Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten bangka meningkat dan Program Desa Cantik dapat dirasakan oleh seluruh Desa/Kelurahan

No.	Satker	Judul Inovasi	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
15	KAB. BANGKA	Aplikasi Perbaikan Error ST2023	Aplikasi berbasis google spreadshet untuk memberikan konfirmasi perbaikan kesalahan, ketidakkonsistenan dan ketidakwajaran data ST2023 setelah melalui proses pengolahan ST2023 melalui link http://s.bps.go.id/Alokasi-SPK-ST2023 sehingga mempermudah PPL dan PML mengisi konfirmasi isian dokumen tersebut
16	KAB. BANGKA	Aplikasi Tim ST2023	Aplikasi berbasis glide ini digunakan oleh Koseka dan PML untuk mengatur jadwal pertemuan Tim ST2023 melalui link https://sedapp-online.glide.page sehingga bisa diketahui lokasi dan jadwal pertemuan tim secara cepat dan tepat
17	KAB. BANGKA	Dokumentasi Pelatihan ST2023	Sistem Dokumentasi Pelatihan ST2023 untuk mengumpulkan Hasil Scan berkas-berkas administrasi SPJ pelatihan, laporan panitia per kelas, laporan inda, kasus batas, dan foto dan video kegiatan selama pelatihan ST2023 yang bisa diakses pada link http://s.bps.go.id/1901PelatihanST2023
18	KAB. BANGKA	Aplikasi Sedapp Online	Sistem Pencacahan Survei Perusahaan Perkebunan Bulanan secara Online menggunakan aplikasi glide melalui link aplikasi https://sedapp-online.glide.page sehingga survei bisa dilakukan secara paperless
19	KAB. BANGKA	Virtual Agricultural Room ST2023	Website sederhana berbasis google site menampikan Tujuan dan Manfaat serta cakupan ST2023 melalui link http://s.bps.go.id/VIRGO-BANGKA dan menu rekrutmen, galeri ST2023, Pelatihan dan Pelaksanaan kegiatan ST2023
20	KAB. BANGKA	Dokumentasi ST2023	Sistem penyimpanan kegiatan selama kegiatan Rekrutmen dan pengumpulan data ST2023 serta kegiatan verifikasi hasil groundcheck yang bisa diakses pada link http://s.bps.go.id/1901_Dokumentasi_ST2023

No.	Satker	Judul Inovasi	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
21	KAB. BANGKA	Aplikasi IKPA Bangka	Aplikasi untuk mendukun pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPS Kabupaten Bangka terdiri dari Indikator Kualitas Perencanaan, Kualitas Pelaksanaan, dan Kualitas Hasil yang bisa diakses pada link https://sites.google.com/view/ikpa1901
22	KAB. BANGKA	Aplikasi Dokumentasi KBLI	Aplikasi berbasis glide ini digunakan untuk merangkum KBLI 5 digit yang paling sering muncul di Kabupaten Bangka berdasarkan kegiatan Sakernas, VIMK, dan Regsosek sehingga mempermudah petugas menemukan kode KBLI 5 digit yang bisa diakses pada link https://s.bps.go.id/KBLI-BANGKA
23	KAB. BANJAR	BAKIAK (Basis Data Kesehatan Gizi Anak)	BAKIAK (Basis Data Kesehatan Gizi Anak) adalah aplikasi yang dikembangkan dalam rangka kegiatan Desa Cantik (Cinta Statistik) Kabupaten Banjar di Desa Indrasari Kecamatan Martapura yang bertujuan untuk mengelola data kesehatan dan gizi anak guna mendukung pencegahan stunting. Aplikasi dapat diakses pada tautan https://webapps.bps.go.id/banjarkab/bakiak/
24	KAB. KAUR	SEIJEAN	Sistem Informasi Jumlah dan Jenis Usaha Pertanian Perorangan ST2023 Kabupaten Kaur. https://seijean-st2023.glide.page
25	KAB. SIKKA	SIDAVI (Sikka Data View)	SIDAVI (Sikka Data View) merupakan aplikasi android yang menampilkan data BPS Kabupaten Sikka mencakup data strategis, publikasi, BRS, infografis dan kamus data statistik. Data SIDAVI menggunakan API website BPS Kabupaten Sikka.

No.	Satker	Judul Inovasi	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
26	KOTA BLITAR	DRS23 (Daftar Rekam Simpan Arsipmu Tahun 2023)	Merupakan pengembangan dari Aplikasi DRSapp BPS Kota Blitar dengan penambahan fitur di dalamnya yang mulai aktif digunakan per 1 Januari 2023 oleh seluruh pegawai BPS Kota Blitar
27	KOTA JAKARTA UTARA	TEMAN TIKA	Sistem Pengelolaan Statistik Kelurahan. Inovasi ini berbentuk pelayanan kepada kelurahan sebagai penyedia data dalam bentuk pembinaan statistik sektoral. Teman Tika mendorong terciptanya integrasi penyediaan data kelurahan untuk mewujudkan Satu Data Kelurahan melalui sinergitas atau kolaborasi antara pembina data, walidata, dan para produsesn data. BPS berperan melakukan pembinaan pengumpulan data sektoral, walidata berperan menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mewujudkan satu data kelurahan. Manfaat yang diterima oleh Kelurahan melalui inovasi ini adalah terintegrasinya data kelurahan, baik yang dikumpulkan sendiri oleh kelurahan maupun yang dikumpulkan oleh Perangkat Daerah. Dengan demikian kelurahan akan dengan mudah memanfaatkan data-data tersebut untuk kebutuhan perencanaan, monitoring, evaluasi. Selain itu dengan terintegrasinya data tersebut maka data tersebut juga akan dengan mudah dibagipakaikan kepada seluruh stakeholder.

No.	Satker	Judul Inovasi	Deskripsi
(1)	(2)	(3)	(4)
28	KOTA JAKARTA UTARA	SIMUTAN	Sistem Mutasi Persediaan. Aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan pelayanan permintaan barang persediaan di BPS Kota Jakarta Utara. Bagi Pegawai BPS Kota Jakarta Utara permintaan barang persediaan menjadi lebih mudah karena bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, serta dapat memeriksa ketersediaan barang yang diminta secara real time. Bagi BPS Kota Jakarta Utara, sistem ini mempermudah pencatatan, monitoring, dan evaluasi barang persediaan. Dengan aplikasi ini tata kelola barang persediaan menjadi lebih efektif dan efisien

Dokumentasi Prestasi BPS Tahun 2023

Informatif dalam Keterbukaan Informasi Publik

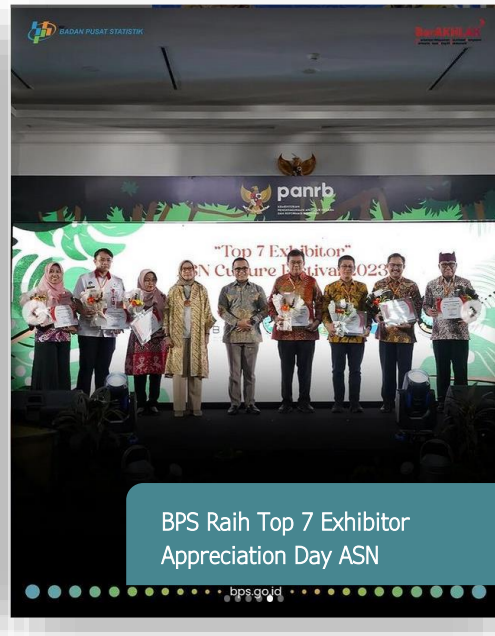

BPS Raih Top 7 Exhibitor Appreciation Day ASN

Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023

RBXperience: BPS Terima Penghargaan dan Semarakkan Pameran

Penilaian KASN: BPS Masuk Kategori Patuh

BPS Terbaik dalam Pelayanan Publik

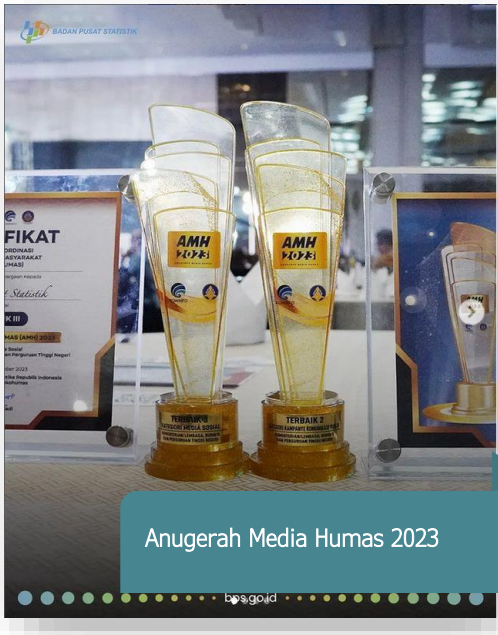

Anugerah Media Humas 2023

Pusdiklat BPS Terakreditasi sebagai Lembaga Pengakreditasi Pelatihan Fungsional

BKN Award 2023

Opini
Wajar Tanpa Pengecualian

Penghargaan Kinerja Anggaran 2022

BPS Dianugerahkan Kelayakan Pusat Penilaian Kompetensi

BPS Menjadi Chair dalam Diskusi tentang Register Based-Census

Digital Government Award untuk Kategori Pencapaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DATA
MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK
Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp.: (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021) 3857046
Homepage: http://www.bps.go.id E-mail: bpshq@ bps.go.id